PERATURAN MENTERI PERTANIAN
No. 18/ Permentan/OT.140/2/2010

Tentang

BLUE PRINT
PENINGKATAN NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING PRODUK PERTANIAN DENGAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI TUMBUHNYA INDUSTRI PERDESAAN






KEMENTERIAN PERTANIAN
2010

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR :18/ Permentan/OT.140/2/2010

TENTANG

BLUE PRINT PENINGKATAN NILAI TAMBAH
DAN DAYA SAING PRODUK PERTANIAN DENGAN
PEMBERIAN INSENTIF BAGI TUMBUHNYA INDUSTRI PERDESAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian sesuai karakteristik keinginan konsumen di pasar domestik dan/atau ekspor, perlu upaya secara sistematis dan terintegrasi;

b. bahwa nilai tambah dan daya saing produk pertanian saat ini masih rendah karena keterbatasan skala teknis dan ekonomis;

c. bahwa untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian dilakukan melalui penumbuhan agroindustri perdesaan yang disusun berdasarkan komoditas strategis;

d. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, perlu menetapkan Blue Print Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian dengan Pemberian Insentif bagi Tumbuhnya Industri Perdesaan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran

Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
3. Undang-Undan Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan Pembinaan dan Pengembangan Industri;
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Republik Indonesia;
11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/200;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2007

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG BLUE PRINT PENINGKATAN NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING PRODUK PERTANIAN DENGAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI TUMBUHNYA INDUSTRI PEDESAAN.

Pasal 1

(1) Menetapkan Blue Print Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian dengan Pemberian Insentif Bagi Tumbuhnya Industri Pedesaan, seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri Pertanian ini.

(2) Blue Print Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian dengan Pemberian Insentif Bagi Tumbuhnya Industri Pedesaan. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai acuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melakukan perencanaan, penyelenggaraan, evaluasi, pengendalian dan Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian Dengan Pemberian Insentif Bagi Tumbuhnya Industri Pedesaan.

Pasal 2

(1) Pelaksanaan dalam perumusan peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian dengan pemberian insentif bagi tumbuhnya industri pedesaan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal, Gubernur dan/atau Bupati/Walikota sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

(2) Perumusan Peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.

(3) Evaluasi dan pengendalian Blue Print Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian Dengan Pemberian Insentif Bagi Tumbuhnya Industri Pedesaan dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2010

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

LAMPIRAN: **PERATURAN MENTERI PERTANIAN**
NOMOR : **18/ Permentan/OT.140/2/2010**
TANGGAL : **5 Februari 2010**

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertanian masih merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Sektor pertanian telah berperan besar dalam pembentukan PDB Nasional hingga mencapai 13-14 %. Sektor agribisnis (pertanian serta industri dan jasa pertanian) menyumbangkan sekitar 45% dari total nilai tambah, menyerap 75% tenaga kerja, penyedia pangan, dan tempat bergantung sebagian besar penduduk perdesaan. Peran ini akan bertambah di masa yang akan datang dengan berkembangnya teknologi dan berkurangnya sumberdaya tak terbarukan, yakni pertanian menjadi tumpuan untuk penyediaan pangan yang makin beragam (*food*), pakan yang semakin bertambah (*feed*), dan energi alternatif (*fuel*).

Keadaan pertanian saat ini masih belum mampu menopang semua peran tersebut dengan baik. Pendapatan petani sebagai pelaku terdepan masih sangat rendah karena sebagian besar usaha tani berskala kecil. Petani mempunyai banyak keterbatasan modal, teknologi sederhana, akses pembiayaan, dan gangguan iklim yang semakin tidak menentu. Akibatnya produktivitas masih relatif rendah, kualitas komoditi belum baik, dan harga pokok masih tinggi. Situasi ini menjadikan komoditas pertanian Indonesia kalah bersaing dengan komoditas dari negara lain.

Dalam situasi seperti itu, pembangunan pertanian tetap penting dari keseluruhan pembangunan ekonomi. Beberapa pertimbangan adalah: (i) potensi sumberdaya yang besar dan beragam, (ii) berpotensi besar sebagai penyumbang terhadap pendapatan nasional, (iii) banyaknya penduduk yang bergantung pada sektor ini, dan (iv) peluang pasar yang masih terbuka dan berkembang. Arah pembangunan pertanian adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (petani) melalui pemanfaatan secara optimal sumberdaya pertanian dan nilai komoditas. Dengan demikian, keterpaduan hulu-hilir menjadi pilihan arah yang dapat memberdayakan pertanian secara ekonomi, sosial dan lingkungan.

Selain situasi dan kondisi tersebut, pembangunan pertanian dihadapkan pada perdagangan dunia yang semakin bebas. Komoditas dan produk pertanian harus mampu bersaing di pasar domestik (dengan impor) dan di pasar internasional (dengan produk yang berasal dari negara lain). Kemampuan bersaing produk harus dipahami sebagai output dari sinergi komponen sistem pertanian secara menyeluruh dari sektor hulu hingga hilir. Pada tingkat yang lebih maju, dayasaing negara bergantung dari kapasitas berinovasi dan berkembang dari industri negara tersebut.

Perdagangan internasional yang mendorong terjadinya globalisasi ditandai dengan semakin berkembangnya sistem inovasi teknologi informasi, perdagangan, reformasi politik, transnasionalisasi sistem keuangan, dan investasi. Indonesia mengikuti arus perdagangan bebas internasional dengan menandatangani *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) yang menghasilkan pembentukan *World Trade Organization* (WTO) dan deklarasi *Asia Pasific Economic Cooperation* (APEC) tentang sistem perdagangan bebas dan investasi yang berlaku penuh

pada tahun 2010 untuk negara maju dan tahun 2020 bagi negara berkembang. Tidak kalah pentingnya, Indonesia bersama-sama negara di lingkungan ASEAN lainnya telah sepakat membentuk perdagangan bebas ASEAN, yaitu *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) yang sudah mulai diberlakukan pada tahun 2002, terakhir berkembang China-AFTA mulai tahun 2010.

Melalui berbagai kesepakatan internasional tersebut, pasar bagi produk Indonesia sudah dan akan menghadapi persaingan yang semakin ketat, baik dalam perdagangan domestik maupun internasional serta dalam upaya menarik investasi multinasional. Keterbukaan pasar Internasional harus dimanfaatkan melalui persaingan global. Sebaliknya, upaya yang kurang sungguh-sungguh akan menjadikan Indonesia sebagai pasar produk dunia. Saat ini, sebagian besar ekspor berupa produk primer (bahan baku). Potensi nilai tambah yang terdapat di dalamnya justru dimanfaatkan oleh negara lain yang kemudian sebagian dibayar kembali melalui impor.

Pelaku usaha agribisnis Indonesia dalam pasar internasional pasti akan menghadapi pembeli besar berupa importir atau industri pengolahan lanjutan. Dalam situasi tersebut, Indonesia berada pada posisi yang lemah karena besarnya volume pembelian yang dilakukan oleh pasar industri dan sedikitnya jumlah pembeli. Kelemahan ini semakin menumpuk karena adanya kecenderungan atas homogenitas produk dengan negara lain. Publikasi *The Global Competitiveness Report* yang diterbitkan oleh *World Economic Forum* pada tahun 2009 menunjukkan dayasaing Indonesia dalam persaingan global berada di urutan ke–54 dari 134 negara.

Banyak upaya pemenangan persaingan internasional yang dapat dilakukan, diantaranya adalah peningkatan nilai tambah, dayasaing, dan ekspor. Hal ini sesuai dengan Visi pertanian tahun 2010 – 2014 adalah "Pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, ekspor dan kesejahteraan petani". Salah satu misi dari pertanian adalah "Menjadikan petani yang kreatif, inovatif, dan mandiri, serta mampu memanfaatkan iptek dan sumberdaya lokal untuk menghasilkan produk pertanian berdayasaing tinggi".

Sektor pertanian berada dalam dinamika perubahan lingkungan strategis internasional menuju persaingan pasar yang semakin kompetitif. Dengan diratifikasinya beberapa kesepakatan internasional, telah memaksa setiap negara membuka segala rintangan perdagangan dan investasi serta membuka ekspor-impor seluas-luasnya. Hal tersebut akan mendorong persaingan pasar yang semakin ketat karena terjadinya integrasi pasar regional/internasional terhadap pasar domestik.

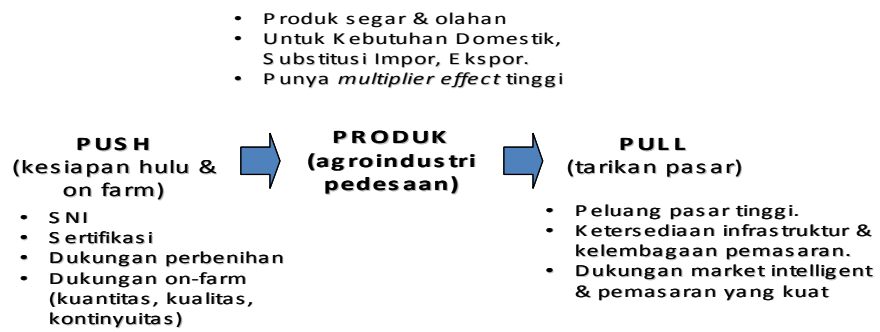
Praktek perdagangan bebas yang cenderung menghilangkan perlakuan *non tariff barier* telah berdampak besar terhadap sektor pertanian Indonesia, baik ditingkat mikro (usahatani) dan makro (nasional – kebijakan). Di tingkat mikro, liberalisasi perdagangan ini sangat terkait dengan efisiensi, produktifitas dan skala usaha. Pada tingkat makro, kebijakan pemerintah sangat diperlukan untuk "melindungi" petani produsen dan masyarakat konsumen. Pada kenyataannya kelompok negara maju lebih berhasil dalam mengamankan petaninya agar tetap bergairah berproduksi, sementara negara-negara berkembang relatif kurang berhasil memproteksi petani produsen dan masayarakat konsumen.

Tantangan ke depan yang harus dihadapi adalah meningkatkan dayasaing komoditas pertanian dengan karakteristik yang sesuai keinginan konsumen dan memenangi persaingan, baik pasar domestik, maupun pasar ekspor. Pengembangan dayasaing dan ekspansi pasar komoditas ekspor tradisional harus lebih ditingkatkan, terutama pengembangan produk olahan. Di samping itu, pengembangan komoditas dan produk baru yang memiliki permintaan pasar yang tinggi juga harus dirintis

Pendekatan *pull* dan *push* dapat dijadikan pijakan sebagai penghela berkembangnya agroindustri perdesaan yang berorientasi produk (Gambar 1). Pengembangan agroindustri perdesaan yang berbasis produk dihela dengan tarikan pasar (*pull system*) yang berupa peluang pasar yang tinggi mencakup ekspor dan domestik, ketersediaan infrastruktur dan kelembagaan pemasaran yang didukung dengan *market intelligent*. Sementara sebagai sitem pendorongnya (*push system)* adalah kesiapan hulu (kebijakan dan input). Penentuan produk harus dilakukan secara matang dengan mengacu pada skala prioritas utama komoditas yang mencakup komoditas pangan strategis sebagai penopang kemandirian pangan.

1.2. Tujuan dan *Outcomes*

Tujuan disusunnya konsep peningkatan dayasaing dan nilai tambah produk dengan pemberian insentif bagi tumbuhnya industri perdesaan adalah sebagai rancangan acuan pembangunan pertanian setidaknya dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Capaian yang akan menjadi ukuran adalah terjadinya peningkatan ekspor, tumbuhnya industri dan penggunaan produk untuk substitusi impor, serta meningkatnya konsumsi produk di dalam negeri.



Gambar 1. Konsep *push and pull systems* Untuk Industri Perdesaan

1.3. Ruang Lingkup

Cakupan dari *Blue Print* ini adalah arah dan tujuan pembangunan pertanian secara umum dalam perspektif lintas sektor dengan konsentrasi pada pembentukan nilai tambah dan dayasaing produk. Keberhasilan pertanian sangat ditentukan oleh dukungan sektor lain dan dinamika lingkungan perdagangan internasional. Oleh karena itu, program pembangunan yang terkait dengan pembentukan nilai tambah dan dayasaing dirinci menjadi program aksi. Selebihnya, akan dikelompokkan dalam program penguat/penunjang yang menjadi kewenangan instansi lain.

1.4. Metodologi

Sistematika *Blue print* diawali dari pemahaman kondisi sekarang, menetapkan arah masa depan yang akan dituju, memahami situasi internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman). Pemahaman ini melahirkan strategi umum yang menjadi panduan dan melahirkan kebijakan yang diperlukan. Mengacu pada kebijakan, disusun program aksi dan rencana implementasi dengan target yang ingin dicapai.

Verifikasi pemikiran dilakukan melalui pembahasan di tingkat Direktorat Jendral dengan masukan dari pejabat esilon I Kementerian Pertanian. Pendalaman dilakukan melalui "sosialisasi" ke beberapa Perguruan Tinggi. Dengan demikian, dokumen ini diharapkan telah mendapatkan justifikasi akademis.

Bentuk insentif yang dicakup adalah pengadaan dan bantuan alat dan mesin pengolahan hilir, dukungan pembiayaan, perluasan pasar dan kebijakan pendukung lainnya (pajak impor dan ekspor, skema pembiayaan khusus pertanian).

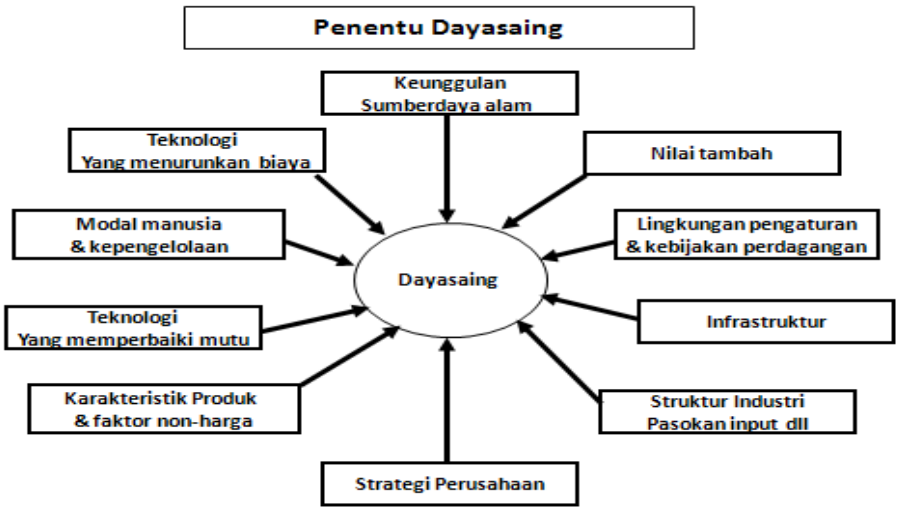
Blue print ini berbasis komoditas. Pemilihan jenis komoditas ini diharapkan dapat mewakili dari kelompok komoditi yang ada, mempunyai potensi untuk peningkatan dayasaing dan nilai tambah yang tinggi serta mempunyai *multiplier effect* yang luas terhadap peningkatan industri perdesaan. Kementerian Pertanian, melalui rangkaian kajian dan diskusi menetapkan komoditas berikut sebagai prioritas:

a. **Pangan utama** yang meliputi beras, jagung, kedelai, daging sapi.
b. **Andalan ekspor** yang meliputi sawit, karet, kakao dan daging ayam.
c. ***Emerging products*** yang mempunyai peluang pasar yang luas baik internasional maupun domestik seperti buah tropika (mangga, manggis, salak dan pisang),biofarmaka, tanaman hias daun dan minyak atsiri.
d. **Substitusi impor** seperti susu, tepung lokal (cassava dan sagu) serta jeruk.

2. KONSEP DAYASAING DAN NILAI TAMBAH KOMODITAS PERTANIAN

2.1. Dayasaing Produk dan Nilai Tambah

Dayasaing menggambarkan kemampuan bersaing di masa lalu, masa kini, dan dapat diproyeksikan ke masa depan. Dayasaing bersifat dinamis dan akan mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu bergantung pada tingkat kompetisi, perubahan perilaku permintaan, dan kemampuan dasar industri. Dayasaing produk dicapai melalui konversi keunggulan komparatif menjadi kenggulan kompetitif dengan penerapan teknologi, pengelolaan dan pengembangan pasar dari produk tersebut terhadap jenis produk yang sama. Keunggulan kompetitif ini berkaitan dengan upaya peningkatan nilai tambah yang membentuk dayasaing. Banyak faktor mempengaruhi dayasaing produk (Gambar 2.1).



Gambar 2.1. Faktor yang Mempengaruhi Dayasaing

Konsep keunggulan kompetitif adalah suatu cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperkuat posisinya dalam menghadapi pesaing dan mampu menunjukkan perbedaan-perbedaan dengan lainnya. Dalam konteks komoditas pertanian, semua faktor (Gambar 2.1) berpengaruh secara langsung. Indonesia mempunyai sumberdaya alam yang unggul dibandingkan banyak negara lain di dunia. Keunggulan ini sangat nyata bila difokuskan pada pertanian tropis (*tropical agriculture*) dengan karakteristik dan faktor non-harga yang kuat.

Dalam faktor yang lain, Indonesia masih perlu melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk membentuk dayasaing. Fokus upaya adalah mengembangkan dan menerapkan teknologi yang dapat menekan biaya (*cost reducing technology*) dan memperbaiki mutu (*quality enhancement technology*). Dalam jangka pendek, orientasi pada skala kecil dan infrastruktur terbatas.

Pengelolaan dan pengembangan SDM berbasis usaha kecil dengan arah peningkatan skala menjadi keharusan dam jangka pendek dan menengah. Dayasaing harus dibangun dari perbaikan efisiensi pengelolaan sehingga kualitas SDM menjadi fakror penentu.

Faktor yang sepenuhnya dapat dikelola dengan baik adalah kebijakan pembangunan pertanian. Oleh karena itu, kebijakan yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi sektor pertanian harus segera dikeluarkan. Sebaliknya, kebijakan yang menghambat, secara bertahap dikurangi sehingga perbaikan dayasaing menjadi arus utama pembangunan pertanian.

Infrastruktur menentukan dayasaing karena terkait dengan produktivitas serta efisiensi pengadaan faktor produksi dan distribusi produk. Pada giliranya menjadi faktor penentu harga pokok produksi, ketetapatan waktu dan mutu produk.

Oleh karena itu, upaya perbaikan dayasaing tidak terlepas dari pengadaan dan pengembangan infrastruktur pendukung dan terkait dengan semua aspek produksi pertanian.

Strategi perusahaan dan struktur industri pendukung meskipun terkait langsung dengan dayasaing komoditas pertanian, tidak menjadi faktor penentu inti dalam pembangunan pertanian Indonesia. Nilai tambah akan menjadi bagian tersendiri yang tidak ditempatkan sebagai faktor tetapi lebih dari itu sebagai program penguat pembangunan pertanian.

Nilai tambah dapat diartikan dari berbagai perspektif. Dari perspektif komoditas atau produk adalah nilai yang diberikan (*attributed*) kepada produk sebagai hasil dari proses tertentu (proses produksi, penyimpanan, pengangkutan). Oleh karena itu, nilai yang terbentuk tergantung pada banyaknya tahapan pengolahan yang dilakukan. Secara teoritis, semakin ke hilir penerapan proses akan semakin besar nilai tambah yang dibentuk.

Nilai bagi konsumen (*customer value*) adalah perpaduan dari faktor dayasaing yang berpadu dengan nilai tambah sehingga dapat ditingkatkan melalui tiga cara, yaitu kegiatan-kegiatan yang mampu menciptakan: keunggulan bersaing (*competitive advantage*), menekan biaya proses, atau mempercepat proses penyediaan produk ke tangan konsumen. Peningkatan dayasaing ini dapat diperoleh dengan menerapkan cara-cara baru dalam melakukan kegiatan, menerapkan prosedur dan teknologi baru, atau menggunakan masukan (input) yang berbeda.

Disisi lain, peningkatan dayasaing produk melalui peningkatan nilai tambah harus memberikan *multiplier effect* yang tinggi seperti yang digambarkan pada Gambar 2.1.

Sasaran program penguatan dayasaing ini diarahkan untuk memperkuat dan menumbuhkembangkan industri perdesaan dengan *multiplier effect* yang tinggi karena sebagian besar penduduk ada di area perdesaan dan relatif dari sisi ekonomi masih lemah. Diharapkan melalui industri perdesaan akan tercipta lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan perekonomian perdesaaan.

2.2. Konsep Peningkatan Dayasaing dan Nilai Tambah Produk

Peningkatan dayasaing dan nilai tambah melalui industri perdesaan harus melalui perumusan yang komprehensif yang melibatkan lintas sektoral yang mencakup hulu hilir sehingga program yang dikembangkan dapat saling menunjang satu sama lain. Dengan memperhatikan *push and pull factors* (faktor pendorong dan penarik) dirumuskan insentif yang dapat diberikan dalam aspek kebijakan dan operasional untuk menciptakan iklim tumbuhnya industri yang kondusif, modal, dukungan infrastruktur, penerapan teknologi, peningkatan SDM serta fasilitasi pemasaran produk. Peningkatan nilai tambah dapat difokuskan pada produk strategis dalam rantai nilai dengan mempertimbangkan skala prioritas.

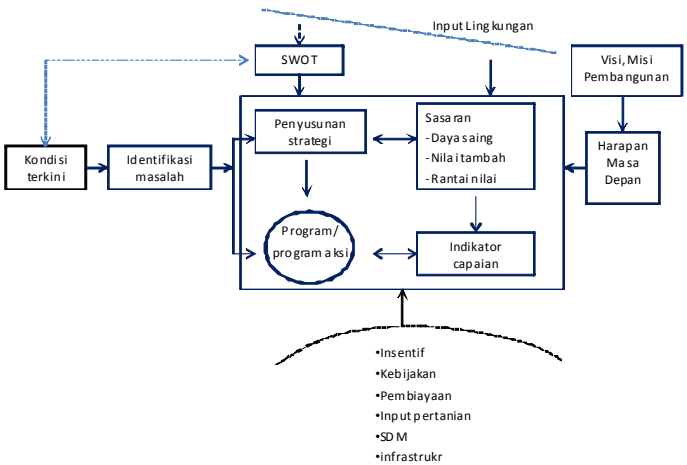
Penentuan skala prioritas ini mengacu pada kondisi terkini, permasalahan yang ada, dan peluang ke depan yang dapat ditentukan melalui analisis SWOT. Proses penyusunan program aksi mengikuti tahap tertentu (Gambar 2.2).

Besarnya nilai-tambah yang ditimbulkan dari proses pengolahan dihitung dari nilai produk yang dihasilkan dikurangi biaya bahan baku dan input lainnya. Proses ini ditempuh melalui proses produksi, distribusi, transportasi dan pemasaran. Tingkat keuntungan diperoleh dari kelebihan yang didapat setelah harga dikurangi dengan keseluruhan biaya yang keluar selama proses pengadaan produk,

sehingga keunggulan bersaing diperoleh jika keseluruhan proses dapat menghasilkan nilai konsumen yang sama dengan atau lebih rendah dari biaya atau penerapan cara yang

menghasilkan nilai konsumen yang lebih besar. Analisis rantai-nilai dapat menghitung kontribusi nilai-tambah dari setiap aktivitas dalam proses pengolahan suatu produk, sehingga dapat digunakan untuk menghitung besarnya nilai yang layak diterima oleh masing-masing pelaku dalam suatu sistem komoditi. Analisis nilai tambah bermanfaat untuk memperoleh informasi mengenai faktor-faktor yang menaikkan nilai tambah atau sebaliknya.

Strategi pengembangan industri perdesaan didasarkan pada hasil analisis SWOT. Berdasarkan strategi tersebut selanjutnya disusun strategi umum pengembangan produk yang dipilih. Peran dari masing-masing sektoral untuk masing-masing produk yang dikembangkan diidentifikasi melalui mapping program lintas sektoral yang ada di Departemen terkait. Selanjutnya strategi operasional pengembangan produk dirumuskan berdasarkan pada strategi masing-masing produk dan dijabarkan dalam rencana aksi yang disusun berdasarkan jangka panjang, menengah dan pendek selama lima tahun (2010-2014).



Gambar 2.2. Konsep Peningkatan Daya Saing dan Nilai Tambah

3. KEADAAN DAN PERMASALAHAN PERTANIAN INDONESIA

3.1. Keadaan Pertanian Indonesia

Pertanian Indonesia masih berperan sebagai salah satu sektor ekonomi yang sangat penting dalam penyerapan tenaga kerja, pembentuk pendapatan, produksi pangan, perolehan devisa, penghasil bahan baku dan penggerak kehidupan sosial. Perjalanan panjang pembangunan pertanian belum menggeser dan atau memperbaiki peran tersebut secara signifikan, sehingga capaiannya masih belum optimal. Situasi masa lalu masih mewarnai wajah pertanian yakni lahan sempit tidak memenuhi skala ekonomis atau teknis, lahan kering, irigasi terbatas, jalan pertanian belum memadai, penerapan teknologi belum memadai, sumberdaya modal terbatas, dan jangkauan pasar yang terbatas.

Situasi tersebut menyebabkan pertanian terpusat pada kegiatan hulu dengan dayasaing komoditas relatif rendah. Keterbatasan skala teknis menghambat penerapan teknologi (khususnya *cost reducing technology*) menyebabkan biaya produksi menjadi lebih mahal. Keterbatasan skala ekonomis menyebabkan pengelolaan bersifat subsisten yang berorientasi pada pemenuhuan kebutuhan lokal dan sesaat sehingga tidak bersaing. Hal inilah menjadi potret umum pertanian Indonesia yakni menghasilkan bahan baku dengan dayasaing rendah (mutu rendah dan biaya tinggi).

Kondisi subsisten tersebut dibebani dengan "keharusan" menampung tambahan angkatan kerja secara berlebih sehingga terjadi fraksinasi usaha tani menjadi lebih tidak efisien dan membelenggu (buruh) petani dalam lingkaran kemiskinan.

Hal ini terjadi karena pertumbuhan sektor hilir pertanian relatif lamban sehingga surplus tenaga kerja pertanian menjadi beban yang menyebabkan disefisiensi teknis dan ekonomis dalam produksi hulu pertanian.

Lahan pertanian semakin tertekan oleh kegiatan ekonomi lainnya menyebabkan terjadi konversi pada laju yang menghawatirkan. Selain itu, praktek pertanian yang "memaksa" produktivitas tinggi dengan asupan pupuk kimia dan pestisida telah menurunkan kesuburan tanah secara nyata. Kecenderungan ini memaksa upaya (input) yang lebih besar untuk menghindari laju penurunan produktivitas yang semakin cepat. Sebaliknya, pemanfaatan lahan tidur dan tidak produktif masih belum optimal.

Upaya peningkatan produktivitas dan perluasan lahan beririgasi semakin sulit karena perubahan iklim yang semakin tidak menentu. Kekeringan dan banjir menjadi fenomena yang sangat sering mengganggu produksi pertanian. Kelangkaan air akan menjadi faktor pembatas program intensifikasi dan ekstensifikasi di masa mendatang. Pemanfaatan air semakin kompetitif dan tidak mustahil menjadi faktor produksi yang mahal.

Penerapan teknologi budidaya masih belum optimal dan belum merata. Penggunaan benih unggul yang belum merata menjadi faktor pembeda penerapan teknologi. Keberlanjutan program penyeragaman benih, di satu sisi diharapkan mampu memperbaiki kinerja pertanian, tetapi di sisi yang lain menimbulkan kekhawatiran kerentanan terhadap gangguan hama dan persoalan lingkungan.

Persoalan hilir yang belum menyatu dengan hulu membentuk situasi yang tidak menguntungkan dalam pasar dan tataniaga. Hal inilah yang menyebabkan rendahnya nilai tukar dan dayasaing produk pertanian. Sistem informasi pasar dalam arti luas belum berkembang dan terpadu dengan rencana produksi pertanian. Aktivitas pertanian di hulu tidak secara langsung dan terencana terkait dengan kegiatan di hilir (permintaan, pengolahan dan pemasaran).

Kesenjangan hulu-hilir manjadikan pertanian sebagai kegiatan ekonomi yang tidak berbasis pada distribusi marjin yang adil dan perolehan nilai tambah yang optimal.

Pelaku pertanian (petani, buruh tani, dan pelaku lainnya) belum bekerja sesuai dengan tuntutan persaingan yang ketat. Kualitas SDM yang relatif rendah menghambat pertumbuhan sektor pertanian yang berdayasaing dan berkontribusi dalam perolehan nilai tambah (ekonomi). Revolusi pertanian hampir tidak terjadi selama kurun waktu pembangunan yang telah dijalani karena SDM-nya belum mampu menjadi penggerak yang tidak memenuhi kebutuhan.

Pertanian sebagai obyek pembangunan melibatkan banyak pemangku kepentingan baik pelaku langsung maupun pengambil kebijakan dan layanan pendukung. Pada tataran kebijakan belum terpadu dan serasi antar pembuatan kebijakan baik di hulu (Badan Pertanahan Nasional, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Keuangan), dalam produksi (Departemen Pertanian, Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah), dan di hlir (Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan). Pemaduserasian kebijakan menjadi bagian penting dari pembangunan pertanian masa datang.

3.2. Permasalahan Pertanian Indonesia

3.2.1. Skala Teknis dan Ekonomis

Skala teknis adalah ukuran dan keadaan lahan pertanian sehingga memungkinkan penerapan teknologi dan penggunaan alat-mesin pengolahan lahan, budidaya dan penanganan pasca panen. Ukuran petakan sawah dan kebun yang kecil serta kemiringan yang curam tidak memungkinkan

penerapan teknonologi secara optimal. Skala ekonomis adalah luasan pengusahaan lahan sehingga diperoleh penerimaan (ekonomis) yang melebihi biaya dan kebutuhan petani secara wajar. Lahan yang kecil tidak memungkinkan petani memperoleh hasil yang dapat memenuhi kebutuhan sehingga usahataninya tidak dapat mensejahterakan. Rataan pemilikan lahan petani di pedesaan sebesar 0,41 ha dan 0.96 ha masing-masing di Jawa dan Luar Jawa.

Dalam perspektif dayasaing, skala kecil menyebabkan:

a) **Tidak efisien:** pengadaan dan penggunaan input, pengelolaan usaha serta penanganan dan pemasaran hasil dilakukan dengan korbanan yang besar. Akibatnya "biaya" yang digunakan melebihi kewajaran membentuk harga pokok produksi menjadi sangat tinggi sehingga tidak dapat bersaing.

b) **Pemaksaan produktivitas:** Dalam skala yang kecil, pendapatan hanya dapat ditingkatkan dengan memaksimumkan penggunaan lahan yang dimiliki. Penggunaan yang berlebih *(over exploitation)* menguras kesuburan tanah, menggunakan air secara "berlebih" dan menghilangkan keragaman hayati. Dalam jangka panjang akan terjadi kerusakan lahan yang berakibat pada penurunan produktivitas normal.

c) **Penerapan teknologi dan mekanisasi terbatas**: alat dan mesin pertanian mempunyai kelayakan skala minimum, jika lebih kecil menjadi tidak efektif dan tidak efisien. Lahan yang kecil menyebabkan penerapan mekanisasi menjadi sangat terbatas.

d) **Penyebab kemiskinan**: penghasilan adalah faktor utama pembentuk kesejahteraan. Bagi petani, penghasilan berbanding lurus dengan produksi yang merupakan pengalian produktivitas dengan luas. Dengan demikian, luas adalah faktor penentu yang dalam banyak aspek tidak dapat dikendalikan oleh petani.

e) **Tidak terorganisir:** skala kecil tidak dapat berdiri sendiri untuk memperbaiki efisiensi. Dalam perspektif ekonomi, kecuali ada kekhasan, skala kecil lemah dalam pengelolaan usaha (pengadaan sarana produksi sampai dengan pemasaran). Hal ini menyebabkan lemahnya kelembagaan dan posisi tawar petani yang berakibat pada panjangnya tataniaga dan belum adilnya sistem pemasaran.

f) **Tidak kompetitif**: skala kecil merupakan kumpulan karakteristik penyebab inefisiensi. Di hulu berhadapan dengan biaya produksi, di tengah bertemu dengan skala ekonomis dan di hilir dihadang persoalan volume, mutu dan kesinambungan. Semua ini berakhir pada dayasaing yang lemah.

3.2.2. Alih Fungsi Lahan

Lahan yang baik untuk pertanian adalah tanah subur, topografi relatif rata, iklim menunjang, dan infrastruktur memadai. Pembangunan perkotaan, pertambahan penduduk dan pertumbuhan ekonomi menyebabkan permintaan terhadap lahan meningkat cepat.

Sektor non-pertanian yang membutuhkan banyak lahan adalah permukiman (settlement), industri, perdagangan, jalan, perhotelan dan perkantoran. Semua sektor ini dapat memberikan penerimaan yang lebih baik terhadap nilai lahan dibandingkan pertanian. Oleh karena itu, laju konversi lahan pertanian menjadi penggunaan tersebut semakin meningkat.
Akibatnya, lahan (subur) pertanian berkurang dengan berjalannya waktu. Data BPS tahun 2004 menunjukkan bahwa besaran laju alih fungsi lahan pertanian dari lahan sawah ke non sawah sebesar 187.720 ha per tahun, dengan rincian alih fungsi ke non pertanian sebesar 110.164 ha per tahun dan alih fungsi ke pertanian lainnya sebesar 77.556 ha per tahun. Demikian juga dengan alih fungsi lahan kering pertanian ke non pertanian sebesar 9.152 ha per tahun.

3.2.3. Perdagangan

Perdagangan produk pertanian sebagian besar dalam bentuk primer dengan rantai tataniaga panjang. Situasi seperti ini menyebabkan petani tidak memperoleh nilai produk yang terkandung dalam komoditas sehingga distribusi marjin tidak wajar dan nilai tambah tidak optimal. Dalam jangka panjang, selain petani tidak memperoleh pendapatan yang wajar juga mengurangi minat mereka untuk mengambangkan usahataninya.

3.2.4. Produk Pertanian

Produk pertanian Indonesia sangat beragam sehingga, dalam banyak kasus, tidak memenuhi skala minimum perdagangan. Lebih dari itu, mutu rendah dan kesinambungan tidak terjamin menyebabkan produk tersebut bukan menjadi pilihan utama konsumen dan sulit diharapkan menjadi bahan baku industri pengolahan.

3.2.5. Fluktuasi Harga

Fluktuasi produksi dan harga terutama terjadi pada panen raya. Harga turun (drastis) pada saat produksi tinggi sehingga volume besar bukan jaminan bagi petani untuk memperoleh pendapatan yang memadai. Situasi seperti ini menjadi kekhawatiran sekaligus keengganan petani untuk berkonsentrasi pada komoditas tertentu. Akibat langsung perubahan harga adalah petani tidak pernah menikmati penerimaan yang relatif besar dan keterandalan komoditas tersebut sangat rendah.

3.2.6. Infrastruktur Terbatas

Salah satu persyaratan pertanian modern yang kompetitif adalah tersedianya infrastruktur (irigasi dan jalan tani) yang memadai. Kecukupan infrastruktur menjadi penjamin bagi produktivitas dan efisiensi total usaha tani. Pertanian Indonesia belum didukung dengan infrastruktur yang memadai sehingga beroperasi pada tingkat efisiensi yang rendah. Akibatnya, penerapan teknologi tidak optimal. Sistem alih teknologi dan diseminasi teknologi pengolahan pertanian masih rendah.

3.2.7. Pembiayaan Pertanian Terbatas

Akses petani ke sumberdaya produktif termasuk permodalan dan layanan usaha masih sangat terbatas. Hal ini menyebabkan usaha tani tidak dijalankan dengan optimal. Akibatnya adalah pertanian tidak tumbuh dengan baik dan beroparasi secara terbatas sehingga tidak efisien.

3.2.8. Konsentrasi Pembangunan

Pembangunan pertanian terpusat pada padi (beras) dan tebu (gula) sehingga dana pembangunan terserap (atau dialokasikan) secara berlebih.

Di sisi lain, banyak komoditas yang mempunyai nilai (fungsional dan ekonomis) kesetaraan dengan komoditas tersebut tidak mendapat perhatian yang setara. Dana pembangunan yang terbatas seyogiyanya dialokasikan secara wajar bagi komoditas prospektif secara ekonomi dan kontributif bagi ketahanan pangan.

3.2.9. Sumberdaya Manusia

Kualitas SDM pertanian masih sangat rendah. Hal ini menyebabkan atau menjadi kendala bagi upaya perbaikan aspek teknis dan ekonomis usaha tani melalui penerapan teknologi dan pengelolaan berbasis agribisnis. Orientasi subsisten sudah melekat dan menjadi ciri pertanian sehingga sulit berubah ke arah yang lebih produktif, efisien dan berorientasi pasar.

3.2.10. Perubahan iklim

Perubahan iklim telah menjadi fenomena alam yang sangat mengganggu pertanian. Musim hujan selain tidak berpola juga intensitasnya tidak menentu. Banyak gagal panen akibat banjir (musim penghujan) atau kekeringan (musim kemarau). Lebih dari itu, perubahan iklim menyebabkan penurunan produktivitas, erosi, kerusakan lahan dan serangan hama/penyakit. Akibatnya, pola tanam, produksi dan perencanaan pertanian dilakukan dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi.

Dengan situasi dan kondisi pertanian di atas, maka ekonomi perdesaan yang didominasi oleh pertanian dicirikan oleh:

a. Bertumpu pada pertanian yang sangat rapuh
b. Pertanian yang rapuh tidak mampu menopang perekonomian yang kuat
c. Pertanian seperti itu tidak akan pernah mensejahterakan rakyat
d. Struktur subsisten hanya untuk bertahan dalam banyak keterbatasan.

4. STRATEGI, KEBIJAKAN DAN PROGRAM

4.1. Strategi

Keadaan dan permasalahan pertanian masih sangat banyak dan beragam, sehingga menuntut strategi yang komprehensif. Beradasarkan pada analisis SWOT komoditas dikembangkan strategi spesifik dalam memanfaatkan peluang dan kekutan serta mengatasi masalah dan ancaman. Dari strategi spesifik tersebut dikembangkan strategi pokok yang bersifat umum sebagai berikut:

a. Perbaikan skala teknis dan eknomis usaha tani
b. Pengendalian konversi lahan subur
c. Perbaikan teknologi budidaya dan penanganan pasca panen (perbaikan dayasaing)
d. Peningkatan produkstivitas dan produksi
e. Peningkatan kualitas penanganan pasca panen untuk perbaikan mutu dan pengurangan susut
f. Pengembangan agroindustri (perolehan nilai tambah)
g. Penyediaan dana pengembangan pertanian
h. Penguatan posisi tawar produk pertanian
i. Penganekaragaman bahan pangan pokok dan gula
j. Pertanian adaptif dan berkelanjutan
k. Penguatan kelembagaan (Poktan, Gapoktan dan Koptan)
l. Peningkatan kualitas SDM penyuluh, petani dan pelaku agroindustri perdesaan
m. Pemberian insentif yang berorientasi penguatan dayasaing dan penumbuhan agroindustri perdesaan
n. Percepatan pembangunan infrastruktur pendukung pertanian

4.2. Kebijakan

Pembangunan pertanian tidak dapat berdiri sendiri dan secara kuat terkait dengan kementerian dan instansi lainnya. Bahkan dapat dikatakan bahwa keberhasilan pembangunan pertanian sebagian besar ditentukan oleh kontribusi sektor lain (Gambar 4.1).

Keperluan dukungan sektor lain untuk pembangunan pertanian antara lain:

a. Departemen Pekerjaan Umum – jaringan irigasi primer dan sekunder, waduk, embung besar, jalan, dan pengendalian banjir
b. Departemen Perindustrian – jaminan pasokan pupuk dari produsen dan bahan-bahan kimia untuk pertanian
c. BUMN – program Corporate Social Responsibility (CSR) BUMN
d. BULOG - stabilisasi harga pangan
e. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi – transformasi tenaga kerja pertanian ke sektor industri
f. Departemen Perhubungan – kapasitas pelabuhan, kapal, kereta api, dan pesawat udara untuk arus barang antar pulau, antar wilayah dan antar negara; tarif angkutan produk pertanian
g. Departemen Keuangan – pembiayaan yang murah dan terjangkau bagi petani, asuransi pertanian
h. Kementerian Koordinasi Bidang Ekonomi – koordinasi kebijakan terkait produksi, distribusi, dan harga sarana produksi dan produk pertanian

i. Departemen Energi Sumberdaya dan Mineral – jaminan pasokan gas sesuai kebutuhan industri pupuk, percepatan penggunaan bio-energi sebagai energi alternatif

j. Departemen Perdagangan – jaminan pendistribusian pupuk sampai lini 4, stabilisasi harga pangan pokok, pasar lelang komoditi pertanian,

k. Departemen Dalam Negeri – koordinasi APBN lintas sektor untuk pelaksanaan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, pemberdayaan masyarakat desa, dan koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.

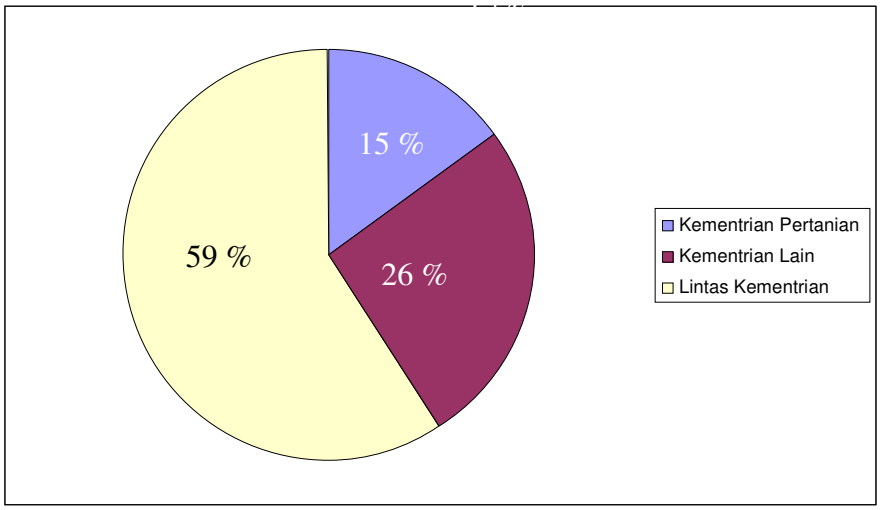
l. BKPM – peningkatan daya tarik investasi sektor pertanian

m. BPN – reformasi agraria, pengendalian konversi lahan dan sertifikasi lahan

n. Departemen Pendidikan Nasional – promosi diversifikasi konsumsi pangan

o. Departemen Kesehatan – promosi diversifikasi konsumsi pangan dan koordinasi pengendalian kesehatan masyarakat veteriner.

Dalam konteks pengembangan pertanian dewasa ini, khususnya penguatan dayasaing dan nilai tambah, keperluan tersebut dapat diterjemahkan menjadi kebijakan kementerian dan instansi terkait lainnya. Beberapa kebijakan berupa insentif bagi tumbuh-kembangnya agroindustri sekaligus penguatan dayasaing. Secara umum kebijakan dan insentif yang diperlukan dapat dilihat pada Tabel 4.1 dan 4.2.



Gambar 4.1. Keterkaitan kementerian dan instansi lain dalam pembangunan pertanian

Tabel 4.1. Kebijakan Terkait Dengan Pembangunan Nilai Tambah dan Agroindustri

Kebijakan	Instansi/Lembaga
1) Pelaksanaan UU PLPPB No.41 tahun 2009,	DEPTAN/BPN/ KMBUMN)
2) Revisi PP No 17 tahun 1986 tentang Kewenangan, Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri	
3) Penegakan hukum pelaksanaan peraturan pemotongan sapi betina produktif	DEPKUHAM
4) Pendirian Bank pertanian atau lembaga keuangan non bank yang dapat menyediakan skema pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik pertanian dan industr perdesaan (sejenis KUP)	DEPKEU/BI
5) Pengalihan impor sapi bakalan menjadi sapi induk (betina)	DEPTAN?DEPKEU/ DEPDAG
6) Kebijakan pengembangan RPU di sentra produksi	DEPTAN
7) Pergeseran subsidi input ke subsidi output secara bertahap	DEPTAN
8) Pengembangan kawasan pembangunan pertanian terintegrasi	Deptan, Pemda
9) Peningkatan koordinasi lintas departemen dalam penentuan komoditas unggulan	DEPTAN/DEPRIN/DEPDAG/DEPDIKNAS/ KMNRT
10) Kebijakan pengaturan produk pertanian untuk keperluan pangan dan biofuel secara jelas dan tegas	DEPTAN/DEPRIN/DEPESDM/ DEPDIKNAS/ KMNRT
11) Revisi peraturan beras bersubsidi menjadi pangan bersubidi	Sekneg
12) Penambahan gerbang ekspor di beberapa daerah	DEPPU/DEPKEU
13) Kebijakan pendorong tumbuhnya industri hilir	DEPKEU
14) Kebijakan pengurangan pajak impor mesin dan peralatan industri hilir yang belum bisa disediakan oleh industri dalam negeri	DEPKEU
15) Kebijakan pengurangan pajak impor untuk produk hilir yang sudah mampu diproduksi di dalam negeri	DEPKEU

Kebijakan	Instansi/Lembaga
16) Kebijakan subsidi biofuel	DEPESDM/DEPKEU
17) Pengembangan tranportasi pertanian	
18) Kebijakan mewajibkan eksportir dan gudang teregistrasi	DEPDAG/DEPTAN
19) Penetapan harga minimal regional	PEMNDA
20) Stabilisasi harga komoditas pokok (HPP beras, ubikayu, jagung)	DEPTAN/BULOG
21) Stabilisasi harga melaui SPS dan TBT,	DEPDAG/DEPTAN
22) Kebijakan pengembangan dana riset untuk pengembangan produk unggulan dengan pendekatan hulu hilir secara komprehensif sampai pada tahap komersialisasi teknologinya.	DEPTAN/DEPDIKNAS /KMNRT
23) Kebijakan pengambangan dana riset untuk memperkuat posisi tawar komoditas unggulan dan produk turunannya.	DEPTAN/DEPDIKNAS /KMNRT
24) Kebijakan penyerap tepung 26mpor oleh 26mporter/pengguna tepung terigu	DEPDAG/DEPRIN/ DEPTAN
25) Kebijakan tepung komposit minimal sampai 20%	DEPRIN/DEPTAN
26) Kebijakan premix biofuel secara bertahap ke BBM pertamina	DepESDM

TBT=Technical barrier trade, SPS=sanitary and phytosanitary agreement

Tabel 4.2. Kebijakan Terkait Dengan Pembangunan Nilai Tambah dan Agroindustri

Insentif	Instansi/ lembaga
1) Pengembangan skema pengusahaan lahan kepada petani produktif dari lahan HGU yang habis masa perijinannya	DEPTAN/BPN/KMN BUMN
2) Memperbesar/memperluasjangakuan KUPS	DEPKEU
3) Pemberian KUPS pada peternak "breeder"	DEPTAN
4) Mengembangan skema pembiayaan seperti KUPS pada komoditas pertanian lainnya	DEPKEU
5) Bantuan sarana produksi pertanian untuk peningkatan produksi dan produktivitas	DEPTAN
6) Bantuan mesin dan peralatan untuk menekan susut pasca panen dan perbaikan mutu	DEPTAN
7) Pemberian insentif pengurangan pajak impor untuk memasukkan sapi betina	DEPKEU
8) Pembangunan/penguatan infrastrukut (ljalan, pelabuan, penggudangan) untuk mendukung peningkatan daya saing	DEP PU/DEP HUB
9) Pembangunan infrastruktur pertanian (jalan sawah, irigasi)	DEP PU/DEPTAN
10) Penetapan HPP sedini mungkin	DEPTAN/BULOG
11) Insentif dana penelitian untuk pengembangan teknologi dan komersialisasi teknologi untuk mendorong tumbuhnya industri hilir	DEPTAN/DEPDIKNAS /KMNRT/SWASTA
12) Insentif dana penelitian untuk pengembangan teknologi dan komersialisasi benih/bibit unggul yang tahan perubahan iklim	DEPTAN/DEPDIKNAS /KMNRT/SWASTA
13) Insentif dana penelitian untuk peningkatan posisi tawar komoditas unggulan dan produk turunannya di dubia internasional.	DEPTAN/DEPDIKNAS /KMNRT/SWASTA
14) Bantuan untuk rakyat miskin atau bencana	DEPDAGRI/BULOG

Insentif	Instansi/ lembaga
tidak hanya dalam bentuk beras bersubsidi akan tetapi dapat dalam bentuk pangan berbahan baku tepung lokal	
15) Jaminan pasar biofuel dari PT. Pertamina	DEP ESDM/KMN BUMN/PERTAMINA
16) Pelatihan penerapan SJMKP untuk peningkatan kualitas produk	
17) Pengurangan pajak impor mesin dan peralatan industri hilir yang belum bisa disediakan oleh industri dalam negeri	DEPKEU
18) Pengurangan pajak impor untuk produk hilir yang sudah mampu diproduksi di dalam negeri	DEPKEU
19) Fasilitasi pameran dagang di dalam dan luar negeri	DEPTAN

Keterpaduan dalam Kementerian Pertanian harus menjadi awal gerakan pembentukan dayasaing dan nilai tambah. Direktorat Jenderal dan Instansi lain yang berwenang di hulu (perkebunan, peternakan, tanaman pangan dan hortukultura) harus mengacu kepada pembentukan nilai tambah. Instansi di hilir senantiasa menselaraskan program untuk meneruskan produk dengan dayasaing hingga ke konsumen akhir. Direktorat Jenderal PPHP harus mampu menjadi penghubung hulu-hilir (petani dan konsumen) melalui program terpadu pembentukan nilai tambah dan dayasaing berbasis produk.

Pembangunan pertanian menuntut keterpaduan hulu dan hilir yang terencana, tepat dan berkesinambungan. Keberhasilan dalam satu rantai nilai tidak akan

berhasil bila tidak ditopang oleh rantai sebelumnya dan tidak diteruskan oleh rantai sesudahnya. Pemenggalan kewenangan lintas kementerian menyulitkan kordinasi strategi, kebijakan dan program penguatan dayasaing dan nilai tambah. Oleh karena itu, revisi PP 17/1986 tentang kewenangan, pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri seyogianya diarahkan

untuk menjadikan agroindustri menjadi satu dalam Kementerian Pertanian.

Selain koordinasi dan keterpaduan antar Instansi Pemerintah (G), keberhasilan program juga ditentukan oleh peran aktif dunia bisnis/B (penggerak, penghela dan pelaksana utama) dan akademisi (A) sebagai penghasil teknologi termasuk pemikiran ilmiah pembentuk dayasaing. Peran aktif harus terencana, terpadu dan terprogram sehingga terjadi keserasian yang saling terkait dan menguatkan (Lihat Bab 6).

4.3. Program Aksi

Secara umum program aksi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi dan kebijakan adalah sebagai berikut:

4.3.1. Peningkatan Produksi dan Produktivitas

a) Pengembangan benih unggul untuk tujuan khusus seperti ketahanan pangan dan energi, bahan baku industri dan ekspor.
b) Pengembangan benih unggul tanaman pangan yang tahan kekeringan dan kebanjiran untuk mengantisipasi perubahan iklim.
c) Penyediaan benih unggul sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan
d) Pengembangan pertanian yang berkelanjutan dengan menerapkan cara budidaya yang baik (GAP)
e) Pengembangan pertanian berbasis kawasan (kawasan ternak terpadu, kebuh buah tropika untuk ekspor, sentra biofarmaka)
f) Peningkatan skala usaha tani/ternak
g) Ekstensifikasi terbatas, misalnya untuk padi dengan program *rice estate*

4.3.2. Peningkatan Kualitas dan Penurunan Susut Panen dan Pasca Panen Melalui:

a). Perbaikan cara panen
a) Penguatan teknologi pasca panen
b) Perbaikan penanganan pasa panen (transportasi)

4.3.3. Penumbuhkembangan Industri Perdesaan Untuk Meningkatkan Nilai Tambah dan Dayasaing Produk Pertanian:

a) Perbaikan dan penguatan teknologi dari industri perdesaan yang sudah ada
b) Mendorong tumbuhnya industri perdesaan yang dapat memanfaatkan hasil samping secara optimal
c) Peningkatan fasilitas/kapasitas dari RPH/RPU
d) Menumbhukan industri pengolahan yang mampu dikerjakan oleh kelompok tani, gabungan kelompok tani dan koperasi pertanian.
e) Menumbuhkan industri perdesaan penanganan produk segar hortikultura

4.3.4. Peningkatan Dayasaing Produk Pertanian Melalui Penguatan Posisi Tawar Produk Pertanian Dengan:

a) Penerapan HPP untuk komditas strataegis
b) Peningkatan citra produk pertanian Indonesia
c) Kampanye yang dapat mendorong peningkatan konsumsi produk lokal

4.3.5. Peningkatan Kapasitas POKTAN/GAPOKTAN Untuk Memperkuat Posisi Tawar Dalam Perdagangan Produk Pertanian Dengan:

a) Penguatan kelembagaannya (aspek legal dalam bentuk koperasi)
b) Pengembangan kemitraan POKTAN dengan pihak ketiga (industri pengolahan, eksportir, BULOG dll)

c) Penguatan kemampuan poktan untuk melakukan penanganan bahan segar dan pengolahan produk pertanian.

4.3.6. Perbaikan/Peningkatan Mutu Untuk Meningkatkan Dayasaing Produk Pertanian Dengan:

a) Penguatan/perbaikan teknologi (misalnya pada penggilingan beras)
b) Pengembangan/penerapan standar perkebunan sawit berkelanjutan
c) Pengembangan/penerapan SJMKP/SJM pada penanganan produk segar dan pengolahan produk pertanian.

4.3.7. Peningkatan Kualitas SDM Penyuluh, Petani dan Pelaku Industri Perdesaan Untuk Peningkatan Efisiensi Biaya Produksi dan Peningkatan Mutu Dengan:

a) Pelatihan TOT untuk penyuluh pertanian
b) Pelatihan dan pendampingan

4.3.8. Insentif diperlukan Untuk Meningkatkan Dayasaing dan Penciptaan Nilai Tambah Untuk Pengembangan Industri Perdesaan Melalui:

a) Insentif penelitian dan pengembangan untuk peningkatan produktivitas dan pengembangan produk bernilai tambah.
b) Pemberian insentif untuk produksi produk pertanian yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat seperti kedelai atau yang mempunyai nilai potensial ekspor yang sangat baik.
c) Insentif skema pembiayaan dengan bunga rendah yang dapat dijangkau petani dan industri pedesaan

4.3.9. Pengembangan Dayasaing dan Nilai Tambah Sangat Ditentukan Kebrhasilannya Oleh Adanya Dukunga Infrastruktur Yang Memadai yaitu:

a) Infrstruktur produksi seperti irigasi dan jalan usaha tani
b) Sarana transportasi darat, laut dan udara
c) Sarana pelabuhan dan penggudangan

4.4. Agenda dan Tahap Pembangunan

4.4.1. Empat Agenda (Catur Dharma) Pembangunan Pertanian

Perspektif peningkatan nilai tambah dan dayasaing tidak terlepas dari situasi makro ekonomi dan pembangunan pertanian. Empat Agenda Pembangunan Pertanian penting (Catur Dharma Pembangunan Pertanian) adalah:

Melepaskan Ketergantungan Kepada Beras; Indonesia mempunyai sumberdaya pertanian dan biologi yang sangat kaya. Di masa yang lalu, masyarakat dengan kearifan lokal, telah memanfaatkan sumberdaya tersebut sebagai penopang kehidupan. Salah satu diantaranya adalah keragaman dalam bahan pangan pokok. Orang Maluku sudah terbiasa mengkonsumsi sagu, orang Madura makan jagung, orang Papua makan sagu dan ubi jalar dan sebagian penduduk Jawa makan ubi kayu. Melepaskan ketergantungan pada beras berarti mengurangi beban (biaya) pembangunan sekaligus menjadikan beras sebagai komoditi komersial.

Penghematan dana pembangunan dapat menjadi modal percepatan penangan komoditas lainnya. Tingkat konsumsi beras relatif tinggi, yaitu 139,15 kg/kapita/tahun.

Melepaskan Ketergantungan Pada Gula Pasir; konsumsi gula pasir sudah cukup tinggi dan cenderung meningkat. Di sisi lain dayasaing gula pasir sangat rendah memaksa pemerintah untuk mensubsidi (dari hulu hingga hilir) dan mengimpor gula. Pengurasan devisa dan penyedotan biaya pembangunan yang besar sangat kontras dengan jumlah petani yang terlibat

langsung dengan sektor ini. Negara-negara pengekspor gula umumnya menggantungkan konsumsi dalam negeri mereka terhadap gula lain (non-tebu) dengan pertimbangan tingkat kemanisan dan kesehatan. Diversifikasi produksi dan konsumsi gula dapat mengurangi beban pembangunan sekaligus memperkokoh ketahanan pangan nasional.

Pembangunan Prasarana Pertanian (irigasi dan jalan pertanian); pertanian modern yang dinilai sangat efisien dan kompetitif tidak lain ditdukung dengan infrastruktur yang memadai. Inefisiensi di hulu menjadi penentu keberhasilan di hilir dalam perbaikan dayasaing dan nilai tambah.

Perbaikan Skala Teknis dan Ekonomis Usaha Tani; kesejahteraan petani tidak mungkin dibangun berbasis usaha kecil yang tidak mampu menghasilkan pendapatan yang melebihi kebutuhan dasar. Pertanian yang berdayasaing juga tidak mungkin dibangun berbasis usaha yang tidak memenuhi skala teknis (dan ekonomis). Perluasan pengelolaan (bukan kepemilikan yang akan terfragmentasi lagi) adalah basis pembangunan menuju kesejahteraan petani melalui perbaikan produktivitas, efisiensi dan pendapatan pokok.

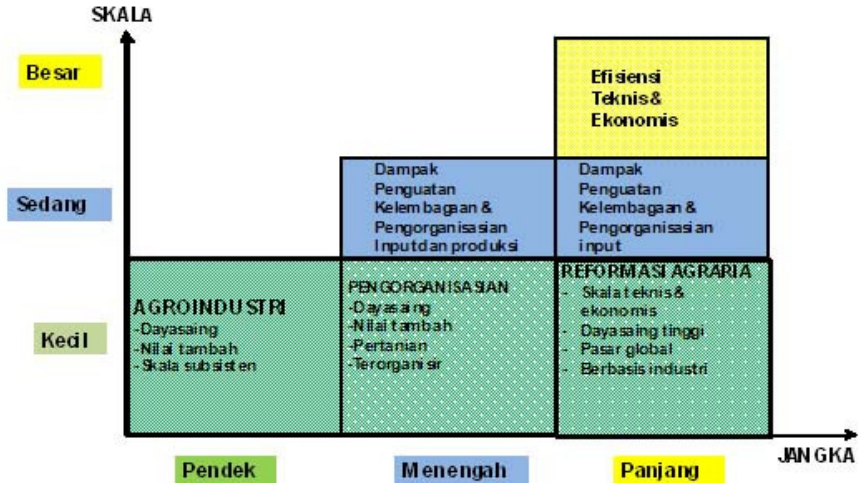
4.4.2. Tiga Tahap (Tri Jangka) Pembangunan Pertanian

Bertolak pada keadaan terkini pertanian nasional, cita-cita luhur tidak mungkin dicapai dalam waktu dekat secara bersamaan. Oleh karena itu, perlu dan harus ada pentahapan pembangunan pertanian. Tiga tahap simultan (Tri Jangka) pembangunan pertanian yakni perbaikan skala teknis dan ekonomis, pengorganisasian petani dan pengembangan industri pedesaan adalah pilihan bijak yang menjadi pijakan program pembangunan pertanian sangat beralasan. Tri Jangka adalah satu kesatuan yang tidak terpisah sehingga berawal pada titik yang sama dengan orientasi dan target yang berbeda (**Gambar 4.1).**

Jangka Panjang; Perbaikan skala teknis dan ekonomis melalui reformasi agraria adalah satu-satunya pilihan menuju masyarakat pertanian yang sejahtera. Reformasi agraria menuntut adanya landasan yang kuat, metode yang tepat serta kalkulasi yang akurat. Perhitungan sederhana dapat dijadikan acuan yakni rata-rata pengelolaan 2 ha/KK petani yang dapat dicapai melalui strategi: (i) ekstensifikasi dan redistribusi lahan, (ii) pengembangan pertanian mandiri berorientasi industri, (iii) pengembangan sektor hilir (pengolahan), dan penataan tataguna lahan. Program jangka panjang ini harus dimulai dari sekarang yang diawali dengan menentukan cara, metode dan target tahunan hingga 25 tahun ke depan.

Jangka Menengah; Pengorganisasian petani dengan skala kecil yang ada dewasa ini adalah pilihan moderat untuk memperbaiki efisiensi sehingga dapat berkontribusi dalam membentuk dayasaing. Falsafah "sapu lidi" yaitu kuat dan teguh dalam kesatuan dapat dijadikan "slogan" pengorganisasian petani. Pengorganisasian atau dalam bahasa yang umum kelembagaan sudah dimulai sejak empat dikade yang lampau masih relevan untuk diteruskan.

Dalam perspektif kelembagaan, organisasi terkecil adalah Kelompok Tani (Poktan) yang dapat dipandang sebagai gugus pertama (primer) dalam satelit pertanian. Beberapa Poktan tani membentuk Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) mempunyai kekuatan yang lebih besar sebagai basis pengembangan industri perdesaan dan dapat dipandang sebagai gugus kedua (sekunder) dari satelit pertanian.

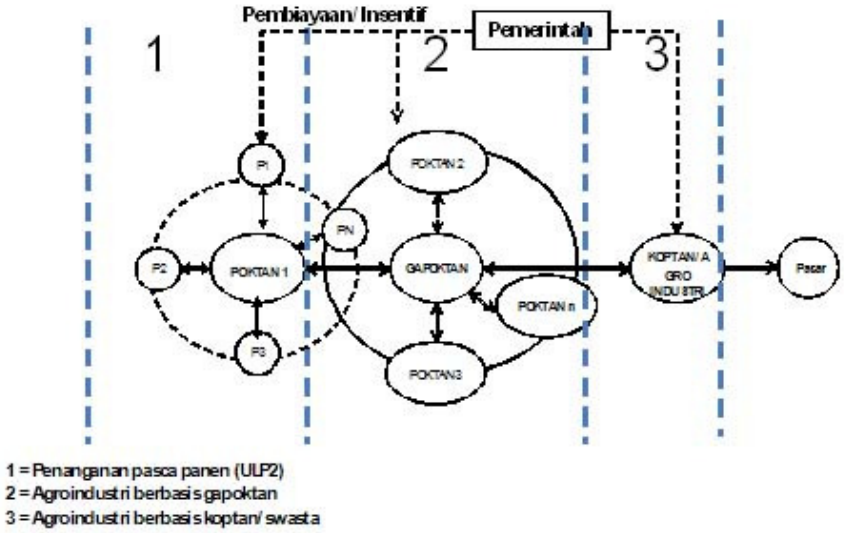


Gambar 4.1. Keterkaitan antara Jangka Pembangunan Pertanian

Gapoktan yang bergabung dapat membentuk kelompok yang lebih besar dan kuat dapat menjadi basis pengembangan industri besar hilir (Gambar 4.2).

Jangka Pendek; pertanian Indonesia, terlepas dari berbagai masalah dan keadaanya, telah menghasilkan produk dalam jumlah besar. Dengan demikian, pengembangan penanganan pasca panen dan pengolahan (agroindustri perdesaan) mempunyai modal dasar yang kuat.

Dalam perspektif pembangunan pertanian, maka pembangunan agroindustri (perdesaan) adalah pilihan yang dapat segera dilakukan. Basis pengembangan dapat dipilih



Gambar 4.2 Gugus Pengorganisasian Petani

menurut situasi dan kondisi nyata di lapangan. Secara umum, basis tersebut adalah Poktan dan Gapoktan atau bahkan Koptan.

5. PROGRAM PENINGKATAN DAYASAING DAN NILAI TAMBAH KOMODITAS

5.1. Tinjauan Umum

Secara khusus program peningkatan dayasaing dan nilai tambah komoditas pertanian difokuskan kepada kegiatan *off farm* melalui program aksi yang berkaitan dengan peningkatan nilai tambah komoditas seperti penanganan pasca panen dan pengolahan primer. Program peningkatan dayasaing dan nilai tambah komoditas tidak bisa berdiri sendiri, tertapi harus terintegrasi dan tidak terpisahkan dengan kegiatan hulu yang berkaitan dengan budidaya pertanian untuk peningkatan produksi dan produktivitas sampai dengan kegiatan hilir yang merupakan program penghela terciptanya peningkatan dayasaing dan nilai tambah.

Program peningkatan dayasaing dan nilai tambah komoditas pertanian terdiri dari program aksi yang secara langsung bersentuhan dengan program penguat yang merupakan prasyarat maupun penghela peningkatan dayasaing dan nilai tambah komoditas. Peningkatan dayasaing dan nilai tambah dapat dicapai dengan syarat bahwa program penguat tersebut ada dan dilaksanakan secara lintas sektoral dengan departemen terkait maupun pemangku kepentingan lainnya seperti asosiasi dan pelaku usaha. Demikian juga dengan strategi insentif untuk mendorong tumbuhnya industri perdesaan harus ada dan dilaksanakan secara terintegrasi dan lintas sektoral.

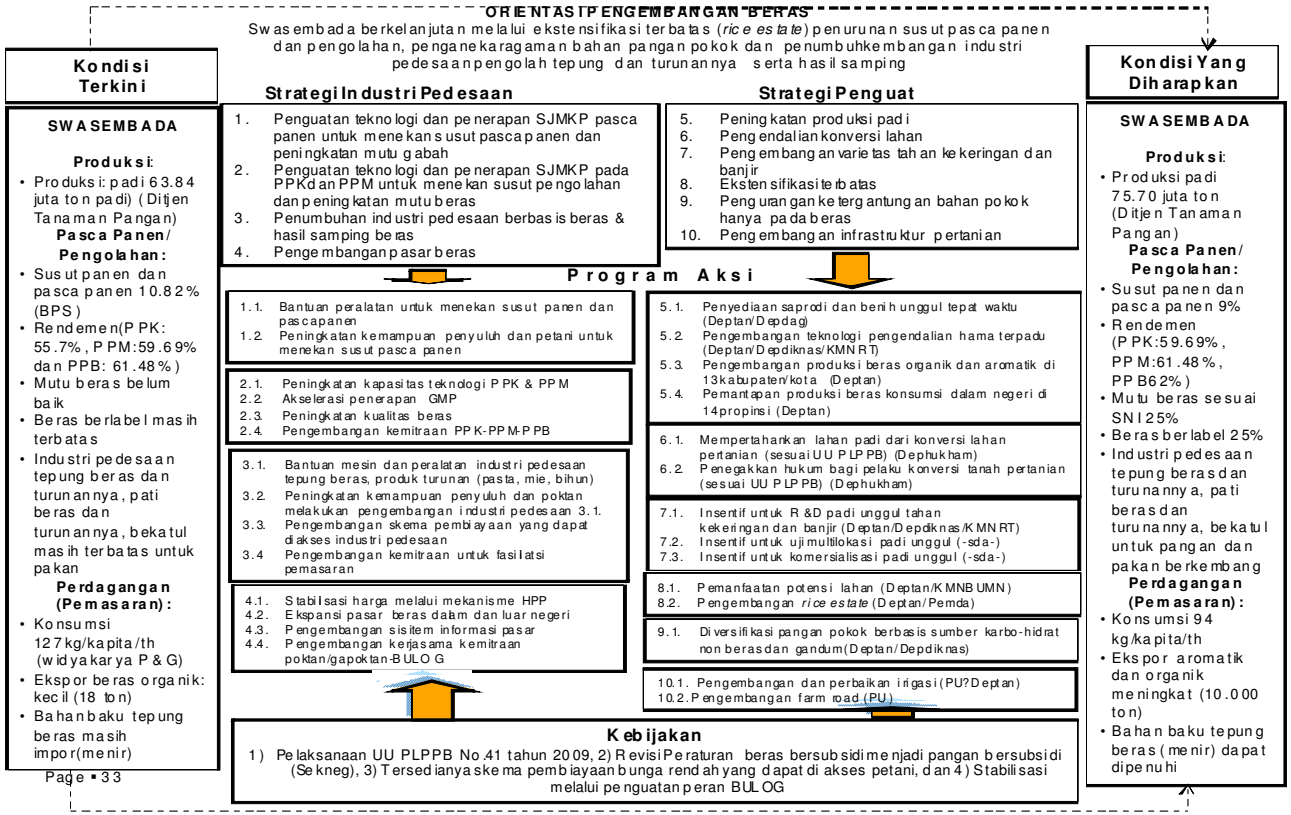
5.2. Program Komoditas

Komoditas yang dipilih sebagai penghela tumbuhnya industri perdesaan disesuaikan dengan komoditias prioritas yang dikelompokkan sebagai komoditas pangan utama yang meliputi beras, jagung, kedelai, daging sapi.

Komoditas andalan ekspor yang meliputi sawit, karet, kakao dan daging ayam. Kelompok *emerging products* yang mempunyai peluang pasar yang luas baik internasional maupun domestik seperti buah tropika (mangga, manggis, salak dan pisang), produk biofarmaka, tanaman hias daun dan minyak atsiri Kelompok produk yang diarahkan untuk substitusi impor seperti susu, tepung lokal (cassava dan sagu) serta jeruk. Pemilihan jenis komoditas ini diharapkan dapat mewakili dari kelompok komoditi yang ada, mempunyai potensi untuk peningkatan dayasaing dan nilai tambah yang tinggi serta mempunyai *multiplier effect* yang luas terhadap peningkatan industri perdesaan.

Program peningkatan dayasaing dan nilai tambah komoditas dijabarkan secara terpisah dengan mengacu pada konsep peningkatan daya siang dan nilai tambah dengan mempertimbangkan kondisi terkini dan permasalahan, kondisi yang diharapkan, strategi pengembangan berdasarkan analisis SWOT (Lampiran), program aksi, rencana implementasi program aksi serta sasaran program aksi untuk masing-masing komoditas.

5.2.1. Beras



Gambar 5.1. Strategi Pengembangan Industri Perdesaan Beras

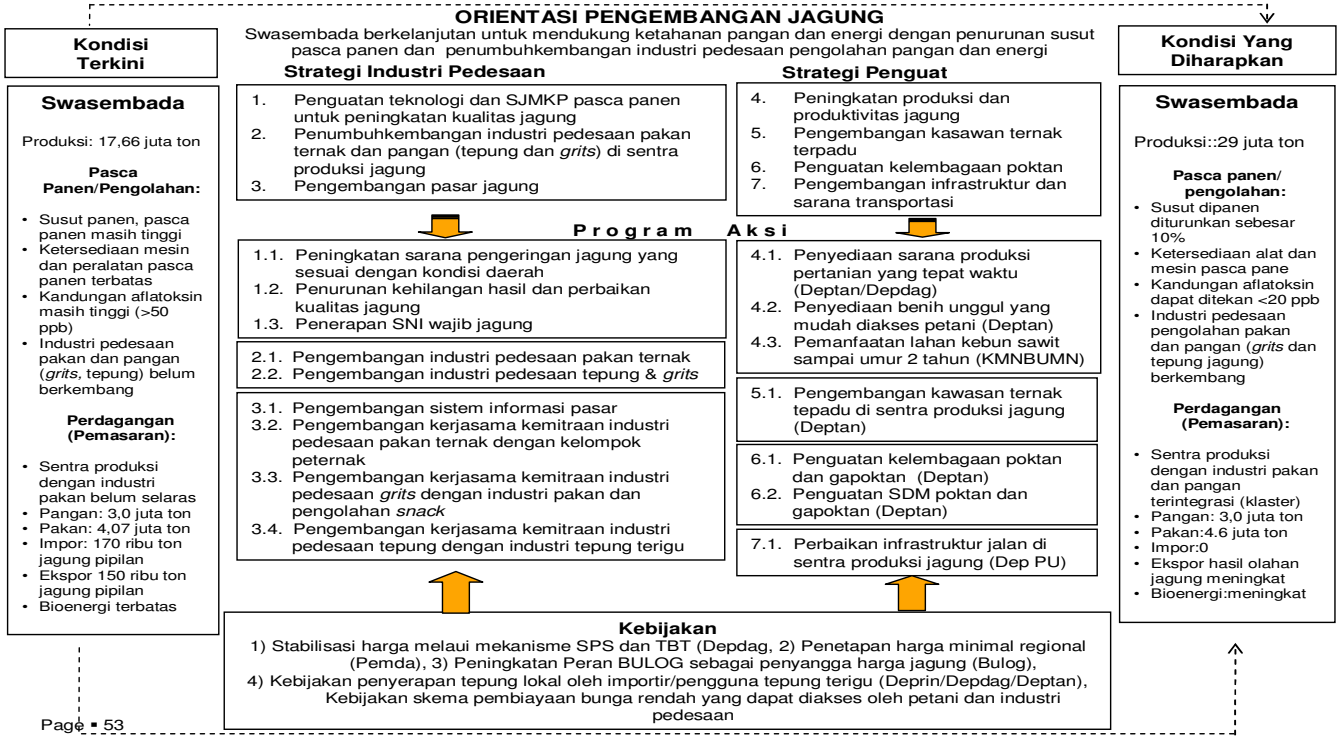
Tabel 5.1. Program Aksi, Rencana Implementasi dan Sasaran Pengembangan Industri Perdesaan Beras

Program Aksi dan Rencana Implementasi	Sasaran tahunan					Keterangan
	2010	2011	2012	2013	2014	
1.1. Bantuan peralatan untuk menekan susut panen dan pasca panen • Penyusunan mekanisme pemberian bantuan • Penentuan kelompok tani penerima • Realisasi bantuan • Pendampingan	10.42	10.02	9.62	9.32	9.00	Persen susut panen dan pasca
1.2. Peningkatan kemampuan penyuluh dan petani untuk menekan susut pasca panen • Pelatihan TOT untuk penyuluh pertanian spesialis (panen, pasca panen dan pengolahan) • Pelatihan untuk peningkatan kemampuan petani menangani panen, pasca panen	10.42	10.02	9.62	9.32	9.00	Persen susut panen dan pasca
2.1. Peningkatan kapasitas teknologi PPK & PPM • Identifikasi kekeurangan peralatan • Penetapan bantuan untuk penguatan • Realisasi bantuan • Pendampingan	15	35	100	125	150	Unit usaha poktan
2.2 Akselerasi penerapan GMP • Penyusunan buku pedoman GHP dan GMP yang mudah dipahami • Sosialisasi GHP dan GMP ke penyuluh/tenaga pendamping • Sosialisasi ke Kelompok tani dan pelaku penggilingan beras	50	75	100	100	100	% poktan di 14 prop. sentra produksi dan 14 kab.kota poktan penghasil *speciality rice*

• Peningkatan kualitas beras • Sosialisasi standar mutu beras organik dan aromatik • Sertifikasi beras organik dan beras aromatik		5	10	15	20	25	Kumulatif % beras sesuai SNI
2.3	**Pengembangan kemitraan PPK-PPM-PPB** • Penyusunan model kemitraan • Sosialisasi kepada pelaku usaha • Pengembangan model kemitraan di Jawa Timur dan Jawa Barat	10	40	100	130	150	Kumulatif jumlah poktan yang terlibat
3.1.	**Bantuan mesin dan peralatan industri perdesaan tepung beras, produk turunan (pasta, mie, bihun)** • Identifikasi mesin yang diperlukan • Penyusunan mekanisme pemberian bantuan • Penentuan kelompok tani penerima • Realisasi bantuan • Pendampingan	10	20	50	20	10	Unit usaha (poktan/ gapoktan)
3.2.	**Peningkatan kemampuan penyuluh dan poktan melakukan pengembangan industri perdesaan tepung beras, produk turunan (pasta, mie, bihun)** • Pelatihan TOT untuk penyuluh pertanian spesialis (panen, pasca panen dan pengolahan) • Pelatihan untuk peningkatan kemampuan petani menangani panen dan pasca panen	5%	25%	65%	90%	100 %	Kumulatif % penyuluh dan tenaga pendamping
3.3.	**Pengembangan kemitraan untuk fasilitasi pemasaran** • Menetapkan faktor dan ketentuan kerjasama • Menguatkan faktor kerjasama • Mengawasi faktor kerjasama •	25	55	100	125	150	Kumulatif jumlah poktan yang terlibat

4.1. Stabilisasi harga melalui mekanisme HPP • Pemantatapan jaminan BULOG untuk pembelian gabah/beras melalui jalur HPP dan jalur komersial • Penetapan HPP tepat waktu • Kebijakan ekspor tepat waktu	10%	10%	10%	10%	10%	Pengadaan BULOG (% x jumlah produksi)
4.2. Ekspansi pasar beras dalam dan luar negeri • Pameran dalam dan luar negeri	2	5	5	5	5	Jumlah pameran yang diikuti
4.3. Pengembangan sisitem informasi pasar • Peningkatan kemampuan poktan untuk akses informasi pasar	10	20	50	75	100	% Jumlah poktan di sentra produksi
4.4. Pengembangan kerjasama kemitraan poktan/gapoktan-BULOG • Menetapkan faktor dan ketentuan kerjasama • Menguatkan faktor kerjasama • Mengawasi faktor kerjasama	10	40	75	100	150	Jumlah poktan terlibat

5.2.2. Jagung



Gambar 5.2. Strategi Pengembangan Industri Perdesaan Jagung

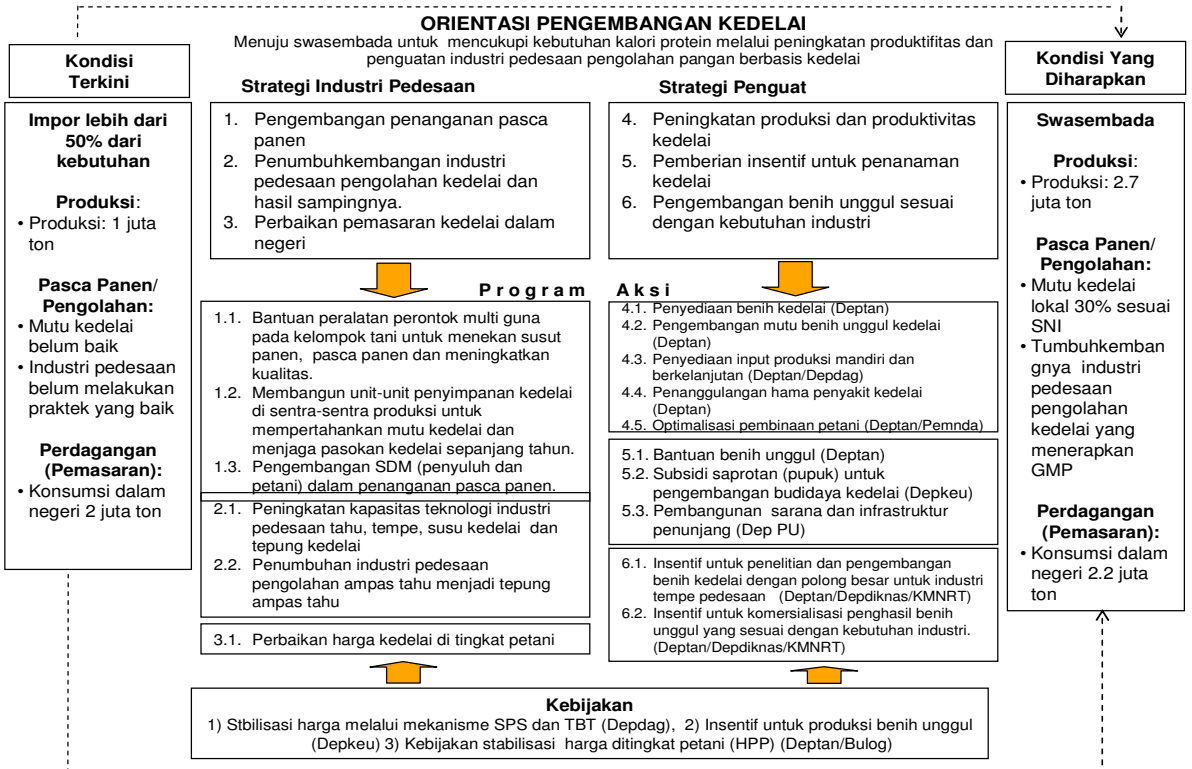
Tabel 5.2. Program Aksi, Rencana Implementasi dan Sasaran Pengembangan Industri Perdesaan Jagung

Program Aksi dan Rencana Implementasi	Sasaran tahunan					Keterangan
	2010	2011	2012	2013	2014	
1.1. Peningkatan sarana pengeringan jagung yang sesuai dengan kondisi daerah • Revitalisasi silo jagung (14 unit) di Musi Banyuasin, Lombok Tengah, Tanah laut, Bulukumba, Taklar, Maros, Soppeng, Sinjai, Bone, Pinrag, jeneponto, Tojo Una-una, Pahuwato, Bolmong • Pembangunan silo jagung yang terintegrasi dengan unit pengering dengan bahan bakar hibrid biomassa (30 unit/tahun) di sentra produksi jagung • Pelatihan dan pendampingan poktan untuk peningkatan kemampuan dalam bidang panen dan pascapanen	30	30	30	30	30	Unit silo/tahun
1.2. Penurunan kehilangan hasil dan perbaikan kualitas jagung • Fasilitasi peralatan penanganan pasca panen jagung kepada gapoktan • Pelatihan dan pendampingan penanganan pasca panen jagung • Penerapan manajemen mutu sehingga produk yang dihasilkan sesuai persyaratan mutu pasar, melalui pelatihan dan penyuluhan yang intensif tentang manajemen mutu	2.4	2.2	2.0	1.8	1.7	% kehilangan hasil

1.3. Penerapan SNI wajib jagung • Sosialisasi penerapan SNI jagung	30	40	60	80	100	Persentase wajib SNI
2.1. Pengembangan industri perdesaan pakan ternak • Penetapan gapoktan untuk mendukung industri perdesaan pakan ternak • Mendorong tumbuhnya kawasan peternakan terpadu secara lintas sekoral • Pemberian bantuan peralatan pengolahan pakan ternak • Pelatihan dan pendampingan	2	4	8	10	12	Kumulatif industri perdesaan pakan ternak
2.2. Pengembangan industri perdesaan tepung dan *grits* • Penetapan gapoktan untuk mendukung industri perdesaan tepung dan *grits* • Pemberian bantuan peralatan untuk pengolahan grits dan tepung • Pelatihan dan pendampingan	4	8	12	16	20	Kumulatif industri perdesaan *grits* dan tepung jagung
3.1. Pengembangan sistem informasi pasar • Penyusunan database jagung • Penguatan kemampuan poktan/gapoktan melakukan akses informasi pasar	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ketersediaan informasi pasar
3.2. Pengembangan kerjasama kemitraan industri perdesaan pakan ternak dengan kelompok peternak	10	30	75	100	125	Kumulatif poktan yang terlibat

• Fasilitasi Kerjasama antar gapoktan sentra produksi jagung utama (Jatim, Sumut, Lampung, Jabar, Jateng, NTT, Sulsel, Sulut dan Gorontalo) • Fasilitasi kemitraan saling menguntungkan antara Gapoktan dan industri hilir berbahan baku jagung						
3.3. Pengembangan kerjasama kemitraan industri perdesaan *grits* dengan industri pakan dan pengolahan *snack* • Fasilitasi penyusunan badan hukum gapoktan untuk kemitraan bisnis jagung • Fasilitasi kemitraan saling menguntungkan antara Gapoktan dan industri hilir berbahan baku jagung	10	30	75	100	125	Kumulatif poktan yang terlibat
3.4. Pengembangan kerjasama kemitraan industri perdesaan tepung dengan industri tepung terigu • Keringanan pajak bagi industri pengolahan hilir jagung yang beorientasi substitusi imporPemberian kredit dengan suku bunga rendah kepada industri jagung.	10	30	75	100	125	Kumulatif poktan yang terlibat

5.2.3. Kedelai



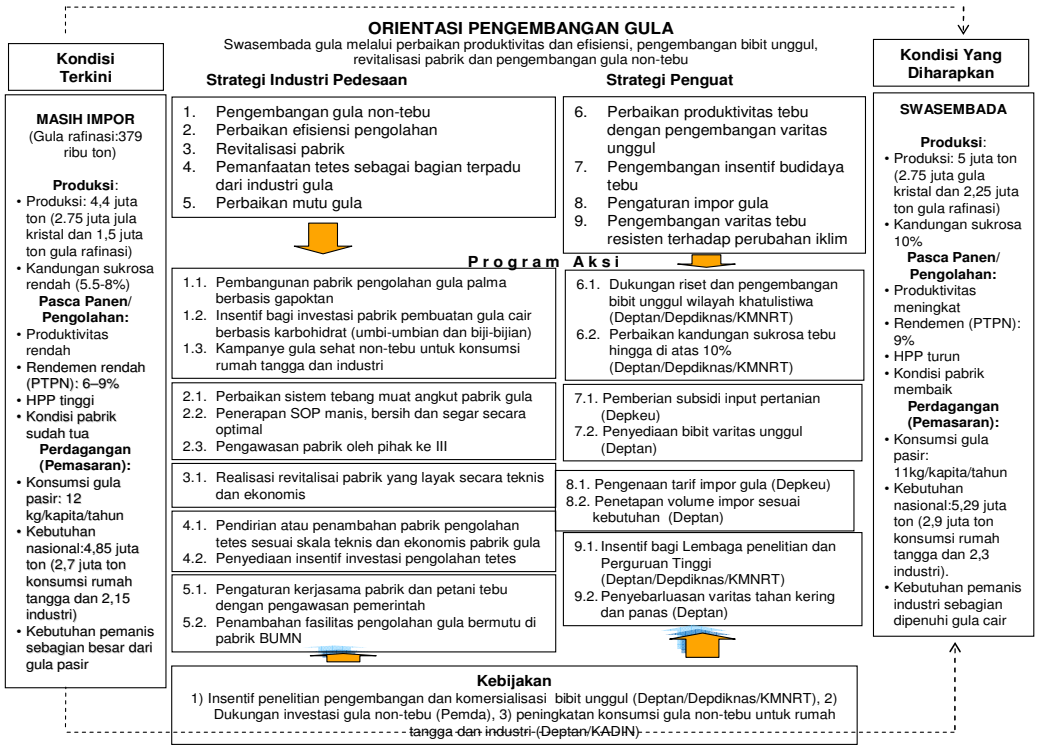
Gambar 5.3. Strategi Pengembangan Industri Perdesaan Kedelai

Tabel 5.3. Program Aksi, Rencana Implementasi dan Sasaran Pengembangan Industri Perdesaan Kedelai

Program Aksi dan Rencana Implementasi	Sasaran tahunan					Keterangan
	2010	2011	2012	2013	2014	
1.1. Bantuan peralatan perontok multi guna pada kelompok tani untuk menekan susut panen, pasca panen dan meningkatkan kualitas • Identifikasi peralatan yang dibutuhkan • Penyusunan mekanisme pemberian bantuan • Penentuan poktan penerima • Realisasi bantuan • Pendampingan	5	10	20	25	30	Kumulatif % poktan kedelai
1.2. Membangun unit-unit penyimpanan kedelai di sentra-sentra produksi untuk mempertahankan mutu kedelai. • Penetapan kapasitas unti penyimpanan yang dibutuhkan • Realisasi bantuan • Pendampingan	1	2	3	2	1	Unit
1.3. Pengembangan SDM (penyuluh dan petani) dalam penanganan pasca panen • Penyuluhan TOT untuk penyuluh dan pendamping • Penyuluhan pada poktan	5	15	30	40	50	Kumulatif % jml penyuluh &pendamping

2.1. **Peningkatan kapasitas teknologi industri perdesaan tahu, tempe, susu kedelai dan tepung kedelai** • Identifikasi kondisi terkini industri perdesaan pengolah kedelai • Penetapan bantuan untuk penguatan • Realisasi bantuan • Pendampingan	5	15	25	35	40	Kumulatif unit usaha
2.2.**Penumbuhan industri perdesaan pengolahan ampas tahu menjadi tepung ampas tahu** • Pelatihan pengolahan hasil samping pengolahan kedelai • Bantuan peralatan pengolahan hasil samping kedelai • Pengembangan kemitraan pemasaran	5	15	25	35	40	Unit usaha
3.1. **Perbaikan harga kedelai di tingkat petani** • Penetapan HPP yang merangsang petani menanam kedelai • Pengembangan kemitraan antara kelompok tani dengan industri pengguna kedelai	1	3	10	15	20	Kumulatif Jumlah kerjasama

5.2.4. Gula



Gambar 6. 4. Strategi Pengembangan Industri Perdesaan Gula

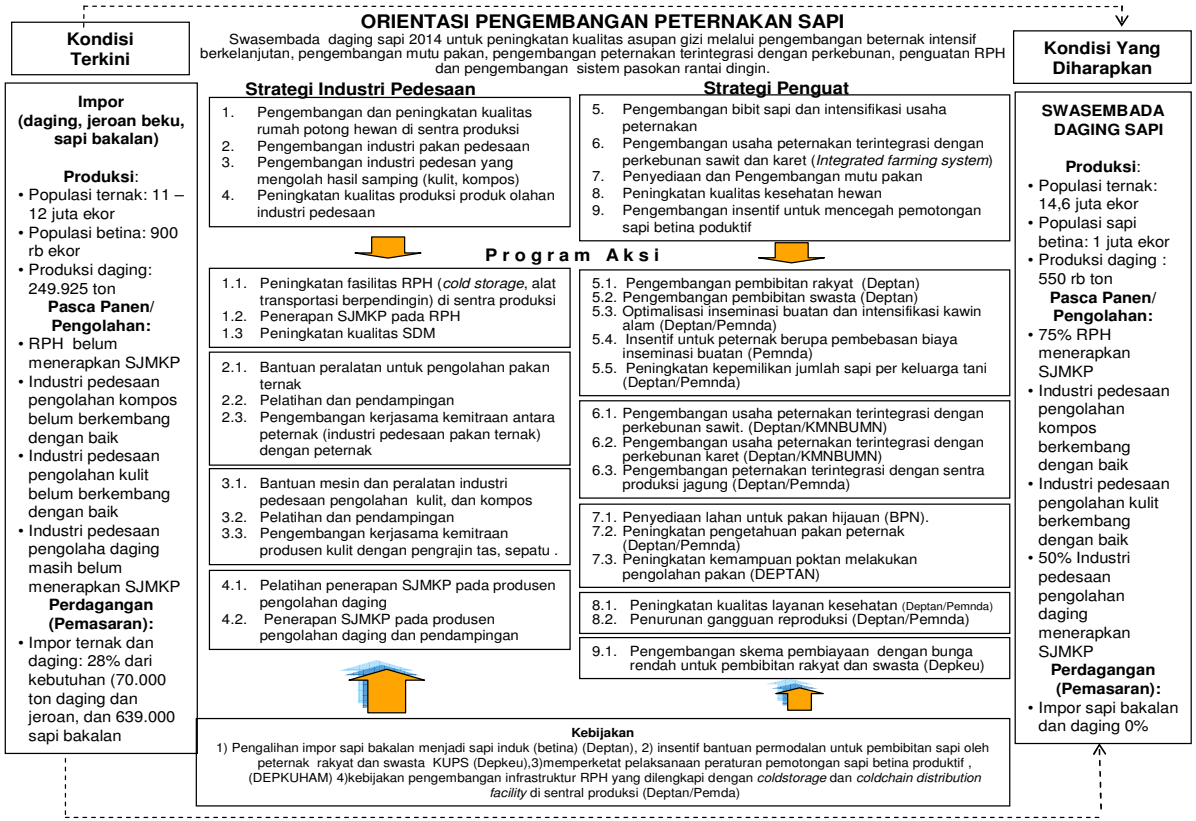
Tabel 5.4. Program Aksi, Rencana Implementasi dan Sasaran Pengembangan Industri Perdesaan Gula

Program Aksi dan Rencana Implementasi	Sasaran tahunan					Keterangan
	2010	2011	2012	2013	2014	
1.1. Pembangunan pabrik pengolahan gula palma berbasis gapoktan • Bantuan sarana produksi dan modal awal industri kecil gula palma berbasis gabungan kelompok tani • Pendampingan teknologi dan pengembangan pasar	3	5	5	5	5	Pabrik/ tahun
1.2. Insentif bagi investasi pabrik pembuatan gula cair berbasis karbohidrat (umbi-umbian dan biji-bijian) • Penguatan petani penghasil bahan baku • Insentif harga beli bahan baku produksi petani • Pembebasan pajak dalam masa produksi awal	2	2	2	2	2	Pabrik/ tahun
1.3. Kampanye gula sehat non-tebu untuk konsumsi rumah tangga dan industri • Penyiapan brosur dan leaflet yang memuat konsumsi gula sehat • Talk show di media TV dan Radio • Penayangan iklan gula sehat non-tebu	50	75	100	100	100	Jam tayang kampanye/ iklan dalam Televisi
2.1. Perbaikan sistem tebang muat angkut pabrik gula • Perbaikan jadwal terpadu rencana tanam dan giling • Pelatihan tebang, muat dan angkut bersama pabrik gula • Monitoring dan pengawasan tebang muat angkut	4	4	4	4	4	Pabrik gula/tahun

2.2. Penerapan SOP manis, bersih dan segar secara optimal • Penguatan insentif dan punishment pelaksanaan MBS (manis, bersih, segar) • Penyuluhan dan pengawasan pelaksanaan MBS	5	5	5	5	5	Pabrik gula/tahun
2.3. Pengawasan pabrik oleh pihak ke III • Pembentukan Tim Pengawas • Perbaikan proses dan efisiensi produksi	5	5	5	5	5	Pabrik gula/tahun
3.1. Realisasi revitalisai pabrik yang layak secara teknis dan ekonomis • Penetapan pabrik layak revitalisasi • Pelaksanaan dan pengawasan revitalisasi	3	3	3	3	3	Pabrik gula/tahun
4.1.Pendirian atau penambahan pabrik pengolahan tetes sesuai skala teknis dan ekonomis pabrik gula • Penetapan bentuk, skala dan lokasi indutri pengolahan tetes • Dukungan kebijakan industri pengolahan tetes	1	1	1	1	1	Pabrik pengolah tetes/tahun
4.2. Penyediaan insentif investasi pengolahan tetes • Bantuan penyediaan dana persiapan pendirian industri • Dukungan kebijakan	1	1	1	1	1	Pabrik pengolah tetes/tahun

5.1.Pengaturan kerjasama pabrik dan petani tebu dengan pengawasan pemerintah • Dukungan pembiayaan kelompok tani tebu • Pengawasan kesepakan dan bantuan sarana produksi tebu	5	5	5	5	5	Pabrik gula/tahun
5.2.Penambahan fasilitas pengolahan gula bermutu di pabrik BUMN • Penetapan fasilitas perbaikan mutu pabrik gula • Insentif dalam pengadaan fasilitas baru	3	3	3	3	3	Pabrik gula/tahun

5.2.5. Daging Sapi



Gambar 5.5. Strategi Pengembangan Industri Perdesaan Daging Sapi

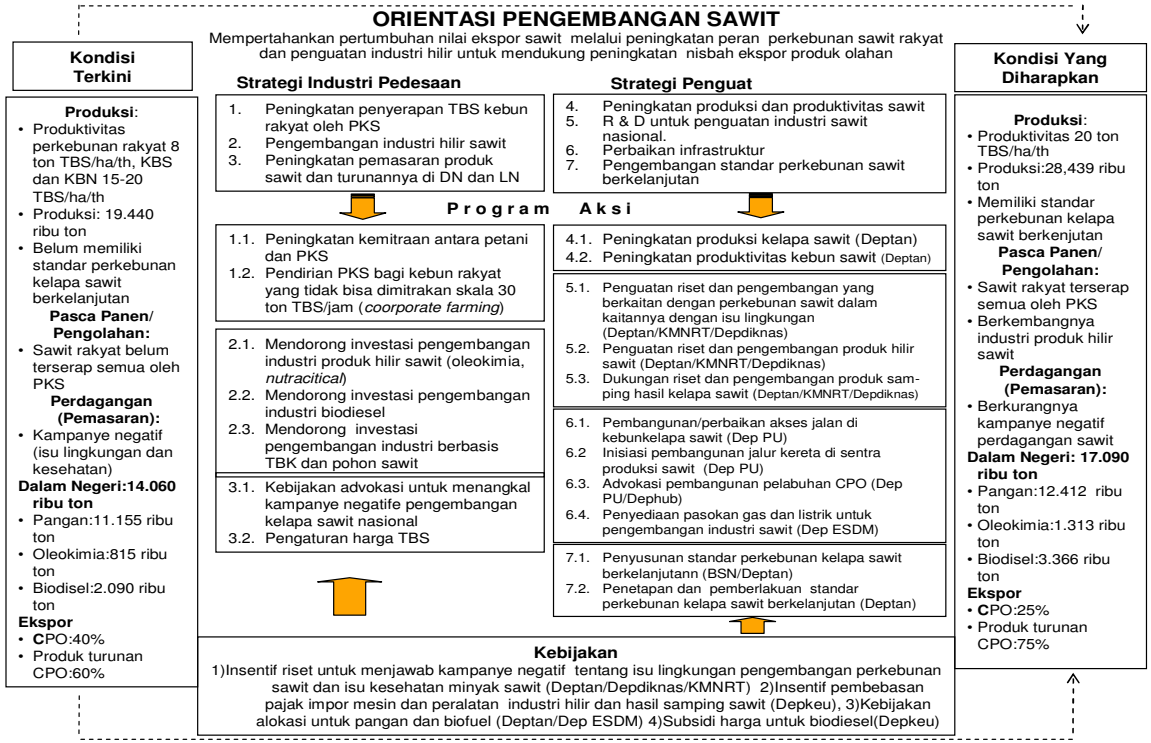
Tabel 5.5. Program Aksi, Rencana Implementasi dan Sasaran Pengembangan Industri Perdesaan Daging Sapi

Program Aksi dan Rencana Implementasi	Sasaran tahunan					Keterangan
	2010	2011	2012	2013	2014	
1.1. Peningkatan fasilitas RPH (*cold storage*, alat transportasi berpendingin) di sentra produksi • Identifikasi kekurangan fasilitas RPH • Penguatan fasilitas	-	1	3	5	5	Kumulatif sentra produksi
1.2. Penerapan SJMKP pada RPH • Sosialisasi SJMKP • Pendampingan penerapan SJMKP	5	20	40	60	80	Kumulatif RPH yang menerapkan SJMKP
1.3. Peningkatan kualitas SDM • Pelatihan manajemen pengelolaan RPH • Pelatuhan SJMKP	20	40	100	160	200	Jumlah SDM terlatih/ tahun
2.1. Bantuan peralatan untuk pengolahan pakan ternak • Identifikasi kebutuhan peralatan • Penyusunan mekanisme pemberian bantuan • Penentuan kelompok tani penerima • Realisasi bantuan • Pendampingan	3	8	15	20	25	Poktan (unit usaha)/th

2.2. Pelatihan dan pendampingan • Pelatihan produksi dan manajemen pengelolaan industri perdesaan pakan ternak • Pendampingan operasionalisasi industri perdesaan pakan ternak.	20	40	100	160	200	SDM terlatih/ tahun
2.3.Pengembangan kerjasama kemitraan antara peternak (industri perdesaan pakan ternak dengan peternak • Menetapkan faktor dan ketentuan kerjasama • Menguatkan faktor kerjasama • Mengawasi faktor kerjasama	10	30	50	100	125	Kumulatif poktan terlibat
3.1.Bantuan mesin dan peralatan industri perdesaan pengolahan kulit, dan kompos • Identifikasi kebutuhan peralatan • Penyusunan mekanisme pemberian bantuan • Penentuan kelompok tani penerima • Realisasi bantuan • Pendampingan	5	10	20	40	50	Unit (poktan)
3.2. Pelatihan dan pendampingan • Pelatihan produksi dan manajemen pengelolaan industri perdesaan pakan ternak • Pendampingan	20	40	100	160	200	SDM terlatih/ tahun

3.3. Pengembangan kerjasama kemitraan produsen kulit dengan pengrajin tas, sepatu • Menetapkan faktor dan ketentuan kerjasama • Menguatkan faktor kerjasama • Mengawasi faktor kerjasama	10	30	50	100	125	Kumulatif poktan terlibat
4.1. Pelatihan penerapan SJMKP pada produsen pengolahan daging • Pelatihan SJMKP (GMP, SSOP dan HACCP) pada pelaku usaha industri perdesaan pengolaha daging	20	40	100	160	200	SDM terlatih/tahun
4.2 Penerapan SJMKP pada produsen pengolahan daging dan pendampingan	5	15	25	50	75	Unit usaha menerapkan SJMKP

5.2.6. Sawit



Gambar 5.6. Strategi Pengembangan Industri Perdesaan Sawit

Tabel 5.6. Program Aksi, Rencana Implementasi dan Rasaran Pengembangan Industri Perdesaan Sawit

Program Aksi dan Rencana Implementasi	Sasaran tahunan					Keterangan
	2010	2011	2012	2013	2014	
1.1. Peningkatan kemitraan antara petani dan PKS • Penyusunan model kemitraan • Sosialisasi kepada pelaku usaha • Pengembangan contoh model kemitraan di Sumut, Riau, Sumsel, Kalsel, Kalteng, Kaltim dan Papua	60	70	80	90	100	Persentase penyerapan TBS dari kebun rakyat oleh PKS
1.2.Pendirian PKS bagi kebun rakyat yang tidak bisa dimitrakan skala 30 ton TBS/jam (*coorporate farming*) • Pendirian PKS dengan kapasitas minimal 30 ton TBS/jam	60	70	80	90	100	Persentase penyerapan TBS dari kebun rakyat oleh PKS
2.1.Mendorong investasi pengembangan industri produk hilir sawit (oleokimia, *nutracitical*) • Insentif pajak bagi industri hilir sawit • Kebijakan tarif bea keluar	-	-	1	-	1	Pertambahan industri hilir produk sawit
2.2.Mendorong investasi pengembangan industri biodiesel • Insentif jaminan pasar produk biodiesel • Insentif harga untuk subsidi di tingkat konsumen • Insentif pajak untuk peralatan produksi	-	1	-	1	-	Pertambahan industri biodiesel

2.3. Mendorong investasi pengembangan industri berbasis TBK dan pohon sawit • Insentif pembiayaan untuk pengembangan industri berbasis TBK dan pohon sawit	-	1	-	1	-	Pertambahan industri hasil samping sawit
3.1. Kebijakan advokasi untuk menangkal kampanye negatife pengembangan kelapa sawit nasional • Penguatan dukungan riset hulu dan hilir kelapa sawit • Peningkatan intensitas counter negative campaign melalui media cetak dan website • Temu bisnis dengan importir CPO	2	2	2	2	2	Kegiatan kampanye sawit melalui seminar atau temu bisnis
3.2. Pengaturan harga TBS	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Penetapan harga TBS

5.2.7. Karet



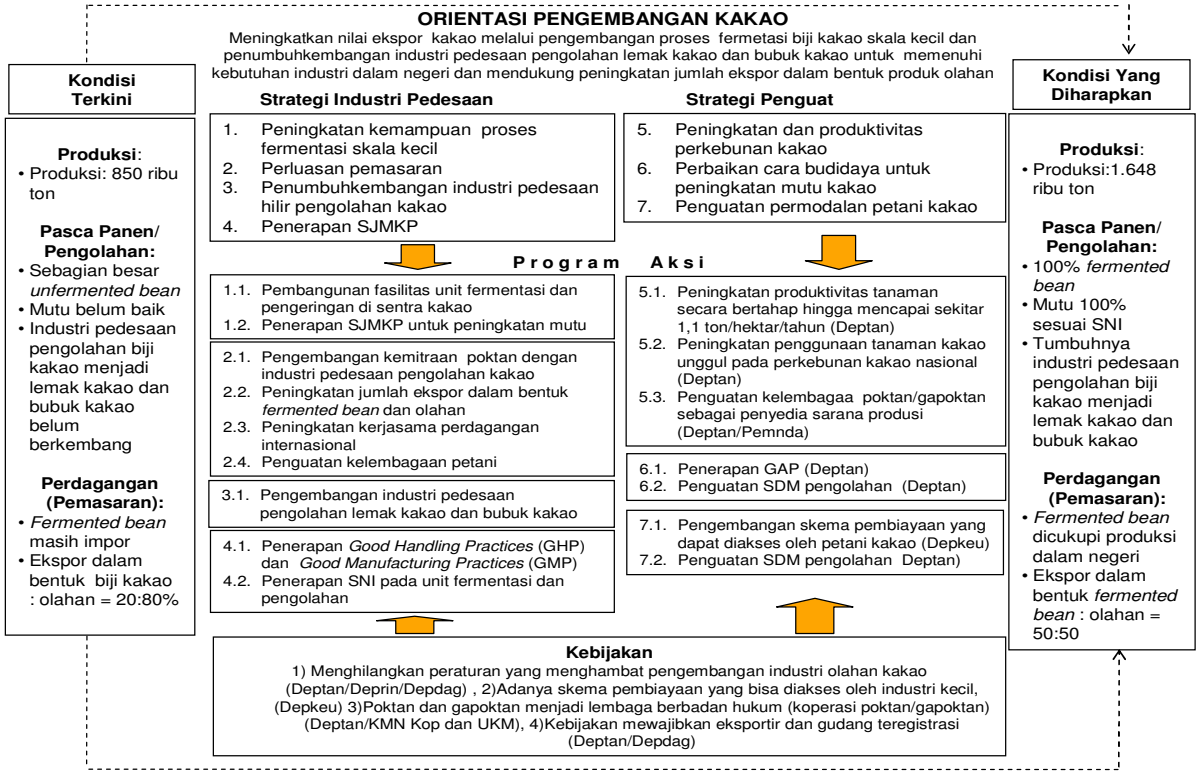
Gambar 5.7. Strategi Pengembangan Industri Perdesaan Karet

Tabel 5.7. Program Aksi, Rencana Implementasi dan Sasaran Pengembangan Industri Perdesaan Karet

Program Aksi dan Rencana Implementasi	Sasaran tahunan					Keterangan
	2010	2011	2012	2013	2014	
1.1. Penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP) • Sosialisasi pedoman GAP	30	40	50	60	70	Persentase wajib standar SNI
1.3. Penerapan Good Manufacturing Practices (GMP)pada industri karet • Sosialisasi pedoman GMP	30	40	50	60	70	Persentase wajib standar SNI
1.3. Standarisasi mutu produk • Sertifikasi dan apresiasi mutu produk karet dan produk olahannya • Penerapan dan pengawasan SNI bokar dan SNI ban • Penerapan standar mutu produk karet olahan selain ban sesuai SNI	30	40	50	60	70	Persentase wajib standar SNI
1.4. Peningkatan kemampuan poktan mengolah sheet • Pelatihan/magang poktan dalam pengolahan sheet karet • Pendampingan teknologi pengolahan karet	30	40	50	60	70	Persentase wajib standar SNI

2.1. Peningkatan keterampilan, teknis, keahlian dan manajemen usaha • Pelatihan/magang pelaku usaha di bidang budidaya, produksi karet, serta pengolahan karet menjadi produk turunannya • Peningkatan kemampuan SDM petani/pengolah karet dalam melaksanakan GAP dan akuisisi teknologi serta berorientasi pada mutu • Peningkatan peran balai penelitian dalam transfer teknologi pasca panen maupun pengembangan industri olahan karet • Pengembangan kelembagaan koperasi petani	10	10	10	10	10	Program penguatan kelembagaan petani dan kemitraan (kegiatan/th)
2.2. Penguatan kelembagaan asosiasi usaha komoditas karet • Pelatihan kemampuan manajerial pengurus asosiasi usaha komoditas karet	10	10	10	10	10	Program penguatan kelembagaan petani dan kemitraan (kegiatan/th)
3.1. Peningkatan ekspor komoditas dan produk karet alam • Membangun dan mempromosikan merk lokal di pasar internasional • Bilateral agreement dengan pasar utama produk untuk meningkatkan pasar ekspor • Pengembangan pasar ekspor	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	Peningkatan pertumbuhan ekspor (juta ton/th)

5.2.8. Kakao



Gambar 5.8. Strategi Pengembangan Industri Perdesaan Kakao

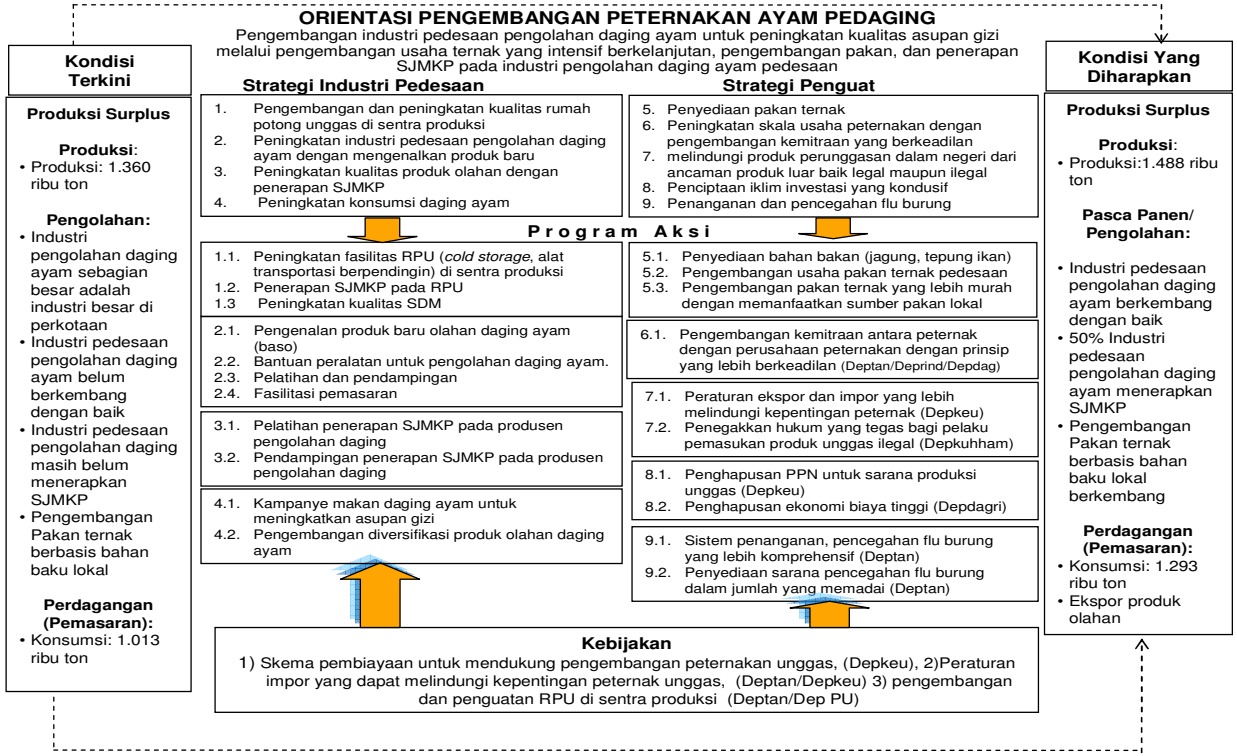
Tabel 5.8. Program Aksi, Rencana Implementasi dan Sasaran Pengembangan Industri Perdesaan Kakao

Program Aksi dan Rencana Implementasi	Sasaran tahunan					Keterangan
	2010	2011	2012	2013	2014	
1.1. Pembangunan fasilitas unit fermentasi dan pengeringan di sentra kakao • Penentuan sentra produksi sasmentasi • Pembangunan fasilitas unit fermentasi • Palatihan dan pendampingan	15	35	70	90	100	Kumulatif persentase kakao terfermentasi (%)
1.2. Penerapan SJMKP untuk peningkatan mutu • Pelatihan SJMKP • Pendampingan penerapan SJMKP	10	25	60	80	100	Kumulatif persentase poktan yang menerapkan SJMKP
2.1. Pengembangan kemitraan poktan dengan industri perdesaan pengolahan kakao • Menetapkan faktor dan ketentuan kerjasama • Menguatkan faktor kerjasama • Mengawasi faktor kerjasama	25	60	100	130	150	Kumulatif jumlah poktan yang terlibat
2.2. Peningkatan jumlah ekspor dalam bentuk *fermented bean* dan olahan internasional • Peningkatkan jaringan pemasaran • Peningkatkan mutu dan pengembangan merk Indonesia di pasar internasional • Peningkatkan promosi ekspor dan fasilitasi perdagangan	10	10	10	10	10	Persentase peningkatan volume ekspor *fermented bean* dan olahan

• Peningkatkan akses pasar ekspor dan dalam negeri • Peningkatan mutu biji kakao yang dijual petani dari unfermented bean menjadi fermented bean • Pengembangan riset dan teknologi untuk produk kakao olahan pangan dan non pangan						
2.3. Peningkatan kerjasama perdagangan • Penyelenggaraan seminar/lokakarya/konferensi dan pameran produk kakao dan olahannya di tingkat internasional	5	15	30	45	50	Kumulatif kerjasama perdagangan antar negara
2.4. Penguatan kelembagaan petani	25	60	100	130	150	Kumulatif jumlah poktan/gapoktan yang berhasil melakukan kerjasama perdagangan

3.1. Pengembangan industri perdesaan pengolahan lemak kakao dan bubuk kakao • Penyediaan enegji alternatif untuk efisiensi produksi pada industri kecil kakao olahan • Modifikasi teknologi pengolahan dan produksi kakao olahan • Penumbuhkembangan industri pengolahan biji kakao skala kecil di perdesaan • Pelatihan pelaku usaha di bidang pengolahan kakao dan produk turunannya	5	15	40	55	65	Jumlah industri perdesaan pengolahan lemak kakao dan bubuk kakao
4.1. Penerapan *Good Handling Practices* (GHP) dan *Good Manufacturing Practices* (GMP) • Sosialisasi pedoman GHP dan GMP • Pelatihan dan pendampingan	20	40	80	120	140	Jumlah unit pengolahan yang menerapkan GHP dan GMP
4.2. Penerapan SNI pada unit fermentasi dan pengolahan	10	30	60	80	100	Persentase kumulatif jumlah unit fermentasi dan pengolahan yang menerapkan SNI

5.2.9. Ayam Pedaging



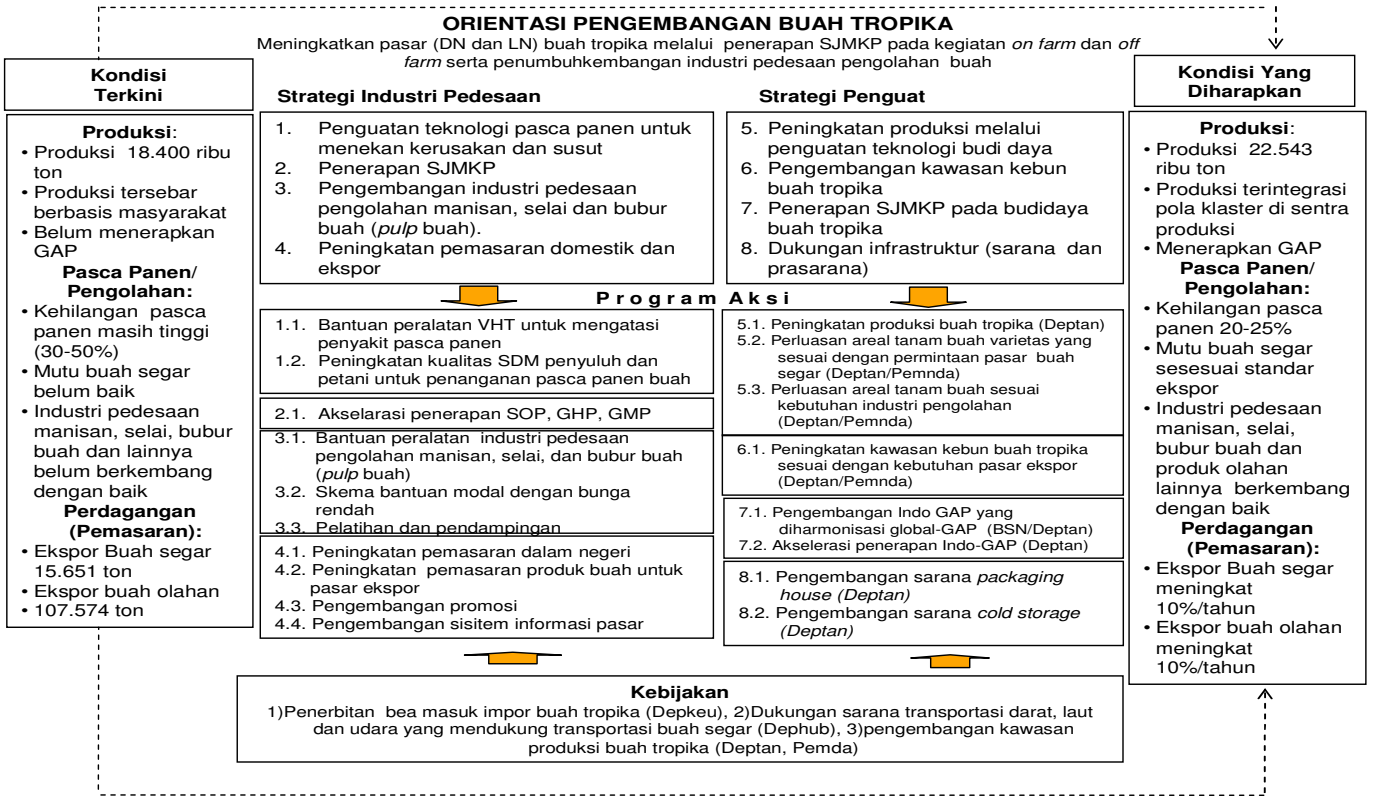
Gambar 5.9. Strategi Pengembangan Industri Perdesaan Ayam Pedaging

Tabel 5.9. Program Aksi, Rencana Implementasi dan Sasaran Pengembangan Industri Perdesaan Ayam Pedaging

Program Aksi dan Rencana Implementasi	Sasaran tahunan					Keterangan
	2010	2011	2012	2013	2014	
1.1.Peningkatan fasilitas RPU (*cold storage*, alat transportasi berpendingin) di sentra produksi • Identifikasi kekurangan fasilitas RPH • Penguatan fasilitas	2	7	10	15	20	RPU
1.2. Penerapan SJMKP pada RPU • Sosialisasi SJMKP • Pendampingan penerapan SJMKP	5	10	20	30	40	RPU yang menerapkan SJMKP
1.3 Peningkatan kualitas SDM • Pelatihan manajemen pengelolaan RPH • Pelatihan SJMKP	20	60	100	160	200	Kumulatif jumlah staf RPU yang ikut pendam-pingan
2.1. Pengenalan produk baru olahan daging ayam (baso) pemasaran • Penerbitan media deseminasi pengolahan berbagai produk olahan berbasis daging ayam	ada	ada	ada	ada	ada	Tersedianya media diseminasi
2.2. Bantuan peralatan untuk pengolahan daging ayam • Identifikasi kebutuhan peralatan • Penyusunan mekanisme pemberian bantuan • Penentuan kelompok tani penerima • Realisasi bantuan	5	10	20	35	50	Unit usaha (poktan)
2.3. Pelatihan dan pendampingan • Pelatihan teknologi produksi pengolahan daging ayam	20	60	120	160	200	Kumulatif orang terlatih

2.4. Fasilitasi peralatan pengolahan daging ayam • Bantuan peralatan penmgolahan daging ayam	10	30	50	75	100	Kumulatif poktan yang terlibat
3.1. Pelatihan penerapan SJMKP pada produsen Pengolahan daging • Pelatihan penerapan SJMKP	20	40	80	100	120	Kumulatif jumlah poktan ikut pelatihan
3.2. Pendampingan penerapan SJMKP pada produsen Pengolahan daging • Pendampingan penerapan SJMKP	5	25	35	40	50	Kumulatif jumlah poktan (unit usaha) yang menerapkan
4.1. Kampanye makan daging ayam untuk meningkatkan asupan gizi	MM	MM & ME	MM & ME	MM & ME	MM & ME	Media kampanye (MM= media massa, ME= Media elektronik)
4.2. Pengembangan diversifikasi produk olahan daging ayam	1	1	1	1	1	Produk olahan

5.2.10. Buah Tropika



Gambar 5.10. Strategi pengembangan industri buah tropika

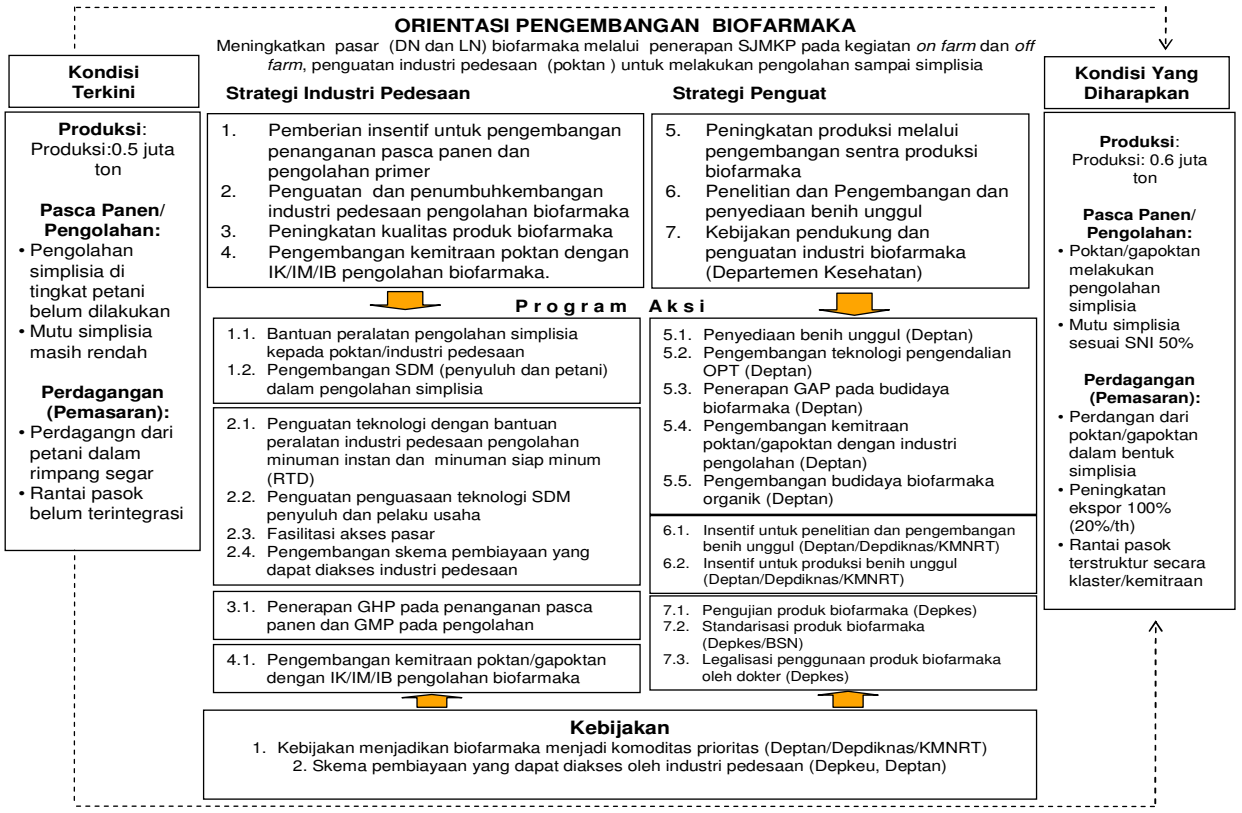
Tabel 5.10. Program Aksi, Rencana Implementasi dan Sasaran Pengembangan Industri Perdesaan Buah Tropika

Program Aksi dan Rencana Implementasi	Sasaran tahunan					Keterangan
	2010	2011	2012	2013	2014	
1.1. Bantuan peralatan VHT untuk mengatasi penyakit pasca panen • Identifikasi poktan • Realisasi bantuan • Pendampingan teknologi	5	20	40	65	75	Kumulatif jumlah poktan penerima bantuan
1.2. Peningkatan kualitas SDM penyuluh dan petani untuk penanganan pasca panen buah • Pelatihan farm manajemen • Training penerapan Global GAP, GHP, GMP • Pendampingan penerapan GlobalGAP, GHP, GMP • Sosialisasi penerapan QMS (quality management system)	10	20	40	50	1.7	Kumulatif persentase penyuluh dan poktan
2.1. Akselarasi penerapan SOP, GHP, GMP • Penyusunan SOP, GHP dan GMP • Sosialisasi keamanan produk SOP, GHP, GMP • Fasilitasi penerapan keamanan produk (HCCP, MLR (minimum level residue) SOP, GHP dan GMP	30	40	50	60	60	Persentase gapoktan yang menerapkan GHP dan GMP
3.1. Bantuan peralatan industri perdesaan pengolahan manisan, selai, dan bubur buah (*pulp* buah) • Identifikasi poktan • Fasilitasi pengembangan industri kecil olahan buah berbasis perdesaan • Bantuan peralatan pengolahan	10	25	50	70	80	Jumlah industri perdesaan pengolahan buah

3.2. Skema bantuan modal dengan bunga rendah • Identifikasi poktan • Bantuan permodalan • Monitoring dan evaluasi	ada	ada	ada	ada	ada	Skema bantuan modal dengan bunga rendah atau syariah
3.3. Pelatihan dan pendampingan • Pendampingan teknologi • Pendampingan pemasaran	10	25	50	70	80	Jumlah kelompok yang mendapat pelatihan dan pendampingan
4.1. Peningkatan pemasaran dalam negeri • Gerakan cinta produksi buah local • Insentif peralatan dan teknologi dalam bentuk sarana seperti *packing house* untuk meningkatan kualitas buah lokal	5%	5%	5%	5%	5%	Persentase peningkatan pasar dalam negeri
4.2. Peningkatan pemasaran produk buah untuk pasar Ekspor	10%	10%	10%	10%	10%	Persentase peningkatan pasar dalam negeri

• Pameran produksi buah tropika untuk menarik konsumen luar negeri • Peningkatan lobi dengan pembeli di luar negeri • Branding produk untuk menjaga loyalitaas konsumen ekspor • Temu bisnis (petani, eksportir, importir) • Preferensi produk oleh calon konsumen di negara tujuan						
4.3. Pengembangan promosi • Pencitraan buah tropika Indonesia melalui tayangan iklan	MM	MM & ME	MM & ME	MM & ME	MM & ME	Media kampanye
4.4. Pengembangan sistem informasi pasar • Penyusunan data base produksi buah	ada	ada	ada	ada	ada	Informasi pasar

5.2.11. Biofarmaka



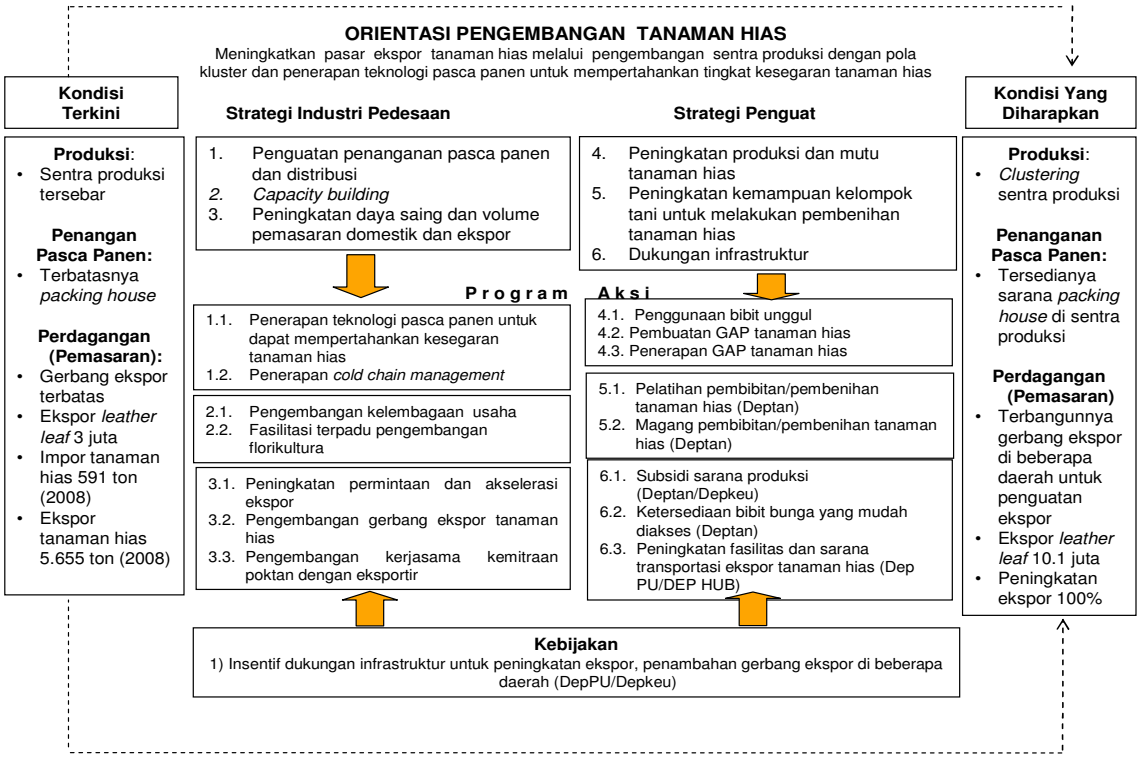
Gambar 5.11. Strategi Pengembangan Industri Perdesaan Biofarmaka

Tabel 5.11. Program Aksi, Rencana Implementasi dan Sasaran Pengembangan Industri Perdesaan Biofarmaka

Program Aksi dan Rencana Implementasi	Sasaran tahunan					Keterangan
	2010	2011	2012	2013	2014	
1.1. Bantuan peralatan pengolahan simplisia kepada poktan/industri perdesaan • Identifikasi peralatan yang dibutuhkan • Penyusunan mekanisme pemberian bantuan • Penentuan kelompok tani penerima • Realisasi bantuan • Pendampingan	10	35	85	100	110	Kumulatif poktan
1.2. Pengembangan SDM (penyuluh dan petani) dalam pengolahan simplisia • Pengembangan SDM (penyuluh dan petani) dalam pengolahan primer. • Pelatihan TOT untuk penyuluh dan pendamping • Penyuluhan pada petani (kelompok tani)	5	15	25	35	40	Kumulatif % jumlah penyuluh di sentra produksi
2.1. Penguatan teknologi dengan bantuan peralatan industri perdesaan pengolahan minuman instan dan minuman siap minum (RTD) • Identifikasi peralatan yang dibutuhkan • Penyusunan mekanisme pemberian bantuan • Penentuan kelompok tani penerima • Realisasi bantuan • Pendampingan	5	15	25	35	40	% Poktan di sentra produksi

2.2. Penguatan penguasaan teknologi SDM penyuluh dan pelaku usaha • Pelatihan TOT untuk penyuluh dan pendamping • Penyuluhan pada petani (kelompok tani)	10	35	85	100	110	Kumulatif unit usaha (poktan)
2.3. Fasilitasi akses pasar • Pengembangan informasi pasar	5	15	25	35	40	Kumulatif % jumlah penyuluh di sentra produksi
2.4 Pengembangan skema pembiayaan yang dapat diakses industri perdesaan • Penyediaan skema pembiayaan yang dapat diakses oleh industri kecil	5	15	25	35	40	% Poktan disentra produksi
3.1.Penerapan GHP pada penanganan pasca panen dan GMP pada pengolahan • Sosialisasi penerapan GHP dan GMP	25	50	75	100	100	Kumulatif % sentra produksi
4.1.Pengembangan kemitraan poktan/gapoktan dengan IK/IM/IB pengolahan biofarmaka • Menetapkan faktor dan ketentuan kerjasama • Menguatkan faktor kerjasama • Mengawasi faktor kerjasama	-	ya	ya	ya	ya	Tersedia

5.2.12. Tanaman Hias



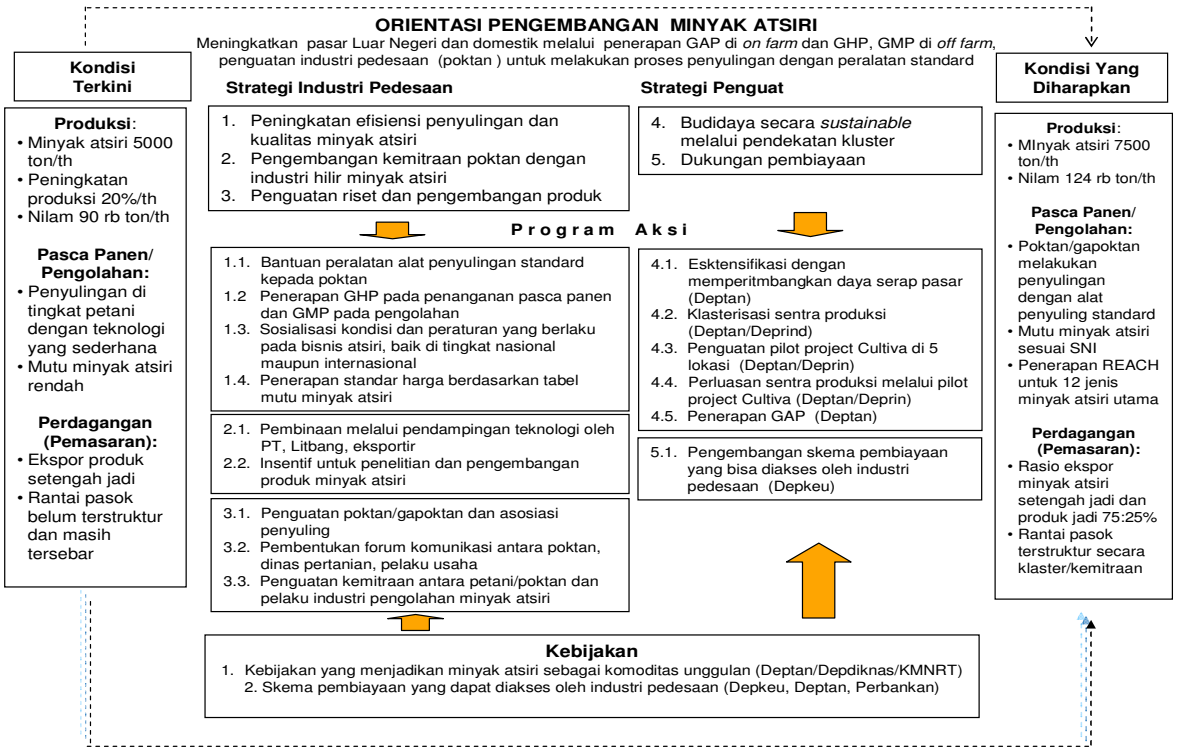
Gambar 5.12. Strategi Pengembangan Industri Perdesaan Tanaman Hias

Tabel 5.12. Program Aksi, Rencana Implementasi dan Sasaran Pengembangan Industri Perdesaan Tanaman Hias

Program Aksi dan Rencana Implementasi	Sasaran tahunan					Keterangan
	2010	2011	2012	2013	2014	
1.1. **Penerapan teknologi pasca panen untuk dapat mempertahankan kesegaran tanaman hias** • Pelatihan dan pendampingan teknologi kepada poktan tanamanhias	20	20	40	40	20	Jumlah poktan yang diintroduksi
1.2. Penerapan *cold chain management* • Sosialisasi GHP • Penerapan GHP dalam penanganan tanaman hias • Fasilitasi packing house	79	82	85	88	90	Jumlah bantuan *packing house* komulatif (total untuk hortikultura)
2.1. Pengembangan kelembagaan usaha • Penguatan gapoktan • Pembentukan asosiasi petani produsen tanaman hias	5	5	5	5	5	Kegiatan pendampingan poktan tanaman hias per tahun
2.2.Fasilitasi terpadu pengembangan florikultura • Identifikasi poktan sasaran • Fasilitasi *green house* • Pendampingan, monitoring dan evaluasi	30	40	50	60	70	Persentase poktan yangmenerima sosialisasi SOP, Gap dan GMP

3.1. Peningkatan permintaan dan akselerasi ekspor • Promosi dan Pameran • Peningkatan motovasi petani tanaman hias • Pengembangan pasar bunga	10	10	10	10	10	Persentase peningkatan permintaan ekspor
3.2. Pengembangan gerbang ekspor tanaman hias • Sosialisasi dan workshop dengan melibatkan pelaku usaha, eksportir, kelompok tani hortikultura, serta berbagai institusi terkait pada berbagai event. • Kerjasama dan kemitraan usaha antar produsen dan pelaku usaha telah dapat dilaksakan, sehingga akhirnya mendorong pada peningkatan ekspor • Pengembangan sistem infomasi pasar	2	3	5	5	5	Kumulatif jumlah gerbang ekspor tanaman hias
3.3. Pengembangan kerjasama kemitraan poktan dengan eksportir • Promosi dan Pameran • Peningkatan motivasi petani tanaman hias • Pengembangan pasar bunga	10	25	50	75	90	Kumulatif poktan yang terlibat dalam kerjasama

5.2.13. Minyak Atsiri



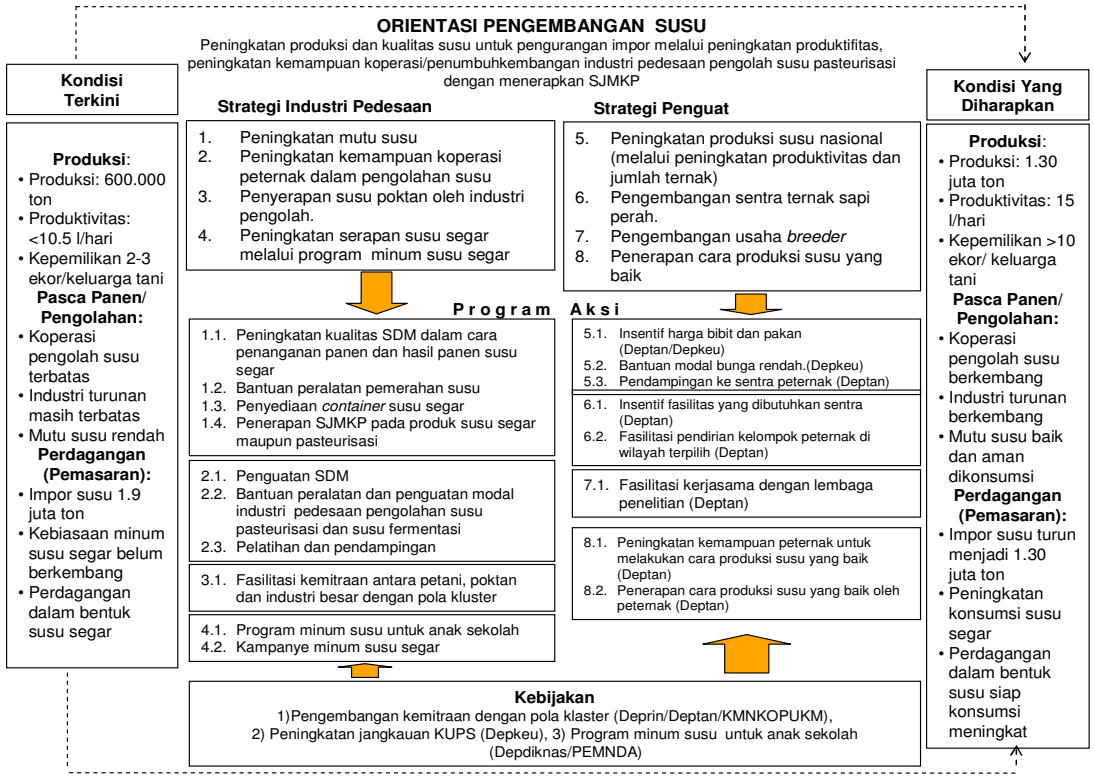
Gambar 5.13. Strategi Pengembangan Industri Perdesaan Minyak Atsiri

Tabel 5.13. Program Aksi, Rencana Implementasi dan Sasaran Pengembangan Industri Perdesaan Minyak Atsiri

Program Aksi dan Rencana Implementasi	Sasaran tahunan					Keterangan
	2010	2011	2012	2013	2014	
1.1. Bantuan peralatan alat penyulingan standard kepada poktan • Identifikasi peralatan yang dibutuhkan • Penyusunan mekanisme pemberian bantuan • Penentuan kelompok tani penerima • Realisasi bantuan • Pendampingan	10	10	10	10	10	Bantuan alat penyulingan standard ke poktan
1.2. Penerapan GHP pada penanganan pasca panen dan GMP pada pengolahan • Penyusunan GHP dan GMP • Sosialisasi GHP dan GMP ke petani/poktan dan pelaku usaha	5	5	5	5	5	Kegiatan sosialisasi dan pelatihan GHP, GMP dan peraturan standard perrdagangan minyak atsiri ke poktan
1.3. Sosialisasi kondisi dan peraturan yang berlaku pada bisnis atsiri, baik di tingkat nasional maupun internasional • Sosialisasi peraturan yangberkaitan dengan minyak atsiri ke petani/poktan atau pelaku usaha	5	5	5	5	5	Kegiatan sosialisasi dan pelatihan GHP, GMP dan peraturan standard perrdagangan minyak atsiri ke poktan
1.4. Penerapan standar harga berdasarkan tabel mutu minyak atsiri • Penyusunan tabel harga berdasarkanmutu minyak atsiri • Sosialisasi standar harga • Penerapan tabel harga	1					Penyusunan standard harga dan penerapannya

2.2. Insentif untuk penelitian dan pengembangan produk minyak atsiri • Penentuan kelompok sasaran • Pendampingan teknologi kepada poktan	1	1	1	1	1	Kegiatan pendampingan ke poktan skema ABGC ke sentra produksi
3.1. Penguatan poktan/gapoktan dan asosiasi penyuling • Pendampingan poktan	3	3	3	3	3	Jumlah poktan sasaran
3.2. Pembentukan forum komunikasi antara poktan dinas pertanian, pelaku usaha • Inisiasi pembentukan forum komunikasi antara poktan, dinas dan pelaku usaha	3	3	3	3	3	Jumlah forum komunikasi antara poktan, dinas pertanian dan pelaku usaha
3.3. Penguatan kemitraan antara petani/poktan dan pelaku industri pengolahan minyak atsiri • Temu bisnis antara poktan, dinas dan pelaku usaha	3	3	3	3	3	Peningkatan kemitraan antara poktan dan pelaku usaha

5.2.14. Susu Sapi



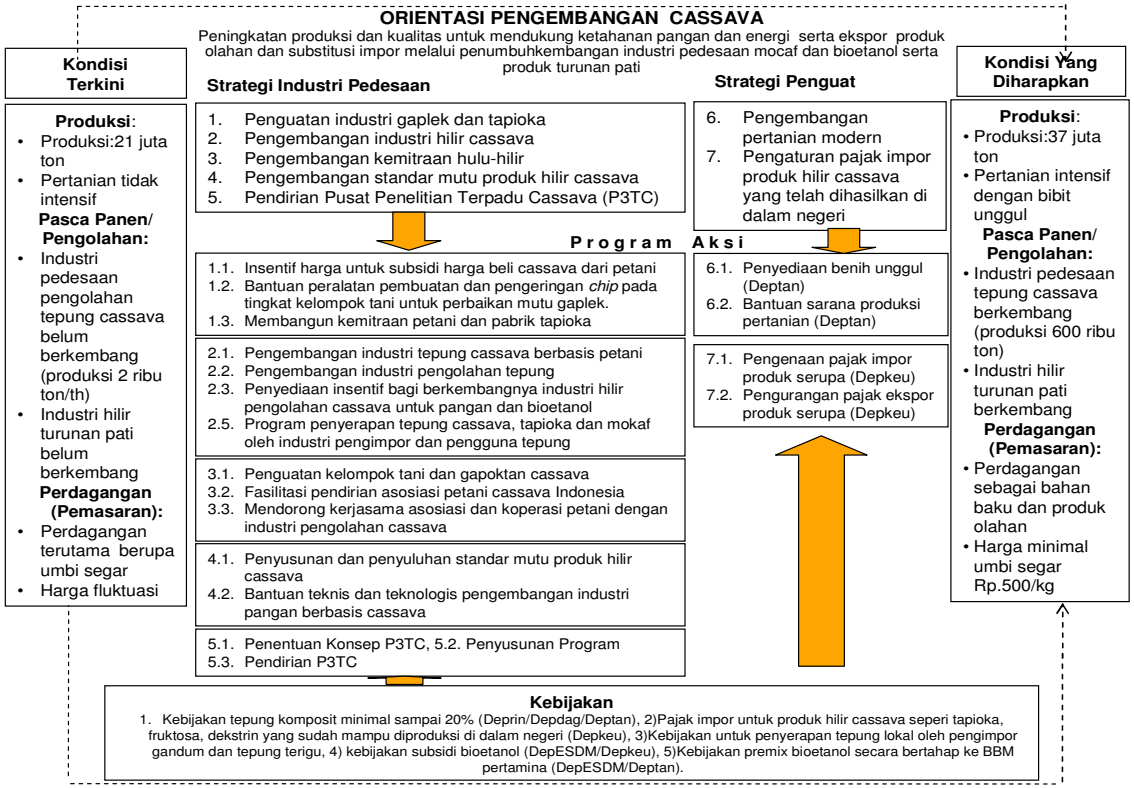
Gambar 5.14. Strategi Pengembangan Industri Perdesaan Susu Sapi

Tabel 5.14. Program Aksi, Rencana Implementasi dan Sasaran Pengembangan Industri Perdesaan Susu Sapi

Program Aksi dan Rencana Implementasi	Sasaran tahunan					Keterangan
	2010	2011	2012	2013	2014	
. **Peningkatan kualitas SDM dalam cara penanganan panen dan hasil panen susu segar** • Pelatihan TOT untuk penyuluh dan tenaga pendamping • Pelatihan untuk peternak	15	30	60	85	100	Kumulatif % penyuluh/ pendamping peternak
1.2. Bantuan peralatan pemerahan susu • Identifikasi kebutuhan • Penyusunan mekanisme pemberian bantuan • Penentuan kelompok tani penerima • Realisasi bantuan	10	20	40	50	60	Poktan
1.3. Penyediaan *container* susu segar	100	200	1.000	1.500	1.700	Kumulatif unit
1.5. Penerapan SJMKP pada produk susu segar maupun pasteurisasi	10	30	60	85	100	Jumlah koperasi (%)
2.1. Penguatan SDM • Pelatihan pengolahan susu segar dan produk olahan • Pendampingan untuk pengolahan dan pemasaran	1	2	5	6	7	Kumulatif unit
2.2. Bantuan peralatan dan penguatan modal industri perdesaan pengolahan susu pasteurisasi dan susu fermentasi • Identifikasi kebutuhan • Penyusunan mekanisme pemberian bantuan	ada	ada	ada	ada	ada	Skema pembiayaan

• Penentuan kelompok tani penerima • Realisasi bantuan						
2.3.Pelatihan dan pendampingan	10	25	50	60	70	Poktan yang terlibat
3.1.Fasilitasi kemitraan antara petani, poktan dan industri besar dengan pola kluster • Menetapkan faktor dan ketentuan kerjasama • Menguatkan faktor kerjasama • Mengawasi faktor kerjasama • Insentif pajak bagi industri penyerap	1	4	25	35	40	Daerah
4.1. Program minum susu untuk anak sekolah • Pemberian susu untuk program makanan tambahan untuk anak sekolah	MM	MM & ME	MM & ME	MM & ME	MM & ME	Media kampanye
4.2. Kampanye minum susu segar • Integrasi dengan kurikulum sekolah tentang pentingnya minum susu • Kampanye melalui media massa	15	30	60	85	100	Kumulatif % penyuluh/ pendamping peternak

5.2.15. Cassava



Gambar 5.15. Strategi Pengembangan Industri Perdesaan Cassava

Tabel 5.15. Program Aksi, Rencana Implementasi dan Sasaran Pengembangan Industri Perdesaan Cassava

Program Aksi dan Rencana Implementasi	Sasaran tahunan					Keterangan
	2010	2011	2012	2013	2014	
1.1. Insentif harga untuk subsidi harga beli cassava dari petani • Penetapan harga dasar cassava segar yang layak bagi petani • Penyusunan mekanisme subsidi • Pemberian subsidi harga	100	200	250	300	300	X 1000 ton cassava
1.2. Bantuan peralatan pembuatan dan pengeringan *chip* pada tingkat kelompok tani untuk perbaikan mutu gaplek. • Penyusunan mekanisme pemberian bantuan • Penentuan kelompok tani penerima • Realisasi bantuan	10	20	25	30	35	Poktan
1.3. Membangun kemitraan petani dan pabrik tapioka • Menetapkan faktor dan ketentuan kerjasama • Menguatkan faktor kerjasama • Mengawasi faktor kerjasama	5	10	15	20	25	Kumulatif jumlah kerjasama
2.1. Pengembangan industri tepung cassava berbasis petani • Penetapan kelompok tani basis pengembangan • Bantuan peralatan dan teknologi • Bantuan dan jaminan pemasaran	10	20	25	30	35	Kumulatif jumlah industri

2.2. Pengembangan industri pengolahan tepung • Mendorong pertumbuhan industri modified starch yang banyak digunakan oleh industri farmasi dan pangan, seperti pati alfa dan dekstrin	1	3	5	6	7	Kumulatif jumlah industri
2.3. Penyediaan insentif bagi berkembangnnya industri hilir pengolahan cassava untuk pangan dan bioetanol • Kemudahan perijinan • Dukungan subsidi bahan baku kepada petani • Bantuan pengembangan pasar	5	15	25	35	40	Kumulatif jumlah poktan
2.4. **Program penyerapan tepung cassava, tapioka dan mokaf oleh industri pengimpor dan pengguna tepung** • Penerbitan peraturan ketentuan impor terigu dan tepung beras lainnya • Kewajiban menyerap 5 (lima) persen dari volume setara terigu atau 2,5 (dua setengah) persen setara tepung lainnya	1	3	4	5	10	Kumulatif industri hilir baru
3.1.Penguatan kelompok tani dan gapoktan cassava • Bantuan penyusunan badan hukum • Bantuan dana operasional yang dipertanggungjawabkan • Bantuan pengembangan jejaring	100	200	300	400	500	X 1000 tonKumulatif tepung cassava yang diserap

3.2. Fasilitasi pendirian asosiasi petani cassava Indonesia • Pertemuan perwakilan gapoktan daerah produsen utama (Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur) • Pendirian Asosiasi Petani Cassava Indonesia	20	40	60	70	80	Kumulatif poktan
3.3.Mendorong kerjasama asosiasi dan koperasi petani dengan industri pengolahan cassava • Mengadakan pertemuan asosiasi petani dengan industri pengolah cassava • Menyusun program atau kesepakatan kerjasama		1				Assosiasi petani cassava
4.1. Penyusunan dan penyuluhan standar mutu produk hilir cassava • Inventarisasi produk hilir yang belum memiliki Standar Nasional • Adopsi standar Internasional untuk tujuan ekspor • Penyusunan standar sebagai acuan pengembangan industri hiliR			4	10	15	Kumulatif jumlah kerjasama,

4.2.Bantuan teknis dan teknologis pengembangan industri pangan berbasis cassava • Menyediakan layanan pendirian Usaha Kecil dan Menengah Produk Hilir cassava berorientasi pangan • Bantuan promosi produk pangan berbasis cassava • Pembelian produk pangan cassava oleh instansi pemerintah	-	2	4	6	10	Kumulatif standar mutu baru
5.1.Penentuan Konsep P3TC	ada	ada				Konsep pengembangan
5.2. Penyusunan Program						
5.3. Pendirian P3TC						

5.2.16. Sagu



Gambar 5.16. Strategi Pengembangan Industri Perdesaan Sagu

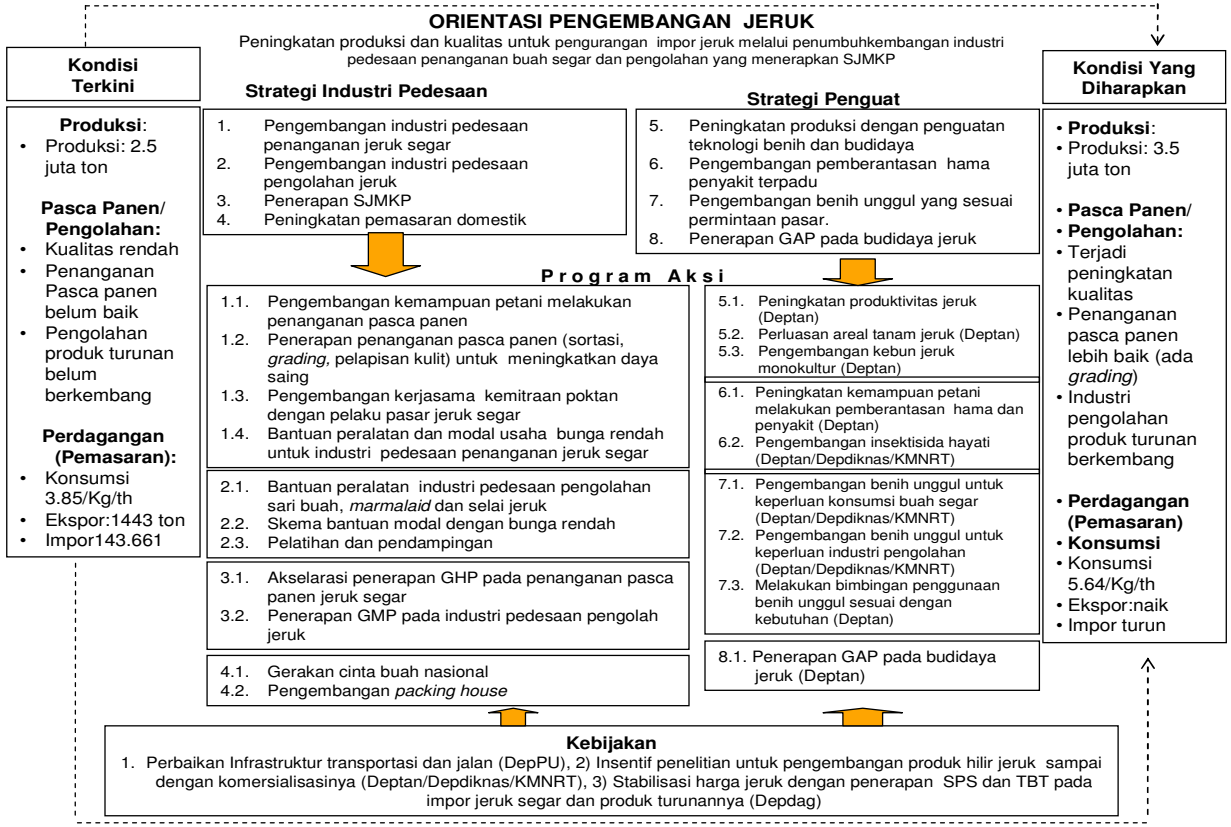
Tabel 5.16. Program Aksi, Rencana Implementasi dan Sasaran Pengembangan Industri Perdesaan Sagu

Program Aksi dan Rencana Implementasi	Sasaran tahunan					Keterangan
	2010	2011	2012	2013	2014	
1.1. Pengembangan teknologi terapan untuk industri pengolahan sagu • Pembiayaan penelitian dan penyusunan profil kelayakan teknologi terapan skala industri (kecil, menengah dan besar) • Diseminasi teknologi terapan pengolahan sagu • Pembangunan pilot proyek industri hilir pengolahan sagu	5	10	20	35	40	Jumlah kumulatif teknologi tepat terap
1.2. insentif bagi investasi di pengolahan hulu sagu	10	20	30	40	50	Jumlah kumulatif industri hulu sagu
1.3. Pengembangan pasar produk olahan sagu • Pameran produk pengolahan sagu nasional • Sosialisai produk olahan sagu • Membangun jejaring pasar dalam dan luar negeri	20	30	40	50	60	Persen kenaikan volume perdagangan produk sagu
• Inisiasi pengembangan industri bioetanol berbasis sagu • Penyusunan kelayakan regional pembangunan industri bioetanol • Penyiapan roadmap pembangunan industri bioetanol	2	4	6	8	10	Kumulatif penyiapan pendirian industri bioetanol
2.2. Fasilitasi dan pemberian insentif untuk investasi industri bioetanol berbasis sagu • Penyusunan mekanisme pemberian insentif		3	5	10	12	Jumlah kumulatif industri

• Penentuan penerima insentif • Realisasi insentif						bioetanol yang berdiri
3.1.Penyuluhan teknologi pengolahan sagu bagi petani • Pelatihan calon pengusaha lokal pengolahan sagu • Penyusunan kelayakan dan rencana pengembangan industri kecil pengolahan sagu • Fasilitasi tumbuhnya industri kecil pengolahan sagu • Pelatihan penyuluh pemanenan sagu yang baik • Bantuan peralatan pemanenan bagi petani sagu	300	600	1000	1300	1500	Jumlah kumulatif petani sagu yang dilatih
3.2.Bantuan peralatan pengolahan sagu kepada poktan • Penetapan kelompok penerima • Penyediaan dan realisasi bantuan perlatan pengolahan sagu bagi kelompok tani	4	8	12	16	20	Jumlah unit pengolahan yang dibangun
4.1Penyuluhan pemeliharaan dan pemanenan sagu • Pelatihan penyuluh pemanenan sagu yang baik • Bantuan peralatan pemanenan bagi petani sagu	300	600	1000	1300	1500	Jumlah kumulatif petani sagu yang dilatih
4.2.Penyuluhan pengelolaan hutan (tanaman) sagu yang berkelanjutan • Pelatihan penyuluh pemeliharaan hutan sagu yang berkelanjutan • Penyuluhan pengelolaan hutan sagu yang berkelanjutan	300	600	1000	1300	1500	Jumlah kumulatif petani sagu yang dilatih
5.1.Penyuluhan teknologi pengolahan pati sagu yang berorientasi mutu	5	10	15	20	25	Jumlah industri kecil
5.2.Pengadaan peralatan pengolahan pati sagu • Penetapan rancangan proses pengolahan • Penetapan spesifikasi peralatan	5	10	15	20	25	Jumlah industri kecil

• Pemberian bantuan peralatan bagi industri kecil hilir pengolah produk pangan berbasis sagu						
6.1. Kampanye nasional diversifikasi pangan pokok • Penyiapan bahan dan media kampanye • Penyusunan Tim Kampanye • Pelaksanaan kampanye	300	300	300	300	300	Jam tayang per tahun pada televisi nasional
6.2. Pengembangan produk pangan (beras sagu) untuk pangan pokok • Pemantapan teknologi proses • Pembuatan contoh beras sagu • Sosialisasi beras sagu	2	4	6	8	10	Jumlah kumulatif industri pengolah beras sagu
6.3. Insentif dan kemudahan investasi industri pengolahan pangan berbasis sagu • Penetapan mekanisme dukungan • Identifikasi dukungan yang diperlukan • Penyediaan insentif bagi industri baru	5	10	15	20	25	Industri baru tumbuh/tahun

5.2.17. Jeruk



Gambar 5.17. Strategi Pengembangan Industri Perdesaan Jeruk

Tabel 5.17. Program Aksi, Rencana Implementasi dan Sasaran Pengembangan Industri Perdesaan Jeruk

Program Aksi dan Rencana Implementasi	Sasaran tahunan					Keterangan
	2010	2011	2012	2013	2014	
1.1.Pengembangan kemampuan petani melakukan penanganan pasca panen • Penyusunan SOP, GHP dan GMP • Sosialisasi keamanan produk SOP, GHP, GMP • Fasilitasi (pendampingan) penerapan OP, GHP dan GMP	20	40	60	40	20	Jumlah poktan terlatih
1.2.Penerapan penanganan pasca panen (sortasi, *grading,* pelapisan kulit) untuk meningkatkan dayasaing • Identifikasi poktan sasaran • Fasilitasi peralatan dan pendampingan teknologi • Monitoringdan evaluasi	5	10	15	10	5	Jumlah poktan yang menerapkan penanganan pasca panen
1.3.Pengembangan kerjasama kemitraan poktan dengan pelaku pasar jeruk segar • Fasilitasi pertemuan • Penyusunan mekanisme kerjasama	20	40	60	40	20	Jumlah poktan yang terlibat
1.4.Bantuan peralatan dan modal usaha bunga rendah untuk industri perdesaan penanganan jeruk segar • Penetapan target Gapoktan yang telah siap • Inventarisir teknologi pre cooling yang mudah dan murah diterapkan • Pemberian bantuan • Insentif pajak	20	40	60	40	20	Jumlah poktan sasaran
2.1. Bantuan peralatan industri perdesaan pengolahan sari buah, *marmalaid* dan selai jeruk • Identifikasikelompok sasaran • Bantuan peralatan • Monitorng dan evaluasi	5	15	40	60	75	Jumlah industri perdesaan penerima bantuan
2.2. Skema bantuan modal dengan bunga rendah	ada	ada	ada	ada	ada	Skema

• Pemberian bantuan permodalan						pembiayaan bunga rendah
2.3. Pelatihan dan pendampingan • Penentuan poktan sasaran • Pelaksanaan kegiatan pendampingan dan pelatihan teknologi	20	40	60	40	20	Jumlah poktan terlatih
3.1.Akselarasi penerapan GHP pada penanganan pasca panen jeruk segar • Penyusunan GHP • Sosialasi GHP ke poktan	5	10	20	25	30	Kumulatif poktan yang menerapkan GHP
3.2.Penerapan GMP pada industri perdesaan pengolah jeruk • Sosialisai GMP ke poktan/gapoktan dan industri jeruk	5	10	20	25	30	Industri perdesaan yang menerapkan GMP
4.1.Gerakan cinta buah nasional • Fasilitasi kerjasama dengan usaha distribusi dan pasar supermarket • Penyusunan iklan • Penayangan iklan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tayangan iklan ke media
4.2. Pengembangan *packing house* • Identifikasi target lokasi kebutuhan • Sosialisasi • Pendirian *packing house* • Pendampingan pengelolaan *packing house*	1	1	1	1	1	Fasilitasi *packing house* (unit/tahun)

6. ABG UNTUK PENUMBUHKEMBANGAN INDUSTRI PEDESAAN

Kesuksesan pelaksanaan *Blue Print* ini sangat tergantung dari keberhasilan seluruh pemangku kepentingan memerankan tugasnya masing-masing. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah akademisi, dunia bisnis dan pemerintah serta masyarakat sebagai subyek yang harus disejahterakan atau sering disebut sebagai ABG-C. Berdasarkan *Global Competitiveness Index* (GCI), ada sembilan pilar yang perlu diperhatikan untuk membangun *National Competitiveness,* yaitu:

1. Berjalannya fungsi lembaga publik dan swasta (G)
2. Infrastruktur yang tepat (G)
3. Situasi makroekonomi stabil (G)
4. Kesehatan yang baik dan pendidikan dasar yang memadai (G)
5. Pendidikan tinggi dan pelatihan (A)
6. Efisiensi pasar (B)
7. Kesiapan teknologi (A)
8. Kecanggihan proses produksi (B)
9. Inovasi (A)

Peran masing-masing pemangku kepentingan terhadap kesembilan pilar tersebut dapat dibagi sebagai berikut:

a) Akademisi harus bertanggung jawab atas:
   5. Pendidikan tinggi dan pelatihan
   7. Kesiapan teknologi
   9. Inovasi
b) Dunia Bisnis harus bertanggungjawab atas:
   6. Efisiensi pasar
   8. Kecanggihan proses produksi
c) Sedangkan Pemerintah tentunya harus bertanggung jawab atas:
   1. Berjalannya fungsi lembaga publik dan swasta
   2. Infrastruktur yang tepat

3. Situasi makroekonomi stabil
4. Kesehatan yang baik dan pendidikan dasar yang memadai

Tentu saja masing-masing pemangku kepentingan juga saling terkait dengan pilar-pilar lain yang bukan tanggungjawab utamanya. Dari kesembilan pilar tersebut empat pilar pertama diperuntukan bagi negara-negara yang tingkat kompetisinya masih berdasarkan atas tenaga kerja yang kurang terampil dan berbasis sumberdaya alam (*factor-driven*). Perusahaan menjual produknya berbasis pada harga dan bahan baku atau bahan setengah jadi dengan produktivitas yang rendah yang tercermin dari upah yang rendah. Pilar ke lima, enam dan tujuh diperuntukkan bagi negara-nagara yang sudah mengarah kepada faktor efisisiensi sebagai pendorongnya (*efficiency-driven*). Pilar ke delapan dan sembilan diperuntukkan bagi negara yang sudah mengandalkan produknya pada tingkatan tertinggi (*innovation-driven*), sehingga hanya dapat dicapai melalui kedua pilar tersebut.

Berdasarkan pengelompokan tersebut di atas maka Indonesia masih berada pada tingkat pertama atau terrendah, dimana seluruh pilar yang harus dilaksanakan, penanggungjawab utamanya adalah pemerintah. Untuk itu semua peran tersebut (pilar 1-4) harus segera dilakukan dengan sebaik-baiknya dan dalam waktu yang bersamaan akademisi dan dunia bisnis dapat membantu mempercepat menuju ke tahap yang kedua melalui perannya pada pilar lima, enam dan tujuh. Dalam jangka menengah perlu segera disiapkan pula pelaksanaan pilar yang kedelapan dan sembilan oleh dunia bisnis dan akademisi, agar dapat segera mengejar ketertinggalan dari negara lain.

Indonesia harus melakukan terobosan dengan menjalankan seluruh pilar secara simultan namun dengan membuat prioritas sesuai dengan tingkat kepentingannya. Peran pemerintah sebagai regulator dan fasilitator yang sangat penting bagi pembangunan pertanian di Indonesia. Dari berbagai aspek tinjauan, kebijakan yang berpihak pada pembangunan ekonomi

yang berbasis perdesaan harus segera diperbaiki. Disamping itu pembangunan infrastruktur yang masih tertinggal, mengakibatkan terhambatnya pembangunan pada sektor-sektor yang lain. Kondisi khas lain yang masih harus dilakukan pemerintah adalah fungsi fasilitasi yang tidak saja dalam bentuk bantuan non-fisik tapi juga sering kali dalam bentuk bantuan fisik.

Dari sisi pengusaha (bisnis) pada umumnya masih berfikir jangka pendek dan sederhana. Pilihan menjual dalam bentuk bahan baku atau bahan setengah jadi adalah ciri khas dari kondisi *factor-driven*. Untuk itu pengusaha hendaknya berperan untuk meningkatkan nilai tambah setinggi-tingginya di dalam negeri. Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yang mendorong para pengusaha untuk sebesar-besarnya meningkatkan nilai tambahnya di dalam negeri. Pada saat yang sama pengusaha memperbaiki kinerjanya di berbagai bidang, agar tercapai tingkat efisiensi dan produktivitas yang tinggi agar bisa bersaing di pasar global.

Dunia pendidikan tinggi diharapkan melalui penelitian-penelitiannya dapat menghasilkan temuan-temuan atau teknologi-teknologi yang sesuai dengan keiinginan para pengusaha atau dunia bisnis. Untuk itu perlu diciptakan penelitian-penelitian yang mengikutsertakan dunia usaha dan atau sekaligus menjawab tantangan dunia usaha. Kerjasama yang baik antar keduanya akan menciptakan efisiensi penggunaan sumberdaya, baik di perguruan tinggi bahkan terutama di dunia usaha itu sendiri. Kedepan, para pengusaha didorong untuk sebesar-besarnya memanfaatkan perguruan tinggi sebagai pusat penelitian dan pengembangan usahanya. Untuk mempercepat terjadinya suasana tersebut, pemerintah harus memfasilitasi melalui kebijakan yang tepat seperti memberikan insentif pajak bagi pengusaha yang melibatkan perguruan tinggi sebagai pusat penelitian dan pengembangannya.

Bagi masyarakat pertanian Indonesia sebagai subjek pembangunan pertanian harus terlibat aktif dalam

mensukseskan program pemerintah. Sebagai contoh untuk memperbaiki infrastruktur pertanian diperlukan konsolidasi lahan. Apabila para petani dapat bekerjasama dengan baik, maka permasalahan sosial yang biasanya timbul akibat kegiatan ini dapat dikurangi atau bahkan dapat dihapuskan sama-sekali. Untuk itu peran pemerintah sangat penting dalam memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya pelaksanaan program seperti itu.

Tidak ada satupun pembangunan pertanian di dunia ini yang berhasil jika hanya ditangani oleh satu lembaga saja, melainkan harus oleh seluruh pemangku kepentingan secara bersamaan di bawah koordinasi pemerintah. Dalam *Blue Print* ini telah diusahakan untuk memasukkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dalam pembangunan nilai tambah dan dayasaing pertanian Indonesia. Namun demikian keberhasilannya sangat ditentukan oleh pelaksanaan dan peran serta masing-masing pemangku kepntingan sesuai dengan skenario atau rencana yang telah disepakati dan ditetapkan bersama.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2010

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

LAMPIRAN

Lampiran A.

Lampiran 4.1. Analisis SWOT Beras

Faktor Internal / Faktor Eksternal	**Kekuatan (S)** • Permintaan pasar dalam negeri sangat besar • Tersedia beih padi unggulan lokal. • Budaya kerja petani domestik yang baik dalam menanam padi.	**Kelamahan (W)** • Akses petani terhadap saprodi, benih unggul dan modal terbatas. • Kualitas beras belum baik • Susut masih tinggi
Peluang (O) • Pasar beras internasional terbuka • telah tersedia teknologi panen, pasca panen dan pengolahan yang dapat menekan susut • Pasar beras organik dan aromatik semakin meningkat • Hasil samping dapat diolah menjadi produk turunan yang bernilai ekonomi baik	**Strategi (S-O)** • Peningkatan produksi padi • Penumbuhan industri perdesaan berbasis beras dan hasil samping beras	**Strategi (W-O)** • Pengembangan sistem bantuan teknis, benih dan permodalan • Penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan yang baik • Penerapan teknologi modern pengolahan beras
Ancaman (T) • Ketersediaan lahan sawah semakin terbatas • Harga beras ber fluktuasi • Tingginya laju konversi lahan sawah untuk tujuan lain di luar pertanian • Perubahan iklim • Pangan pokok sangat tergantung pada beras	**Strategi (S-T)** • Pengurangan ketergantungan bahan pokok hanya pada beras • Pengendalian konversi lahan • Pengembangan varietas tahan kekeringan dan banjir (perubahan iklim)	**Strategi (W-T)** • Stabilisasi harga beras • Ekstensifikasi terbatas

Lampiran 4.2. Analisis SWOT Jagung

Faktor Internal / Faktor Eksternal	**Kekuatan (S)** • Swasembada • Potensi peningkatan produktivitas melalui penggunaan benih hibrida • Potensi perluasan areal tanam melalui lahan kering • Adanya insentif pemerintah untuk peningkatan produksi • Petani jagung Indonesia sudah menguasai teknologi budidaya jagung • Sudah ada Dewan Jagung Nasional • Tersebarnya sentra produksi jagung	**Kelemahan (W)** • Kurangnya kemampuan SDM dalam proses pasca panen • Akses terhadap benih unggul belum merata • Kualitas jagung masih rendah • Kurangnya fasilitas peralatan pasca panen
Peluang (O) • Pasar jagung dunia kekurangan 34.8 juta tiap tahunnya • Kebutuhan jagung untuk industri pakan ternak dan pangan domestik meningkat • Peluang peningkatan nilai tambah melalui proses pasca panen di tingkat petani • Peningkatan produktivitas dari 4 ton/ha menjadi 6 – 8 ton/ha	**Strategi (S-O)** • Pemanfaatan lahan kering untuk jagung di luar jawa • Pengembangan usaha tani jagung varietas unggul • Pengembangan usaha pengolahan jagung • Pengembangan industri pakan ternak yang berdekatan dengan sentra produksi jagung	**Strategi (W-O)** • Penyediaan bibit unggul yang mencukupi. • Perbaikan insfrastruktur jalan • Penguatan gapoktan • Kemitraan agrobisnis jagung • Peningkatan kualitas jagung • Pendampingan teknologi pasca panen
Ancaman (T) • Perluasan areal tanam bersaing dengan produk lain • Panen jagung bertepatan dengan musim hujan • Ketatnya kualitas	**Strategi (S-T)** • Pembangunan alat pengering mekanis	**Strategi (W-T)** • Penerapan SNI • Sosialisasi SNI melalui bimbingan teknis • Kebijakan bea masuk impor

jagung yang diterapkan oleh negara pengimpor atau industri pakan dan pangan • Industri pangan lebih memilih jagung impor karena relatifl ebih murah dan mudah pembiayaannya		

Lampiran 4.3. Analisis SWOT Kedelai

Faktor Internal / Faktor Eksternal	**Kekuatan (S)** • Tersedia benih unggul • Konsumsi kedelai dan produk turunannya (tahu, tempe, kecap, dll) sangat tinggi	**Kelamahan (W)** • Petani tidak tertarik menanam kedelai • Produktivitas masih rendah • Pasca panen belum ditangani dengan baik • Usahatani kedelai tidak menarik
Peluang (O) • Kondisi Indonesia belum swasembada. • Industri pengolahan kedelai berkembang dengan baik • Permintaan kedelai sangat besar dan tumbuh 4.3%/th. • Hasil samping pengolahan belum dimanfaatkan secara optimal	**Strategi (S-O)** • Penggunaan benih unggul untuk peningkatan produksi kedelai • Penumbuhkembangkan industri pengolahan kedelai dan hasil sampingnya.	**Strategi (W-O)** • Pemberian insentif untuk penanaman kedelai • Pengembangan penanganan pasca panen
Ancaman (T) • Ketersediaan lahan berkompetisi dengan komoditas lainnya • Tidak ada HPP • Pasokan kedelai luar negeri lebih menarik dan lebih berkualitas	**Strategi (S-T)** • Pengembangan benih unggul sesuai dengan kebutuhan industri	**Strategi (W-T)** • Perbaikan pemasaran kedelai dalam negeri

Lampiran 4.4. Analisis SWOT Gula

Faktor Internal / Faktor Eksternal	**Kekuatan (S)** • Indonesia memiliki pabrik gula dan perkebunan tebu yang luas • Konsumsi gula dalam negeri sangat tinggi	**Kelemahan (W)** • Produktivitas tebu rendah • Rendemen pabrik rendah • Indonesia tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri • HPP tinggi • Tetes tidak dimanfaatkan sendiri
Peluang (O) • Dukungan pemerintah sangat besar • Sumberdaya bahan baku gula non tebu melimpah • Pasar dalam negeri tumbuh dengan cepat	**Strategi (S-O)** • Pengembangan gula non-tebu	**Strategi (W-O)** • Perbaikan produktivitas tebu dengan pengembangan varitas unggul • Perbaikan efisiensi pengolahan • Revitalisasi pabrik • Pembangunan industri gula non-tebu • Pemanfaatan tetes sebagai bagian terpadu dari industri gula
Ancaman (T) • Petani tebu semakin berkurang • Perubahan iklim • Mutu gula impor lebih baik dan lebih murah	**Strategi (S-T)** • Pengembangan insentif budidaya tebu • Pengembangan varitas tebu resisten terhadap perubahan iklim • Perbaikan mutu gula	**Strategi (W-T)** • Pengaturan impor gula

Lampiran 4.5. Analisis SWOT Daging Sapi

Faktor Internal / Faktor Eksternal	**Kekuatan (S)** • Agroklimat dan ketersediaan lahan • SDM tersedia • Dukungan riset dan teknologi • Dukungan pemerintah untuk mewujudkan swasembada daging sapi	**Kelemahan (W)** • Impor ternak dan daging: 28% dari kebutuhan • Tingkat penerapan SJMKP di RPH masih rendah. • Industri perdesaan pengolahan kompos belum berkembang dengan baik • Industri perdesaan pengolahan kulit belum berkembang dengan baik
Peluang (O) • Konsumsi daging sapi dalam negeri terus meningkat • Pasar produk hasil samping peternakan sapi berkembang	**Strategi (S-O)** • Peningkatan kualitas SDM • Peningkatan riset dan teknologi untuk produk hasil samping ternak sapi • Peningkatan akses pembiayaan untuk usaha peternakan sapi potong	**Strategi (W-O)** • Pengembangan bibit sapi dan intensifikasi usaha peternakan • Pengembangan usaha peternakan terintegrasi • Penyediaan dan Pengembangan mutu pakan • Peningkatan fasilitas RPH (*cold storage*, alat transportasi berpendingin) di sentra produksi • Penerapan SJMKP pada RPH • Bantuan

		peralatan untuk pengolahan pakan ternak
Ancaman (T) • Negara penghasil ternak sapi mampu menghasilkan ternak sapi dengan kualitas baik • Harga daging sapi impor lebib murah	**Strategi (S-T)** • Pengembangan dan peningkatan kualitas rumah potong hewan di sentra produksi • Pengembangan industri pakan perdesaan • Pengembangan industri pedesan yang mengolah hasil samping (kulit, kompos) • Peningkatan kualitas produksi produk olahan industri perdesaan	**Strategi (W-T)** • Pengembangan kerjasama kemitraan • Bantuan mesin dan peralatan industri perdesaan pengolahan kulit, dan kompos • Pengembangan kerjasama kemitraan produsen kulit dengan pengrajin tas, sepatu • Pelatihan penerapan SJMKP pada produsen pengolahan daging

Lampiran 4.6. Analisis SWOT Sawit

Faktor Internal / Faktor Eksternal	**Kekuatan (S)**	**Kelemahan (W)**
	• Kesesuaian lahan dan ketersediaan lahan. • Potensi peningkatan produksi dan produktivitas • Ketersediaan tenaga kerja • Jaminan pasar dalam negeri dan ekspor • Teknologi pengolahan.CPO yang mapan • Kelembagaan dan asosiasi yang mapan • Kemudahan akses perbankan.	• Isu lingkungan di perkebunan sawit • Kurangnya dukungan riset dari hulu sampai hilir • Belum terserapnya sawit dari kebun rakyat oleh PKS • Ketersediaan sarana produksi. • Minimnya kondisi infrastruktur jalan dan pelabuhan • Perbedaan harga jual ekspor dan domestik
Peluang (O) • Peningkatan permintaan CPO dunia • Pengembangan industri produk hilir sawit • Pengembangan industri produk hasil samping sawit • .Pengembangan industri biodiesel	**Strategi (S-O)** • Peningkatan bantuan bibit bersertifikat bagi perkebunan sawit rakyat • Peningkatan produksi dan produktivitas sawit melalui penerapan SOP budidaya sawit • Peningkatan SDM melalui SL PPHP • Insentif pengembangan industri produk hilir • Insentfi pengembangan industri hasil samping sawit • Insentif pengembangan	**Strategi (W-O)** • Kemitraan antara petani sawit dan PKS • Pendirian PKS di sentra produksi sawit rakyat. Dengan kapasitas minimal 30 ton TBS per jam • Kebijakan bea keluar • Dukungan sarana produksi • Perbaikan infrastruktur

	industri biodiesel	
Ancaman (T) • *Negative campaign* tentang sawit • Isu perusakan lingkungan dan biodersivitas hutan tropis. • Isu dampak kesehatan minyak sawit • Penambahan persyaratan mutu CPO di pasar ekspor (DOBI). • Dipersyaratkannya sertifikat RSPO bagi kebun sawit • Pelarangan organisasi lingkungan internasional terhadap budidaya sawit di lahan gambut • Hambatan non tarif	**Strategi (S-T)** • Pengembangan kebun sawit yang berwawasan lingkungan (RSPO) diluar hutan lindung dan tanah gambut. • Peningkatan mediasi didunia internasional oleh asosiasi dan dewan kelapa sawit dalam rangka meng*counter* isu lingkungan, ikatan trans minyak sawit dan penghapusan biodiversivitas.	**Strategi (W-T)** • Penguatan riset di hilir untuk mengcounter *negative campaign*

Lampiran 4.7. Analisis SWOT Karet

Faktor Internal / Faktor Eksternal	**Kekuatan (S)**	**Kelemahan (W)**
	• Indonesia produsen nomor 2 terbesar dunia. • sebaran daerah produksi yang cukup luas • kemampuan memproduksi berbagai jenis barang karet. • dukungan industri bahan penolong • keberadaan Asosiasi Produsen (GAPKINDO) • dukungan lembaga riset • keterlibatan tenaga kerja yang tinggi, • tersedianya teknologi pengolahan, • PN dan swasta nasional mampu memproduksi RSS dan latek pekat.	• Mutu karet yang relatif rendah. • Belum dipahaminya sertifikasi mutu. • Teknologi pengolahan lateks masih sederhana. • Terjadinya pencemaran lingkungan limbah karet • Rendahnya nilai tambah industri karet. • Fasilitas pembiayaan yg minim. • Keberadaan industri hilir yang terbatas. • Masih lemahnya Iklim usaha • Lemahnya dukungan sarana dan prasarana • Rendahnya tingkat kepercayaan terhadap produk dalam negeri.
Peluang (O) • Penurunan produksi karet pesaing utama (Malaysia). • Permintaan produk hilir di pasar ekspor. • Peluang pasar dan diversifikasi produk karet. • Perluasan areal lahan budidaya karet masih terbuka • pasokan karet alam rata-rata	**Strategi (S-O)** • Peningkatan produksi dan produktivitas kebun karet dalam rangka meraih pasar ekspor dan pengembangan ekspor industri hilir karet. • Pengembangan industri hilir pengolahan karet. • Insentif pengembangan	**Strategi (W-O)** • Pengembangan pengolahan karet pada tingkat petani/kelompok tani. • Pengembangan industri pengolahan karet yang memperhatikan mutu, berdayasaing, bernilai tambah dan ramah lingkungan. • Penerapan GAP, GMP • Peningkatan SDM • Peremajaan kebun

2,9 juta ton per tahun yang baru dimanfaatkan didalam negeri sekitar 15 %.	industri hilir	karet rakyat • Peningkatan kemitraan petani dan industri pengolahan karet
Ancaman (T) • Bahan substitusi karet sintetik yang lebih baik • Peningkatan produksi karet pesaing lain (Thailand). • Hambatan non-tarif. • Akses modal investasi karet yang terbatas. • Isu pencemaran lingkungan.	**Strategi (S-T)** • Peningkatan penyediaan sarana produksi pertanian dan manajemen kebun Insentif kebijakan untuk perdagangan mengatasi hambatan non tarif • Penguatan peran asosiasi karet	**Strategi (W-T)** • Peningkatan akses modal usaha dari perbankan • Pengembangan teknologi pengolahan karet yang tidak mencemari lingkungan • Standarisasi mutu produk

Lampiran 4.8. Analisis SWOT Kakao

Faktor Internal / Faktor Eksternal	**Kekuatan (S)**	**Kelemahan (W)**
	• Produk impor penghasil devisa • Menyerap tenaga kerja • Sebaran lahan produsen kakao yang luas. • Kebutuhan teknologi pengolahan sederhana, • Tersedianya rantai pasar dan informasi harga.	• Sarana fermentasi kurang • Ketidakseragaman mutu • Harga kakao fermentasi rendah • Produktivitas kakao yang rendah. • Ekspor masih dalam bentuk tidak terfermentasi
Peluang (O) • Meningkatnya konsumsi kakao dunia. • Menurunnya produksi pesaing • Tersedianya lahan yang luas. • Permintaan produk olahan kakao terus meningkat • Impor kakao fermentasi	**Strategi (S-O)** • Peningkatan produksi dan produktivitas kebun kakao • Pengembangan industri hilir pengolahan kakao	**Strategi (W-O)** • Penguatan dan peningkatan produksi kakao fermentasi • Peningkatan produktivitas dengan bibit unggul • Kemitraan kelompok tani dengan industri pengolahan
Ancaman (T) • Produk kakao luar negeri yang lebih baik kualitasnya • Tuntutan standarisasi • Hambatan non tarrif	**Strategi (S-T)** • Penguatan industri pengolahan kakao	**Strategi (W-T)** • Peningkatan mutu kakao

Lampiran 4.9. Analisis SWOT Daging Ayam

Faktor Internal / Faktor Eksternal	**Kekuatan (S)**	**Kelemahan (W)**
	• Surplus lebih dari 300 ribu ton. • Ketersediaan SDM • Potensi agroklimat • Tumbuhnya industri pakan ternak di sentra produksi jagung • Industri daging ayam olahan terus berkembang • Dukungan pemerintah • Dukungan sosiasi dan kelembagaan	• Industri perdesaan pe-ngolahan daging ayam belum berkembang • Industri perdesaan pe-ngolahan daging be-lum menerapkan SJMKP • Pengembangan pakan ternak berbasis bahan baku lokal belum berkembang • Adanya kasus flu burung
Peluang (O) • Konsumsi daging ayam DN meningkat • Peluang ekspor daging ayam ke negara muslim • Preferensi konsumen Asia terhadap daging ayam cukup tinggi • Pasar produk daging ayam olahan terbuka	**Strategi (S-O)** • Peningkatan kualitas rumah potong unggas di sentra produksi • Peningkatan kualitas produk olahan dengan penerapan SJMKP • Peningkatan konsumsi daging ayam melalui kampanye sumber protein tinggi	**Strategi (W-O)** • Pengembangan usaha peternakan terintegrasi • Penyediaan dan Pengembangan mutu pakan • Peningkatan fasilitas RPU (*cold storage*, alat trans-portasi berpendingin) • Peningkatan industri perdesaan pengolahan daging ayam

Ancaman (T)	**Strategi (S-T)**	**Strategi (W-T)**
• Ancaman impor paha ayam dari Amerika • Penerapan "Bioterrorism Act" • Permentan No. 20/2009 ini kurang bisa memihak petani dan peternak • Konsumen domestik tertarik untuk membeli karkas unggas yang lebih murah dari luar • Free Trade Asean-Australia-New Zealand (FTA A-A-NZ) dimana akan mulai berlaku tanggal 27 Agustus 2009 • Pasar ekspor unggas masih sulit karena terhalang aturan Sanitary and Phytosanitary (SPS) karena penyakit Avian Influenza (AI/flu burung).	• Peningkatan skala usaha peternakan dengan pengembangan kemitraan yang berkeadilan • Penciptaan iklim investasi yang kondusif • Skema pembiayaan untuk mendukung pengembangan peternakan unggas, • Peraturan impor yang dapat melindungi kepentingan peternak unggas,	• Pelatihan penerapan SJMKP pada produsen pengolahan daging • Pencegahan lfu burung dengan menerapkan standar kesehatan ternak di peternakan unggas • Kampanye menggunakan daging ayam oriduk dalam negeri

Lampiran 4.10. Analisis SWOT Buah Tropika

Faktor Internal / Faktor Eksternal	**Kekuatan (S)**	**Kelemahan (W)**
	• Potensi peningkatan produksi buah melalu perluasan area tanam di masyarakat • Teknologi rekayasa bibit unggul buah sudah dikuasai • Varietas buah tropika yang ada di Indonesia tidak dipunyai oleh negara lain • Buah tropika Indonesia sudah masuk ke pasar negara Eropa, Asia, Timur tengah • Buah pisang sudah bisa menembus pasar Jepang	• Kebun buah tidak monokultur dan tersebar • Kurangnya kemampuan SDM dalam GAP, GMP • Kualitas buah relatif rendah • Dayasaing lokal dan internasional rendah
Kesempatan (O) • Pasar internasional masih terbuka luas • Pasar domestik masih terbuka luas karena • Konsumsi buah penduduk Indonesia per kapita per tahun masih rendah • Berkembangkan industri berbahan baku buah	**Strategi (S-O)** • Peningkatan lobi ke negara pengimpor buah • Peningkatan promosi dan temu bisnis • Kemitraan petani/gapoktan buah dengan industri olahan buah	**Strategi (W-O)** • Clustering kebun buah • Penyediaan bibit unggul • Peningkatan kualitas buah melalu penerapan GAP, GMP

Ancaman (T)	Strategi (S-T)	Strategi (W-T)
• Negara pengimpor mensyaratkan adanya GAP Pest List, Packing House yang telah diregistrasi • Produk buah impor berkualitas tinggi	• Pencitraan produk buah eksotik khas Indonesia • Branding produk buah eksotik Indonesia • Pembangunan packing house • Penyuluhan dan pendampingan penerapan GAP	• Sosialisasi SOP, keamanan produk, GAP dan GMP ke petani produsen • Penerapan SOP, kemanan pangan (HCCP, MLR) GAP, GMP • Dukungan kebijakan untuk menggunakan bahan baku buah lokal pagi industri • Gerakan cinta buah lokal

Lampiran 4.11. Analisis SWOT Produk Biofarmaka

Faktor Internal / Faktor Eksternal	**Kekuatan (S)** • Kesesuaian agroklimat sesuai • Penyerapan tenaga kerja baik • Ketersediaan lahan cukup • Konsumsi biofarmaka dalam bentuk jamu, obat herbal dan fotofarmaka dan minuman herbal meningkat terus	**Kelamahan (W)** • Petani tidak melakukan pengolahan primer/penanganan pasca panen yang memadai • Ketersediaan dan penggunaan benih unggul/sangat terbatas • Usahatani biofarmaka terpencar.
Kesempatan (O) • Produksi dalam negeri belum mencukup kebutuhan sendiri • Pasar ekspor tinggi • Industri pengolahan biofarmaka sudah berkembang dengan baik	**Strategi (S-O)** • Peningkatan produksi biofarmaka dengan melakukan ekstensifikasi • Penguatan dan penumbuhkembangan industri pengolahan biofarmaka terutama yang skala kecil dan menengah	**Strategi (W-O)** • Pengembangan dan penyediaan benih unggul • Pemberian insentif untuk pengembangan penanganan pasca panen/pengolahan primer
Ancaman (T) • Tidak ada jaminan harga yang pasti • Industri obat-obatan kimia berkembang • Perhatian pemerintah kurang	**Strategi (S-T)** • Pengembangan benih unggul sesuai dengan kebutuhan industri • Peningkatan kualitas produk biofarmaka	**Strategi (W-T)** • Perbaikan rantai pasok dari petani ke industri pengolahan biofarmaka • Kebijakan pendukung dan penguat industri biofarmaka

Lampiran 4.12. Analisis SWOT Produk Tanaman Hias

Faktor Internal / Faktor Eskternal	**Kekuatan (S)** • Potensi peningkatan produksi tanaman hias • Teknologi rekayasa bibit tanaman hias sudah dikuasai • Beragamnya jenis tanaman hias Indonesia • Berkembangnya sentra produksi • Pasar tanaman hias Indonesia sudah masuk ke pasar global cukup besar	**Kelemahan (W)** • Sentra produksi tanaman hias masih relatif minim • Kurangnya kemampuan SDM dalam GAP dan GHP • Teknologi pasca panen tanaman hias masih minim • Adanya persaingan antar petani dan pelak usaha tanaman hias • Belum diterapkannya cold chain management dengan baik
Peluang (O) • Pasar domestik masih terbuka luas • Peluang pasar internasional masih terbuka	**Strategi (S-O)** • Pengembangan sentra produksi tanaman hias • Peningkatan promosi dan temu bisnis • Pengembangan pasar bunga lokal • Pengembangan gerbang ekspor	**Strategi (W-O)** • Penyediaan benih bunga dan tanaman hias • Penyediaan fasilitas dan prasarana ekspor tanaman hias • Pengembangan packing house • Peningkatan kualitas tanaman hias melalui penerapan GAP, GHP • Penguatan Kelembagaan Petani
Ancaman (T) • Negara pesaing mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam teknologi penanganan pasca panen tanaman hias	**Strategi (S-T)** • Pencitraan tanaman hias eksotik khas Indonesia • Branding tanaman hias khas Indonesia	**Strategi (W-T)** • Sosialisasi SOP, GAP dan GHP ke petani dan pelaku uasaha • Penerapan SOP, GAP, GHP di tingkat petani dan pelaku usaha

Lampiran 4.13. Analisis SWOT Produk Minyak Atsiri

Faktor Internal / Faktor Eksternal	**Kekuatan** • Agroklimat sesuai • Potensi dan keragaman tanaman atsiri • Pemasok utama minyak atsiri dunia (nilam). • Industri sudah mampu memproduksi produk turunan minyak atsiri • SDM dan kemampuan IPTEK • Kesadaran *stake holder* untuk memajukan dan meningkatkan dayasaing IKM/ Produk minyak atsiri. • Dukungan Pemerintah	**Kelemahan** • Budidaya sebagai usaha sampingan, tersebar dan skala usaha kecil. • Produk minyak atsiri masih bernilai tambah rendah . • Produksi yang belum standar • Sistem tataniaga yang kurang memberikan insentif bagi petani dan penyuling • Persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha • Terbatasnya akses sumber pembiayaan • Kelembagaan lemah
Peluang (O) • Konsumsi dunia terhadap bahan *flavour* dan *fragrance* yang meningkat (5 persen/tahun). • Kecenderungan penggunaan bahan alami • Tumbuhnya industri pangan, kosmetik yang menggunakan produk minyak atsiri • Kemampuan SDM dan IPTEK untuk menghasilkan produk turunan minyak atsiri	**Strategi (S-O)** • Esktensifikasi dengan mempertimbangkan daya serap pasar • Penguatan riset dan pengembangan produk • Peningkatan peran dan pemanfaatan perguruan tinggi dan lembaga penelitian/ pengembangan untuk pengembangan dan diseminasi inovasi proses dan	**Strategi (W-O)** • Klasterisasi sentra produksi • Penguatan pilot project Cultiva di 5 lokasi dan replikasi • Pengembangan kemitraan poktan dengan industri hilir • Pengembangan skema pembiayaan yang bisa diakses oleh industri • Penerapan standar harga berdasarkan tabel mutu • Pembinaan melalui pendampingan teknologi oleh PT, Litbang, eksportir • Penguatan

	produk atsiri. • Insentif untuk penelitian dan pengembangan produk minyak atsiri	poktan/gapoktan dan asosiasi penyuling
Ancaman (T) • Globalisasi perdagangan dunia, serta isue-isue *non tariff barrier*. • Negara pesaing mampu memproduksi minyak atsiri, dengan produktivitas, efisiensi produksi dan mutu yang lebih baik. • Munculnya produk substitusi sintetik • Program yang pengembangan IKM Minyak atsiri yang masih belum terintegrasi	**Strategi (S-T)** • Peningkatan efisiensi penyulingan dan mutu minyak atsiri • Penguatan lobi untuk pemasaran ekspor • Sinkronisasi program pemerintah antar instansi yang berkaitan dengan pengembangan minyak atsiri	**Strategi (W-T)** • implementasi GAP dan GHPdan GMP • Bantuan peralatan alat penyulingan standard kepada poktan • Sosialisasi kondisi dan peraturan yang berlaku pada bisnis atsiri, baik di tingkat nasional maupun internasional • Pembentukan forum komunikasi antara poktan, dinas pertanian, pelaku usaha

Lampiran 4.14. Analisis SWOT Susu

Faktor Internal / Faktor Eskternal	**Kekuatan (S)** • Iklim mendukung • Lahan dan sumber pakan cukup • Teknologi pengolahan susu pasteurisasi telah dikuasai	**Kelemahan (W)** • Bibit sapi berkualitas belum tersedia cukup • Kualitas susu rendah • Kemampuan modal petani terbatas, sehingga usaha ternak hanya sampingan • Kemampuan manajerial koperasi/Gapoktan belum bagus • Peternak belum semua terkonsentrasi pada wilayah tertentu
Peluang (O) • Kebutuhan susu tinggi • Program minum susu segar dari pemerintah • Pasar substitusi impor sebesar 1.85 juta ton/th	**Strategi (S-O)** • Penciptaan sentra sapi perah • Peningkatan program konsumsi susu segar • Pengembangan koperasi pengolah susu	**Strategi (W-O)** • Penyediaan bibit unggul yang mencukupi. • Peningkatan skala usaha peternak • Peningkatan kemampuan produksi dan pemasaran di koperasi
Ancaman (T) • Kualitas susu impor jauh lebih bagus • Kebijakan keleluasaan impor susu • Industri pengolah lebih memilih susu impor	**Strategi (W-T)** • Kampanye minum susu segar	**Strategi (W-T)** • Peningkatan mutu susu dari peternak

Lampiran 4.15. Analisis SWOT Cassava

Faktor Internal / Faktor Eksternal	**Kekuatan (S)** • Dapat tumbuh di lahan marjinal dan kering • Tanaman tradisi yang telah dikuasai petani • Mempunyai peran pangan dan bahan baku industri • Kesenjangan produktivitas masih besar	**Kelemahan (W)** • Bukan sebagai komoditi utama • Produktivitas masih rendah • Varitas lokal • Perdagangan dalam bentuk segar • Industri pengolahan belum berkembang
Peluang (O) • Indonesia masih impor tapioca dan beberapa produk turunan cassava • Permintaan gaplek dan tapioka besar • Permintaan produk turunan besar	**Strategi (S-O)** • Pengembangan pertanian cassava varitas unggul • Penguatan industri gaplek dan tapioca • Pengembangan industri hilir cassava • Pendirian Pusat Penelitian Terpadu Cassava	**Strategi (W-O)** • Pemberian insntif sarana produksi • Penanaman varitas unggul • Pengembangan industri hilir
Ancaman (T) • Harga pokok produk negara lain lebih rendah • Penggunaan lahan untuk tanaman lain lebih menarik • Produk negara lain lebih unggul	**Strategi (S-T)** • Bantuan saprotan • Insentif bagi industri dalam negeri • Pengenaan tarif impor produk turunan cassava yang telah dihasilkan dalam negeri • Pengembangan standar mutu produk	**Strategi (W-T)** • Pengembangan pertanian cassava monokultur modern

Lampiran 4.16. Analisis SWOT Sagu

Faktor Internal / Faktor Eksternal	**Kekuatan (S)** • Luas tanaman sagu sekitar 1 juta hektar • Produktivitas tinggi (25 ton pati kering/ha-tahun) • Dapat tumbuh di lahan marginal (tergenang, gambut dan rawa) • Industri pengolahan sagu sudah ada dengan merek produk yang sudah dikenal	**Kelemahan (W)** • Teknologi pemanfaatan masih sangat sederhana dan tradisional • Cara penebangan yang dilakukan mengancam kelestarian tanaman • Masa panen pertama mencapai 8 tahun • Rendemen pengolahan dan mutu rendah karena keterbatasan alat • Industri pengolahan masih terbatas • Industri pengolahan untuk pangan belum berkembang
Peluang (O) • Teknologi budi daya sagu tergolong mudah dan sederhana • Potensi produksi sekitar 200 kg pati/batang atau setara dengan 20-25 ton per hektare • Nilai ekonomi budi daya sagu cukup tinggi • Potensi konversi menjadi energi (bioetanol) tinggi	**Strategi (S-O)** • Pengembangan budidaya sagu secara luas • Pengembangan industri hilir pengolahan sagu • Pengembangan industri bioetanol berbasis sagu	**Strategi (W-O)** • Perbaikan teknologi pengolahan pati sagu • Perbaikan cara pemanenan • Pengembangan industri kecil pengolahan sagu • Pengembangan bibit unggul berumur pendek • Pengembangan industri pangan (pokok) berbasis sagu

• Permintaan dari tepung sagu sebagai bahan baku untuk industri makanan meningkat • Pati sagu dapat diolah menjadi bahan pangan pokok		
Ancaman (T) • Kerusakan hutan sagu	**Strategi (S-T)** • Pengembangan budidaya sagu berkelanjutan	**Strategi (W-T)** • Pengembangan sagu berwawasan lingkungan

Lampiran 4.17. Analisis SWOT Jeruk

Faktor Internal / Faktor Eksternal	**Kekuatan (S)** • Area tanam di masyarakat • Teknologi rekayasa bibit unggul sudah dikuasai • Varietas unik Indonesia	**Kelemahan (W)** • Kebun buah tidak monokultur dan tersebar • Kurangnya kemampuan SDM dalam GAP, GMP • Kualitas dan dayasaing buah relatif rendah
Peluang (O) • Pasar domestik masih terbuka luas • Berkembangnya industri berbahan baku buah	**Strategi (S-O)** • Kemitraan gapoktan dgn industri olahan buah • Mendorong gapoktan untuk memiliki usaha industri buah	**Strategi (W-O)** • Clustering kebun jeruk • Penyediaan bibit unggul • Peningkatan kualitas buah melalui penerapan GAP, GMP
Tantangan (T) • Produk jeruk impor berkualitas tinggi • Persepsi negative konsumen terhadap jeruk lokal	**Strategi (S-T)** • Pencitraan produk buah eksotik khas Indonesia • Pembangunan *sorting, gradin and packing house* • Gerakan cinta buah lokal	**Strategi (W-T)** • Peningkatan kemampuan petani dan Gapoktan • Penerapan SOP, GAP, GMP • Dukungan kebijakan untuk menggunakan bahan baku buah lokal pagi industri

Lampiran B

BLUE PRINT

PENINGKATAN NILAI TAMBAH DAN DAYASAING PRODUK PERTANIAN DENGAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI TUMBUHNYA INDUSTRI PERDESAAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

Latar Belakang

1. Pertanian masih merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Sektor pertanian telah berperan besar dalam pembentukan PDB Nasional hingga mencapai 13-14 %. Sektor agribisnis (pertanian serta industri dan jasa pertanian) menyumbangkan sekitar 45% dari total nilai tambah, menyerap 75% tenaga kerja, penyedia pangan, dan tempat bergantung sebagian besar penduduk perdesaan. Peran ini akan bertambah di masa yang akan datang dengan berkembangnya teknologi dan berkurangnya sumberdaya tak terbarukan, yakni pertanian menjadi tumpuan untuk penyediaan pangan yang makin beragam (*food*), pakan yang semakin bertambah (*feed*), dan energi alternatif (*fuel*).
2. Keadaan pertanian saat ini masih belum mampu menopang semua peran tersebut dengan baik. Pendapatan petani sebagai pelaku terdepan masih sangat rendah karena sebagian besar usaha tani berskala kecil.

   Petani mempunyai banyak keterbatasan modal, teknologi sederhana, akses pembiayaan, dan gangguan iklim yang semakin tidak menentu. Akibatnya produktivitas masih relatif rendah, kualitas komoditi belum baik, dan harga pokok masih tinggi. Situasi ini menjadikan komoditas pertanian Indonesia kalah bersaing dengan komoditas dari negara lain.

3. Pertanian terpusat pada kegiatan hulu dengan dayasaing komoditas relatif rendah. Keterbatasan skala teknis menghambat penerapan teknologi (khususnya *cost reducing technology*) menyebabkan biaya produksi menjadi lebih mahal. Keterbatasan skala ekonomis menyebabkan pengelolaan bersifat subsisten yang berorientasi pada pemenuhuan kebutuhan lokal dan sesaat sehingga tidak bersaing. Hal inilah menjadi potret umum pertanian Indonesia yakni menghasilkan bahan baku dengan dayasaing rendah (mutu rendah dan biaya tinggi)...

4. Tantangan ke depan yang harus dihadapi adalah meningkatkan dayasaing komoditas pertanian dengan karakteristik yang sesuai keinginan konsumen dan memenangi persaingan, baik pasar domestik, maupun pasar ekspor. Pengembangan dayasaing dan ekspansi pasar komoditas ekspor tradisional harus lebih ditingkatkan, terutama pengembangan produk olahan. Di samping itu, pengembangan komoditas dan produk baru yang memiliki permintaan pasar yang tinggi juga harus dirintis.

5. Blue print ini berbasis komoditas yang meliputi **pangan utama** (beras, jagung, kedelai, daging sapi), **andalan ekspor** (sawit, karet, kakao dan daging ayam), ***emerging products*** yang meliputi buah tropika (mangga, manggis, salak dan pisang), biofarmaka, tanaman hias daun dan minyak atsiri, dan **substitusi impor** (susu, tepung lokal dan jeruk).

Daya Saing Produk dan Nilai Tambah

6. Dayasaing bersifat dinamis dan akan mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu bergantung pada tingkat kompetisi, perubahan perilaku permintaan, dan kemampuan dasar industri. Dayasaing produk dicapai melalui konversi keunggulan komparatif menjadi kenggulan kompetitif dengan penerapan teknologi,

pengelolaan dan pengembangan pasar dari produk tersebut terhadap jenis produk yang sama. Banyak faktor mempengaruhi dayasaing produk (keunggulan sumberdaya, SDM, teknologi, karakteristik produk, infrastrktur).

7. Nilai tambah dapat diartikan dari berbagai perspektif. Dari perspektif komoditas atau produk adalah nilai yang diberikan (*attributed*) kepada produk sebagai hasil dari proses tertentu (proses produksi, penyimpanan, pengangkutan). Oleh karena itu, nilai yang terbentuk tergantung pada banyaknya tahapan pengolahan yang dilakukan. Secara teoritis, semakin ke hilir penerapan proses akan semakin besar nilai tambah yang dibentuk.
8. Peningkatan dayasaing dan nilai tambah melalui industri perdesaan harus melalui perumusan yang komprehensif yang melibatkan lintas sektoral yang mencakup hulu hilir sehingga program yang dikembangkan dapat saling menunjang satu sama lain. Dengan memperhatikan *push and pull factors* (faktor pendorong dan penarik) dirumuskan insentif yang dapat diberikan dalam aspek kebijakan dan operasional untuk menciptakan iklim tumbuhnya industri yang kondusif, modal, dukungan infrastruktur, penerapan teknologi, peningkatan SDM serta fasilitasi pemasaran produk.
9. Strategi pengembangan industri perdesaan didasarkan pada hasil analisis SWOT. Berdasarkan strategi tersebut selanjutnya disusun strategi umum pengembangan produk yang dipilih. Peran dari masing-masing sektoral untuk masing-masing produk yang dikembangkan diidentifikasi melalui *mapping* program lintas sektoral yang ada di Departemen terkait. Selanjutnya strategi operasional pengembangan produk dirumuskan berdasarkan pada strategi masing-masing produk dan dijabarkan dalam rencana aksi yang disusun berdasarkan jangka panjang, menengah dan pendek selama lima tahun (2010-2014).

Strategi, Kebijakan, dan Program

10. Beradasarkan pada analisis SWOT komoditas dikembangkan strategi spesifik dalam memanfaatkan peluang dan kekutan serta mengatasi masalah dan ancaman. Dari strategi spesifik tersebut dikembangkan strategi pokok yang bersifat umum sebagai berikut: (i) perbaikan skala teknis dan ekonomis usaha tani, (ii) pengendalian konversi lahan subur, (iii) perbaikan teknologi budidaya dan penanganan pasca panen (perbaikan dayasaing, (iv) peningkatan produkstivitas dan produksi, (v) peningkatan kualitas penanganan pasca panen untuk perbaikan mutu dan pengurangan susut, (vi) pengembangan agroindustri (perolehan nilai tambah), (vii) penyediaan dana pengembangan pertanian, (viii) penguatan posisi tawar produk pertanian, (ix) penganekaragaman bahan pangan pokok dan gula, (x) pertanian adaptif dan berkelanjutan, (xi) penguatan kelembagaan (Poktan, Gapoktan dan Koptan), (xii) peningkatan kualitas SDM penyuluh, petani dan pelaku industri perdesaan, (xiii) pemberian insentif yang berorientasi penguatan dayasaing dan penumbuhan industri perdesaan, dan (xiv) percepatan pembangunan infrastruktur pendukung pertanian.
11. Pembangunan pertanian tidak dapat berdiri sendiri dan secara kuat terkait dengan kementerian dan instansi lainnya. Bahkan dapat dikatakan bahwa keberhasilan pembangunan pertanian sebagian besar ditentukan oleh kontribusi sektor lain. Diantara kebijakan eksternal tersebut adalah penataan lahan (redistribusi lahan), revisi kewenangan di bidang pembinaan agroindustri, skim kredit khusus untuk mendorong industri hilir peranian (bunga rendah), bank pertanian, subsidi *output*, kebijakan perbaikan infrastruktur dan pemberian insentif transportasi produk pertanian, peningkatan pajak impor untuk produk hilir yang sudah mampu

diproduksi di dalam negeri, peningkatan pajak ekspor untuk produk primer perkebunan (khususnya biji kakao), penghilangan pungutan retribusi produk pertanian, stabilisasi harga, dan kebijakan pengutamaan penggunaan bahan baku lokal untuk pemenuhan kebutuhan agroindustri dalam negeri (khususnya susu, tepung, jagung, kakao).

12. Kebijakan teknis internal yang diperlukan dalam peningkatan daya saing dan nilai tambah adalah bantuan sarana produksi, bantuan mesin dan peralaran pasca panen dan pengolahan, pembangunan infrastruktur pertanian (khususnya jaringan irigasi tersier, jalan usahatani, embung), pelatihan dan pendampingan, penerapan system jaminan mutu melalui instrumen SPS dan TBT, dan penguatan promosi (pameran, iklan layanan masyarakat).

13. Selain kordinasi dan keterpaduan antar Instansi Pemerintah (*Government*), keberhasilan program juga ditentukan oleh peran aktif dunia usaha (*Business*) sebagai pelaku utama kegiatan ekonomi, dan akademisi (*Academic*) sebagai penghasil teknologi termasuk pemikiran ilmiah pembentuk dayasaing. Peran aktif harus terencana, terpadu dan terprogram sehingga terjadi keserasian yang saling terkait dan menguatkan.

Program Aksi

14. Program aksi peningkatan nilai tambah dan daya saing melalui penumbuhan agroindustri perdesaan disusun berdasarkan komoditas strategisn yang dianalisis berdasar kondisi terkini dan sasaran minimum lima tahun yang akan datang. Dari analisis tersebut disusun strategi (inti dan penguat) yang dijabarkan dalam rencana aksi yang akan dilaksanakan setiap tahun oleh semua pemangku kepentingan.

15. Komoditas yang dipilih sebagai penghela tumbuhnya industri perdesaan disesuaikan dengan komoditias prioritas yang dikelompokkan sebagai komoditas pangan utama yang meliputi beras, jagung, kedelai, daging sapi. Komoditas andalan ekspor yang meliputi sawit, karet, kakao dan daging ayam. Kelompok *emerging products* yang mempunyai peluang pasar yang luas baik internasional maupun domestik seperti buah tropika (mangga, manggis, salak dan pisang), produk biofarmaka, tanaman hias daun dan minyak atsiri Kelompok produk yang diarahkan untuk substitusi impor seperti susu, tepung lokal (*cassava* dan sagu) serta jeruk. Pemilihan jenis komoditas ini diharapkan dapat mewakili dari kelompok komoditi yang ada, mempunyai potensi untuk peningkatan dayasaing dan nilai tambah yang tinggi serta mempunyai *multiplier effect* yang luas terhadap peningkatan industri perdesaan.

16. Outcome masing-masing rencana aksi pengembangan produk adalah sebagai berikut:

    a. **Beras:** Swasembada berkelanjutan melalui ekstensifikasi terbatas (*rice estate*) penurunan susut pasca panen dan pengolahan, penganekaragaman bahan pangan pokok dan penumbuhkembangan industri pedesaan pengolah tepung dan turunannya serta hasil samping. Juga penumbuhan beras-beras berkualitas tinggi dan *specialty*.

    b. **Jagung:** Swasembada berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pakan dan pangan dengan penurunan susut pasca panen dan penyediaan pergudangan, serta penumbuhkembangan industri pedesaan pengolahan pakan dan pangan.

    c. **Kedelai:** Menuju swasembada untuk mencukupi kebutuhan kalori protein melalui peningkatan produktifitas dan penguatan industri pedesaan pengolahan pangan berbasis kedelai.

d. **Gula:** Swasembada gula melalui perbaikan produktivitas dan efisiensi, pengembangan bibit unggul, revitalisasi pabrik dan pengembangan gula non-tebu

e. **Sapi:** Swasembada daging sapi untuk peningkatan kualitas asupan gizi melalui pengembangan budidaya intensif berkelanjutan, pengembangan mutu pakan, pengembangan peternakan terintegrasi dengan tanaman, penguatan Rumah Potong Hewan (RPH) dan pengembangan sistem pasokan rantai dingin.

f. **Sawit:** Meningkatkan pertumbuhan nilai ekspor produk berbasis sawit melalui peningkatan peran perkebunan sawit rakyat, infrastruktur transportasi dan pelabuhan, dan pengembangan industri hilir turunan minyak sawit (termasuk bioenergy) untuk meningkatan nisbah ekspor produk olahan.

g. **Karet:** Peningkatan mutu melalui penerapan SNI wajib, GAP dan GMP yang didukung oleh perbaikan produktivitas kebun dan pengembangan industri hilir berbasis karet (khususnya sheet)

h. **Kakao:** Memenuhi kebutuhan industri pengolahan dalam negeri dan meningkatkan nilai ekspor kakao melalui pengembangan kakao fermetasi dan penumbuhkembangan industri pedesaan pengolahan kakao (lemak dan bubuk kakao).

i. **Kopi:** Meningkatkan ekspor melalui penerapan system jaminan mutu dan sertifikasi kopi specialty (khususnya organic, geographical indicative), penerapan registrasi bagi para eksportir.

j. **Ayam Pedaging:** Memenuhi kebutuhan dalam negeri untuk meningkatkan asupan gizi dan meningkatkan ekspor melalui pengembangan usaha ternak yang intensif berkelanjutan, pengembangan pakan berbasis sumberdaya lokal, dan penerapan system jaminan mutu pada industri pengolahan daging ayam pedesaan, pengembangan sistem pasokan rantai dingin.

k. **Buah Tropika (khususnya jeruk, pisang, manggis, salak, mangga):** Meningkatkan pangsa pasar (dalam negeri dan luar negeri) buah tropika melalui penerapan system jaminan mutu pada kegiatan *on farm* dan *off farm,* pengembangan fasilitas *grading and packing,* serta penumbuhkembangan industri pedesaan pengolahan buah, pengembangan sistem pasokan rantai dingin, serta promosi kecintaan buah nusantara.

l. **Biofarmaka:** Meningkatkan penyediaan industri farmasi dan kosmetik dalam negeri dan meningkatkan pangsa pasar ekspor melalui penerapan system jaminan mutu kegiatan *on farm* dan *off farm*, penguatan industri pedesaan (poktan) untuk melakukan pengolahan sampai simplisia.

m. **Tanaman Hias:** Meningkatkan ekspor tanaman hias melalui pengembangan sentra produksi dengan pola kluster dan penerapan teknologi pasca panen (rantai dingin) untuk mempertahankan tingkat kesegaran tanaman hias.

n. **Minyak Atsiri:** Meningkatkan ekspor melalui penerapan system jaminan mutu di *on farm* dan *off farm*, penguatan industri pedesaan untuk melakukan proses penyulingan dengan peralatan standar.

o. **Cassava dan Sagu:** Memenuhi kebutuhan tepung dalam negeri untuk mendukung diversifikasi dan ketahanan pangan melalui pengembangan industri pengolahan tepung (cassava termodifikasi), pemberian insentif investasi agroindustrui tepung di perdesaan, dan kebijakan penyerapan tepung lokal untuk industri makanan.

p. **Susu**: Memenuhi kebutuhan susu dalam negeri untuk mendukung peningkatan gizi masyarakat melalui pengembangan industri pengolahan susu perdesaan berbasis kluster, pemberian insentif investasi agroindustrui susu di perdesaan, dan kebijakan penyerapan susu lokal untuk industri pengolahan susu.